



# Warga Ragukan Pembangunan Wantilan Nusamara Sesuai Anggaran

Negara (Bali Post) -

Permasalahan pembangunan Wantilan Desa Pakraman Nusamara, Desa Yehembang Kangin, Mendoyo ternyata hingga kini masih bergulir. Selain penggarapan yang sempat molor hingga hampir setahun, wantilan yang dibangun di dekat Pura Dalem Nusamara itu diduga bermasalah. Di samping pengerjaan diborongkan ke rekanan di Gianyar hingga molor sampai awal tahun 2019, pembangunan diduga juga tidak sesuai dengan spek. Padahal bantuan dari pusat sudah turun sejak tahun 2018 lalu dan dikerjakan mulai Agustus 2018.

Meskipun kini sudah rampung dikerjakan, banyak warga yang meragukan bangunan itu sesuai dengan nilai bantuan, yakni Rp 400 juta. Beberapa bagian bangunan seperti tiang dan atap bangunan menggunakan baja ringan.

Sekretaris Tim Komunitas Pembangunan Wantilan Nusamara I

Putu Sukabrata kepada wartawan, Selasa (11/6) mengungkapkan, terkait dugaan permasalahan ini, panitia dan pihak yang terkait sempat dimintai keterangan. Sesuai nilai yang diterima, uang pembangunan wantilan Nusamara sebesar Rp 400 juta dan jumlah itu berdasarkan pengajuan proposal

Diakutinya, pengerjaannya diborongkan kepada rekanan asal Gianyar dengan dana diserahkan secara bertahap sebanyak tiga kali. Namun total yang diberikan hanya Rp 380 juta. Sisanya dibebarkannya masing-masing Rp 16 juta untuk biaya upakara dan Rp 4 juta untuk biaya administrasi pelaporan pertanggungjawaban (SPJ).

Terkait anggaran bantuan ini menurutnya juga telah disampaikan secara terbuka oleh Bendesa Pakraman Nusamara di hadapan masyarakat Nusamara. Jumlah bantuan dan rincian biaya ini menurutnya perlu disampaikan ke masyarakat terutama krama yang menerima manfaat Wantilan itu, agar jelas. Sukabrata menegaskan bahwa komunitas tidak

menggunakan anggaran itu. Melainkan diserahkan ke pihak rekanan, sehingga menjadi tanggung jawab pihak rekanan.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan wantilan di ujung perbatasan hutan ini sempat dipertanyakan warga Nusamara. Sebab, meskipun anggaran telah turun sejak tahun 2018 lalu, pengerjaan belum ada hasil. Pada Januari 2019 lalu, pembangunan baru sebatas fondasi dan tiang untuk penyangga kap baja. Sejak awal, proses pengerjaan mulai dari penggalian lubang hingga pemasangan batu hanya dua orang. Padahal, di desa pakraman lain yang bantuannya turun bersamaan sudah hampir rampung. Bahkan bangunan juga lebih besar. (kmb26)

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019

Hal : 10



# Pusat Gelontorkan Rp 4 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Baturiti

Tabanan (Bali Post) -

Pasar Baturiti tahun ini akan kembali direvitalisasi, setelah Pemerintah Pusat memutuskan menggelontorkan dana Rp 4 miliar. Pasar Baturiti mendesak direvitalisasi, mengingat sampai sekarang belum mendapatkan penanganan setelah ambruk akibat gempa Lombok 7 SR pada 5 Agustus 2018.

Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Tabanan Ni Wayan Primayani, Rabu (19/6) kemarin menyampaikan, Pemkab Tabanan melalui Disperindag telah mengajukan anggaran ke pusat untuk membangun kembali pasar terbesar di Baturiti tersebut. "Pemerintah pusat menyetujui dan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 4 miliar untuk revitalisasi Pasar Baturiti. Proyeknya baru akan lelang, masih persiapan," ungkap Primayani.

Dikatakannya, setelah ada keputusan pusat memberikan bantuan, pihaknya telah melakukan proses administrasi

termasuk menyusun *Detail Engineering Design (DED)* pembangunan Pasar Rakyat Baturiti yang baru. Dengan demikian, tender sudah siap dilaksanakan.

Diharapkan proses tender dan pembangunan pasar dapat berjalan sesuai rencana sehingga pedagang yang terdampak gempa dapat kembali berjualan di dalam pasar yang representatif dan tidak lagi berjualan di area parkir.

Selain Pasar Baturiti, tahun ini Disperindag telah mengajukan revitalisasi Pasar Bajera. Primayani mengatakan, Pasar Bajera sebenarnya sudah mendapatkan dana revitalisasi yang bersumber dari Dana Alo-

kasi Khusus (DAK) dua tahun lalu. "Tetapi dana tersebut hanya bisa merevitalisasi setengah dari Pasar Bajera. Sehingga tahun ini kami usulkan lagi dan sedang kami koordinasi dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Setelah Pasar Baturiti dan Pasar Bajera direvitalisasi, masih ada lima pasar tradisional di Kabupaten Tabanan yang memerlukan revitalisasi, karena kondisinya yang sudah tidak layak. Disperindag sudah mengajukan anggaran untuk tahun 2020 ke Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait revitalisasi tiga pasar, yaitu Pasar Sayur Baturiti, Pasar Daun Pala, dan Pasar Pupuan. Sementara untuk dua pasar

lainnya yaitu Pasar Candikuning dan Pasar Kerambitan, diajukan melalui DAK.

Untuk diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi pasar bertujuan menarik minat konsumen. Pasar tradisional harus dipertahankan sebab di dalamnya terdapat sesuatu yang khas, yakni interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Selama ini Disperindag juga terus melakukan pendataan pasar yang perlu diperbaiki.

"Revitalisasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan kesan kumuh dan bau dari pasar tradisional. Paling tidak, dengan menciptakan suasana pasar tradisional yang bersih dan sehat masyarakat tidak akan beralih ke pasar modern," ujar Primayani. (kmb28)

Edisi : Kamis, 20 Juni 2019

Hal : 12



## Plafon Gedung DPRD Mengelupas, Setwan Rehab Sebelum Pelantikan Dewan Baru

Bangli (Bali Post) -

Kondisi gedung DPRD Bangli makin memprihatinkan. Tak hanya mengalami bocor saat hujan, plafon di lantai dua gedung itu kini sudah banyak yang mengelupas. Hingga saat ini belum ada upaya perbaikan terhadap bangunan gedung DPRD tersebut. Padahal dalam waktu dekat gedung tersebut akan dipakai menggelar acara pelantikan anggota dewan yang baru.

Berdasarkan pantauan Rabu (19/6) kemarin, plafon berbahan triplek di lantai dua gedung dewan mengelupas di beberapa titik. Kondisi tersebut cukup membahayakan karena kerusakannya berada persis di atas tempat duduk yang sering dipakai pimpinan dewan saat menggelar rapat kerja. Tak hanya mengelupas, kondisi tembok bangunan juga mulai retak di beberapa titik. Seperti halnya yang terlihat di tembok dekat ruang sekretariat.

Sekretaris DPRD Bangli A.A. Panji Awatarayana saat

dikonfirmasi tak menampik hal itu. Menurutnya, kerusakan disebabkan usia bangunan kantor yang sudah tua. Meski demikian, ia mengaku akan segera memperbaiki kerusakan gedung dewan dalam waktu dekat. "Kita akan lakukan rehab. Fokus pada rangka atas termasuk plafonnya," terangnya.

Untuk kegiatan perhaban tersebut, Agung Panji mengatakan menyiapkan anggaran Rp 75 juta. Rencananya perbaikan akan dikerjakan pada Juli mendatang, sebelum acara pelantikan anggota DPRD Bangli periode 2019-2024.

Selain merehab gedung dewan, pihaknya juga akan melakukan pengecatan ulang pada rumah jabatan Ketua DPRD Bangli. "Pengajuan anggaran sebenarnya dilakukan secara rutin. Hanya turunnya anggaran baru sekarang jelang acara pelantikan DPRD yang baru. Jadi kesannya rehab sebagai persiapan pelantikan," tandasnya. (kmb40)

Edisi : Kamis, 20 Juni 2019

Hal : 14



# Pembangunan Gedung PMI Mulai Juli

Tabanan (Bali Post) -

Proyek pembangunan gedung PMI Tabanan akan kembali dilanjutkan. Sebelumnya, proyek ini sempat mengalami gagal lelang. Pembangunan gedung dengan anggaran Rp 2,9 miliar dari BKK Badung tersebut ditargetkan mulai dikerjakan Juli mendatang.

Kabid Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRP-KP) Tabanan Kadek Faridatini Suweca, Rabu (26/6) kemarin, mengakui adanya keterlambatan realisasi pengerjaan gedung PMI karena sebelumnya mengalami gagal tender. "Kini masih proses lelang dan dalam masa sanggah sesudah pengumuman," terangnya.

Dikatakan Faridatini, jika tidak ada kendala atau gagal tender, kontrak pengerjaan direncanakan pada pertengahan Juli mendatang. "Pengerjaan fisiknya sekitar empat bulan kalender," ucapnya.

Sebelumnya, gedung PMI berada di sebelah selatan Taman Makam Pancaka Tirta Tabanan, yang bergabung dengan Kwarcab Pramuka Tabanan dan PPTI. Kini, gedung PMI dan Unit Transfusi Darah akan dibangun di area RS Nyitdah, Kecamatan Kediri. Dengan dua lantai, gedung PMI yang baru ini dibangun dengan luas 413 meter persegi. "Dua lantai,

per lantainya lebih kurang 1 are atau 100-meter persegi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua PMI Tabanan yang juga wakil Bupati I Komang Gede Sarijaya mengatakan, kondisi gedung PMI yang ditempati bersama dengan Pramuka dan PPTI sudah sangat memprihatinkan. Banyak atap yang bocor dan kondisi gedung juga sudah tidak representatif untuk digunakan. Untuk itu, perlu peremajaan gedung, mengingat intensitas kegiatan PMI dan Unit Transfusi Darah di Tabanan semakin padat.

Diharapkan dengan adanya gedung representatif, pelayanan PMI ke masyarakat semakin baik. Apalagi permintaan terhadap darah semakin banyak sehingga kinerja PMI perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pihaknya berharap proses lelang dapat berjalan lancar sehingga pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. "Begitu gedung selesai, Pemkab memenuhi peralatannya," katanya. (kmb28)

Edisi : Kamis, 27 Juni 2019

Hal : 7



## Pemkab akan Siapkan Dana untuk Pilkada Bangli

**Bangli (Bali Post) -**

Pemerintah Kabupaten Bangli akan menyiapkan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Besaran dana yang disiapkan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Ida Bagus Giri Putra, Jumat (7/6).

Giri Putra mengatakan, Pilkada merupakan program strategis nasional yang harus didanai dan wajib dilaksanakan. Berkenaan dengan kebutuhan dana yang telah diajukan KPU, Bawaslu dan Polres Bangli, maka untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada tentunya Pemkab Bangli wajib menyiapkannya. "Akan tetapi, kita senantiasa menyesuaikan dengan kemampuan daerah. Prinsipnya wajib disiapkan," terangnya.

Dalam penyiapan anggaran Pilkada, lanjut Giri Putra, pihaknya nantinya membahas terlebih dahulu di TAPD. Selanjutnya, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan KPU, Bawaslu, dan Polres. Anggaran Pilkada akan disiapkan dalam APBD 2020. "Prinsipnya dipenuhi. Kembali nantinya disesuaikan atas pembahasan bersama dengan pihak legislatif. Kalau harapan kami bisa dipenuhi untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada di Bangli," katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, jelang Pilkada 2020, KPU, Bawaslu, dan Polres Bangli telah mengusulkan kebutuhan dana ke Pemkab Bangli. Besaran ke-

butuhan dana yang diusulkan KPU yakni Rp 21,4 miliar, Bawaslu Rp 6,9 miliar, dan Polres Bangli Rp 12,6 miliar lebih.

Komisioner KPU Bangli, Ni Putu Anom Januwintari, yang dihubungi Kamis (6/6) lalu, mengungkapkan anggaran Rp 21,4 miliar yang diusulkannya tersebut dirancang untuk membiayai sejumlah kegiatan. Mulai dari sosialisasi, pengadaan logistik, hingga disiapkan untuk membiayai pemungutan suara ulang. "Yang banyak untuk sosialisasi Rp 1,7 miliar," ungkapnya. Adapun yang menjadi pertimbangan pihaknya memasing anggaran sosialisasi hingga Rp 1,7 miliar karena pihaknya akan melakukan sosialisasi hingga ke tingkat paling bawah. Selain untuk sosialisasi, kegiatan yang membutuhkan biaya banyak yakni pengadaan logistik. Anom mengatakan, pada Pilkada nanti semua logistik seperti kotak suara, bilik suara dan lainnya harus pengadaan baru. Logistik kotak dan bilik suara berbahan kardus yang pengadaannya dilakukan pusat dan telah terpakai saat Pemilu lalu tak bisa digunakan lagi dan akan dilelang.

Anom mengatakan, kebutuhan dana yang telah diujukannya tersebut, nantinya dibahas lebih lanjut oleh Pemkab bersama DPRD serta KPU. Pihaknya sangat berharap, pemerintah kabupaten bisa merealisasikan kebutuhan dana yang telah diajukan. Sehingga semua kegiatan yang telah dirancang bisa berjalan lancar. (kmb40)



# Badung Anggarkan Rp 7 M untuk PKB

Mangupura (Bali Post) -

Kabupaten Badung akan tampil maksimal di ajang PKB kali ini. Anggaran PKB tahun ini mencapai Rp 7 miliar. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung, Ida Bagus Bhasma, menjelaskan, duta kesenian gongg kebyar, baik anak-anak, dewasa, maupun wanita telah diberikan pengarahann khusus. Pasalnya, gongg kebyar ini tidak dilombakan lagi di daerah sebelum tampil ke PKB.

"Khusus untuk lomba gongg kebyar, kami ambil dari juara-juara tingkat kabupaten sebelumnya. Karena tidak ada lomba lagi (di tingkat kabupaten - red) kita pakai itu. Terutama untuk gongg kebyar wanita dan anak-anaknya."

lata birokrat asal Desa Taman, Abiansemal ini.

Dia berharap, para seniman Gumi Keris bisa tampil maksimal, sehingga bisa memberikan tontonan dan hiburan bagi rakyat Bali. Terlebih, dana pendukung

kegiatan ini tidak sedikit, yakni mencapai Rp 7 miliar.

Ditambahkannya, rekonstruksi Sekaa Gambuh Tumbak Bayuh, Mengwi, kembali dipentaskan pada PKB ke-41. Pertunjukan serupa sempat ditampilkan pada PKB ke-36

di Kalangan Angsoka, Taman Budaya Bali. Selain itu, tradisi Mekotek dari Munggu akan dibawa ke dalam bentuk drama kolosal. Selain tradisi Mekotek, pihaknya juga akan melibatkan sekitar 4.862 seniman untuk menghibur rakyat Bali. "Kalau dulu, Mekotek ditampilkan dalam pawai, sekarang kami bawa ke dalam pragmen tari kolosal Makotek yang merupakan tradisi ciri khas Kabupaten Badung dari Desa Munggu," ujar I.B. Bhasma. (kmb27)

Edisi : Minggu, 16 Juni 2019

Hal : 2



## Dana Pensiun Dewan ✓ Enam Kali Gaji Pokok

Mangupura (Bali Post) -

Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Badung ternyata mendapatkan dana representasi alias pensiun. Hanya, sesuai kebijakan yang mengacu pada PP No. 18 Tahun 2017, dana pensiun yang mereka dapatkan hanya enam kali gaji pokok.

Informasi yang dihimpun dari Sekretariat DPRD Badung, Selasa (18/6) kemarin, jabatan Ketua DPRD uang representasinya dihitung sebesar Rp 2.100.000. Dengan begitu, uang purnabaktinya 6 x Rp 2.100.000 yakni sebesar Rp 12.600.000. Wakil Ketua DPRD memperoleh uang representasi Rp 1.860.000, sehingga dana

purnabakti untuk dua jabatan Wakil Ketua DPRD masing-masing mendapatkan sebesar Rp 11.160.000. Sedangkan untuk anggota dewan besaran uang representasi anggota DPRD dihitung Rp 1.575.000. Jadi, para anggota DPRD Badung yang jumlahnya 37 orang masing-masing akan mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 9.450.000.

Sekretaris DPRD Badung I Nyoman Predangga mengungkapkan, secara keseluruhan besaran dana representasi yang dialokasikan 40 anggota DPRD Badung mencapai Rp 358 juta. "Anggota DPRD Badung periode 2014-2019 akan habis masa

jabatannya 4 Agustus 2019 akan mendapat dana pensiun. Namun, mereka semua sudah tidak akan menerima gaji bulan Agustus karena sudah berakhir," katanya.

Menurutnya, bagi anggota Dewan periode 2019-2024, pemerintah setempat juga memberikan dua buah lencana emas seberat 5 gram dan 10 gram kepada anggota dewan baru. Dua lencana emas 22 karat dengan masing-masing sebesar 5 dan 10 gram ini tengah disiapkan. "Artinya, bila masa jabatan berakhir 4 Agustus maka di bulan itu juga dana purnabakti sudah cair," paparnya. (kmb27)

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 3



## Dugaan Korupsi Dana Desa Dauh Puri Kelod Mengerucut ✓

Denpasar (Bali Post)-

Penyidik Pidsus Kejari Denpasar terus mengembangkan kasus dugaan korupsi Dana Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat. Bahkan informasi yang didapat, penyidikan sudah mengerucut. Hanya saja, pihak kejaksaan belum mau menyebutkan calon tersangkanya.

Dikonfirmasi Selasa (18/6) kemarin, Kasipidsus Kejari Denpasar Nengah Astawa menjelaskan, ada empat orang

kadis dan satu orang mantan camat diperiksa kemarin. Mereka ada dari BPMD, Inspektorat, Kadis BPKAD, Kadis BPBD dan mantan camat Denpasar Barat. "Ada empat kadis dan satu mantan camat. Camat juga kami periksa tadi," katanya.

Dijelaskan, dari dana Rp 1.035.000.000, yang awalnya diduga menjadi temuan, sudah ada yang mengembalikan. Di antaranya mantan Kepala Desa Dauh Puri Kelod Rp

8,5 juta, Kaur Perencanaan mengembalikan Rp 102 juta, Bendahara Rp 144 juta. Sisanya sekitar Rp 780 juta yang diduga masih sumir. Untuk mendalami hal itu, pihak kejaksaan akan mendalami saksi lainnya, termasuk dari Camat Denpasar Barat dan Inspektorat.

Disinggung soal peluang tersangka, Astawa mengatakan pihaknya tidak berani memastikan apakah satu atau dua bahkan lima orang. Yang jelas hingga saat ini penyidik kejaksaan masih mengumpulkan bukti-bukti terkait. "Belum tahu berapa orang (calon tersangka). Kami tetap berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan bukti sebanyak banyaknya. Yang jelas dari Rp 1.035.000.000, ada mantan kades mengembalikan Rp 8,5 juta, ada Bendahara Rp 144 juta dan Kaur Perencanaan Rp 102 juta," jelasnya. (kmb37)

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 2



## Pengadaan SAR Dianggarkan Rp 50 Juta

Tabanan (Bali Post) -

Sebagai langkah mengataasi rabies, selain menyediakan Vaksin Anti-Rabies (VAR), Dinas Kesehatan (Diskes) Tabanan juga menyediakan Serum Anti-Rabies (SAR). Pada tahun 2018, ketersediaan SAR sempat kosong karena stok di distributor kosong. Tahun ini Diskes kembali melakukan pengadaan SAR sebanyak tujuh vial dengan anggaran Rp 50 juta.

Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan Tabanan dr. Ketut Nariana, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, pengadaan SAR tahun ini sedang memasuki proses lelang. Penyediaan SAR maupun VAR merupakan salah satu langkah dalam mengatasi rabies di Bali, dimana statusnya hingga saat ini masih KLB.

Nariana menjelaskan, SAR biasanya diberikan pada kasus gigitan risiko tinggi dan anjing yang menggigit positif rabies. Adapun risiko tinggi adalah gigitan dekat dengan kepala, besar, dalam dan banyak. SAR memiliki fungsi menetralkan virus pada luka sekaligus memberikan perlindungan selama tujuh hingga 10 hari sebelum antibodi yang terbentuk dari vaksin muncul. "Jadi, untuk gigitan risiko tinggi ini, selain diberikan SAR juga disertai dengan pemberian VAR," ujar Nariana.

Sementara untuk VAR diberikan setelah tergigit hewan yang diduga membawa virus rabies. VAR berfungsi merangsang antibodi penetral virus rabies. Untuk mendapatkan antibodi yang maksimal, pemberian VAR diberikan sebanyak tiga kali, yaitu pada hari pertama

atau saat tergigit sebanyak dua vial. Kemudian hari ke-7 sebanyak satu vial dan terakhir pada hari ke-21 sebanyak satu vial.

Pengadaan SAR, lanjut Nariana, lebih sulit dibandingkan VAR. Sebab produk SAR terbatas dan hanya diproduksi di Prancis. Harganya pun mahal dan masa kedaluwarsanya lebih singkat dari VAR. Dalam pengadaan SAR, Diskes tidak langsung membeli dari Prancis tetapi setiap wilayah di Indonesia ada perwakilan distributornya.

Mengenai kasus gigitan rabies pada manusia, berdasarkan data hingga April 2019 terjadi 1.096 kasus gigitan, atau rata-rata sembilan gigitan per hari. Dari jumlah ini, hanya 616 yang mendapatkan VAR. Tidak semuanya korban gigitan anjing diberikan VAR, kata

Nariana, karena melihat riwayat gigitan. Biasanya untuk korban gigitan tidak diberikan VAR karena anjing yang menggigit sudah mendapatkan vaksin atau sesuai observasi, anjing yang menggigit masih hidup setelah menggigit. Sebab, jika rabies biasanya setelah menggigit anjing akan mati kurang lebih tujuh hari kemudian.

Meski ketersediaan SAR dan VAR penting, hal yang paling utama dalam menangani kasus rabies adalah pengendalian pada anjing. Maksudnya, masyarakat tidak meliarkan anjingnya serta rutin memvaksin anjingnya. "Selama ini kasus rabies terjadi pada anjing yang liar atau diliar dan tidak divaksin. Sehingga untuk menuju Bali bebas rabies, kontribusi masyarakat juga sangat penting," ujar Nariana. (kmb24)

Edisi : Rabu, 26 Juni 2019

Hal : 7



# Kasus Penyalahgunaan Dana UEP Ketua LPD Selat Ditahan

Bangli (Bali Post) -

Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Selat berinisial NN yang sejak setahun terakhir menjadi tersangka kasus penyalahgunaan dana usaha ekonomi produktif (UEP) bakal segera disidang. Hal ini menyusul telah dilimpahkannya tersangka beserta barang bukti oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU), Selasa (25/6) kemarin.

Berdasarkan pantauan di Kantor Kejari Bangli, dalam pelimpahan tahap II kemarin, tersangka yang merupakan istri dari Perbekel Selat langsung ditahan pihak Kejari Bangli setelah menjalani pemeriksaan beberapa jam. Tersangka yang menggunakan rompi oranye diboyong ke Rutan Bangli menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Tampak hadir suami tersangka menunggu proses pelimpahan di kantor Kejari sejak pagi hari.

Kasi Pidus Kejari Bangli Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, sebelum ditahan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan tersangka. Sesuai hasil pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan tersangka dinyatakan sehat. Namun perlu pengawasan khusus, lantaran tersangka memiliki riwayat penyakit tertentu. Karena riwayat penyakitnya itu tersangka, kata Ngurah Bagus, sempat men-

gajukan penangguhan penahanan kepada Kejari. "Tadi yang bersangkutan menyerahkan rekam medisnya. Ada sakit di dadanya. Tapi saya kurang paham sakitnya apa, dan sudah saya tunjukkan ke dokter yang memeriksa. Dokter sudah berikan saran perlu penanganan khusus," terangnya.

Lanjut dikatakannya, kini dengan telah dilimpahkannya tersangka dan barang bukti ke JPU, maka dalam waktu dekat tersangka bakal segera disidangkan di Pengadilan Tipikor. Kemungkinan tersangka akan mulai menjalani sidang pada minggu depan.

Sementara itu, disinggung mengenai tersangka lainnya berinisial MR, Bendesa Adat Selat yang dalam LPD Selat bertindak selaku Ketua Pengawas LPD, Ngurah Bagus mengatakan pelimpahannya akan dilakukan menyusul secepatnya. "Kami limpahkan satu dulu, untuk mencari fakta yang sebenarnya di persidangan,"

ujarnya. Jaksa asal Buleleng ini menegaskan bahwa MR hingga saat ini masih berstatus sebagai tersangka. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan dana UEP di LPD Selat ini pihaknya selama ini bekerja secara hati-hati. Tidak pernah ada kesengajaan pihaknya mengulur-ulur waktu.

Dijelaskannya, kasus penyalahgunaan dana UEP LPD Selat ini terjadi pada tahun 2013 lalu. Namun Kejari Bangli baru mulai melakukan penyelidikan tahun 2017 dan selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan tahun 2018. Selama proses penyidikan Kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari dua puluh orang saksi sebelum kemudian menetapkan Ketua LPD dan Bendesa Selat sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan tersangka karena diduga telah menyalahgunakan dana UEP dari pusat yang nilainya mencapai Rp 300 juta dipotong

administrasi Rp 600 ribu. Dana UEP yang sesuai proposal seharusnya diterima 20 orang, justru disalahgunakan untuk membayar penarikan uang nasabah baik tabungan maupun deposito. "Jadi di sanalah terjadi penyalahgunaan keuangan negara, yang seharusnya diterima 20 orang itu, tapi malah diberikan ke nasabah-nasabah LPD Selat," terangnya.

Ngurah Bagus mengatakan, dengan adanya kecuran dana UEP, LPD Selat menjadi diuntungkan. Sebab, saat itu kondisi keuangan LPD Selat sedang karut-marut, pascaditinggal Ketua LPD sebelumnya yang menjadi terpidana. "Dana di LPD Selat peninggalan Ketua LPD sebelumnya tidak ada kas sama sekali. Untuk menyiasati agar masyarakat pemilik dana baik nasabah tabungan atau deposito tidak ribut, tersangka ini mengajukan permohonan dana UEP. Setelah itu, uangnya digunakan untuk diberikan ke nasabah," katanya. Berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai di atas Rp 150 juta. (kmb-40)

Edisi : Rabu, 26 Juni 2019

Hal : 14



## Target Pendapatan Tak Terpenuhi/ Imbas Badung Tak Capai Target PHR

Bangli (Bali Post) -

Tidak terpenuhinya target pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung berimbas pada tak tercapainya target pendapatan Pemkab Bangli tahun 2018. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 yang digelar DPRD Bangli, Selasa (25/6) kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Bupati Bangli I Made Gianyar melalui Kepala Badan Keuangar, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Gede Suryawan menjelaskan, penyebab tidak terpenuhinya target pendapatan tahun 2018. Dikatakan Suryawan, untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah mampu melampaui target dengan realisasi sebesar 101,51 persen. Dari target sebesar Rp 120.860.000.000 terealisasi sebesar Rp 122.686.254.194,50.

Sementara pada sisi pendapatan transfer pusat, kata Suryawan, hanya terpenuhi 94,41 persen. Itu disebabkan dana transfer DAK hanya terealisasi sebesar 89,76 persen dari anggaran Rp 123.630.664.000 direalisasikan Rp 110.965.262.834. DAK tahun 2018 disalurkan berdasarkan nilai kontrak yang ada. "Sedangkan untuk bagi hasil pajak/bukan pajak realisasinya berdasarkan besaran pendapatan yang diterima negara pada



**PEMANDANGAN UMUM - Gede Suryawan saat membacakan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bangli terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 yang digelar DPRD Bangli, Selasa (25/6) kemarin.**

tahun 2018," terangnya.

Lanjut dikatakannya, pendapatan yang bersumber dari transfer bantuan keuangan bersifat khusus (BKK) pemerintah Kabupaten Badung, realisasinya di bawah target. Ia menyebut dari Rp 80.000.000.000 yang ditargetkan, yang terealisasi hanya Rp 47.500.000.000. "Ini disebabkan pendapatan PHR Kabupaten Badung tidak memenuhi target," katanya.

Selain menjawab soal target pendapatan yang tak terpenuhi di tahun 2018, Suryawan dalam rapat kemarin juga menyampaikan jawaban atas sorotan dewan tentang pajak. Dikatakannya, mengenai permasalahan pajak, Pemkab Bangli melalui BKPAD akan melakukan sejumlah langkah persuasif. Terhadap wajib pa-

jak yang kurang menyetorkan pajak dari ketentuan yang berlaku, telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPD-KB). Untuk melakukan pemeriksaan pajak, akan dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pendataan terhadap pemilik usaha yang belum terdata juga akan dilakukan sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Ke depan Pemkab akan menganggarkan pembelian meteran untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak air tanah.

Dalam rapat kemarin, disampaikan juga terkait langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Bangli untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang telah dituangkan dalam LHP BPK RI. (kmb40)

Edisi : Rabu, 26 Juni 2019

Hal : 14



# Jokowi Tinjau Pasar Seni Sukawati ✓

## Gianyar (Bali Post) -

Presiden RI Jokowi Widodo meninjau revitalisasi Pasar Seni Sukawati, Jumat (14/6) kemarin. Presiden ke-7 RI itu beserta rombongan tiba di lokasi pukul 08.30 Wita. Di tengah hujan gerimis, Presiden yang mengenakan kemeja putih disambut Bupati Gianyar I Made Mahayastri.

Selanjutnya didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Presiden asal Solo itu melakukan pengecekan ke areal Pasar Seni Sukawati yang saat ini sudah rata dengan tanah. "Ini yang penting, pedagang Pasar Seni Sukawati sudah direlokasi dan saya kira bulan-bulan inilah tander sudah rampung, tinggal dikerjakan," ucap Presiden Jokowi.

Dikatakannya, pembangunan Pasar Seni Sukawati menggunakan dana dari APBN sebesar Rp 89 miliar ditambah dari APBD Rp 3,9 miliar. Jokowi pun berharap dengan anggaran tersebut ke depan Pasar Seni Sukawati dapat lebih bersih dan tertata. "Kita harapkan ini menjadi pasar yang bersih tertata, sehingga pengunjung bisa nyaman ke Pasar Seni

Sukawati, apalagi ini pasar rakyat yang sudah berumur puluhan tahun," katanya.

Presiden Jokowi mengatakan ke depan Pasar Seni Sukawati, pasar yang tertata dan modern. Apalagi pasar ini sudah rampung, akan ada *basement*, sehingga memudahkan pengunjung untuk parkir.

Bila pasar ini sudah rampung, Presiden Jokowi mengajak seluruh wisatawan yang berlibur ke Bali untuk membeli produk kesenian di Pasar Seni Sukawati. "Kalau ke Bali belum ke Pasar Sukawati itu belum ke Bali, nanti semua harus belanja ke sini," katanya.

Ditambahkan, selama lima tahun memimpin, ia sudah membangun 5.000 lebih pasar besar dan 8.900 lebih pasar desa. Lima tahun ke depan, Presiden Jokowi memastikan akan tetap fokus membangun pasar pada sejumlah daerah yang belum tersentuh di Indonesia. "Ke depan sama, karena saya kira pasar sebagai sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli, produk-produk petani, nelayan, perajin. Pasar seluruh Indonesia memang harus hidup," tandasnya. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 16



## Kejari Eksekusi Dua Terpidana Korupsi Dana Kematian✓

Negara (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana mengeksekusi dua terpidana kasus korupsi santunan kematian, Jumat (14/6) kemarin. Dua terpidana I Gede Astawa dan I Dewa Ketut Artawan yang ditahan di Rutan Kelas IIB Negara sejak pelimpahan tahap dua itu, kemarin didatangi tim Kejari Jembrana untuk eksekusi badan sekaligus kesanggupan pengembalian uang pengganti serta denda.

Kasipidus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra ditemui di Kejari Jembrana kemarin mengatakan, eksekusi dua terpidana kasus korupsi Santunan Dana Kematian itu setelah Kejari menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi Denpasar. Jaksa melakukan eksekusi lantaran dua terpidana ini tidak melakukan upaya hukum lain. Begitu juga jaksa juga menyatakan menerima putusan. Sehingga putusan yang memvonis keduanya empat tahun pidana penjara itu sudah berkekuatan hukum tetap.

Dibeberkan Ivan, kedua terpidana yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun/Klian Banjar di Desa Tukadaya dinyatakan melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka

masing-masing dianjar hukuman penjara empat tahun pidana penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta.

Yang berbeda menurutnya adalah vonis terkait uang pengganti. Untuk terdakwa I Gede Astawa, dipidana membayar uang pengganti sebesar Rp 32.700.000. Bila tidak dibayar akan diganti dengan penjara tiga bulan," tandas Ivan.

Sementara untuk terdakwa I Dewa Ketut Artawan, mantan Klian Banjar Sari-kuning Tulungagung Tukadaya, dipidana membayar uang pengganti Rp 70.400.000. Bila tidak membayar uang pengganti, terpidana harus menjalani pidana penjara selama enam bulan.

Saat eksekusi kemarin, juga disampaikan kepada dua terpidana bahwa untuk denda dan uang pengganti diberikan waktu sampai satu bulan setelah putusan inkrah. Namun dari pemberitahuan saat eksekusi kemarin, kedua terpidana kepada jaksa mengaku belum memastikan apakah akan membayar atau memilih hukuman penjara sesuai putusan. "Kami masih menunggu kepastian pembayaran kedua terpidana ini. Kalau memang uang pengganti dibayar akan diserahkan ke kas negara," terangnya.

Dengan putusan inkrah

dua terpidana ini, maka kasus korupsi santunan kematian ini telah menjerat tiga orang. Sebelumnya, satu terpidana lainnya yakni oknum PNS di Dinas Sosial Indah Suryaningsih juga telah divonis empat tahun pidana penjara. Selain pidana penjara, terpidana juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 171 juta. Ketiganya terpidana ini saling berkaitan untuk mencairkan santunan kematian dengan objek fiktif.

Modusnya dengan membuat pengajuan seolah-olah ada warga yang meninggal dunia. Setelah nanti dana santunan tersebut cair, maka hasilnya akan dibagi sesuai peran masing-masing. Untuk pembagiannya, apabila Indah yang membuat dokumen fiktif, maka mendapatkan bagian Rp 1 juta dan kadus menerima masing-masing Rp 500 ribu. Namun bila dua kadus tersebut yang membuat dokumen fiktif, maka pembagiannya

Indah Rp 800 ribu dan kadus Rp 700 ribu.

Program santunan kematian yang merupakan program Pemkab Jembrana menganggarkan Rp 1,5 juta untuk setiap warga meninggal. Dengan adanya kerja sama ini, maka dana santunan ini bisa lolos hingga ratusan berkas. Belakangan selain tiga terpidana ini, masih ada beberapa tersangka lain yang dialami oleh penyidik Unit Tipikor Palres Jembrana. (kmb26)



# Waduk Muara Nusa Dua akan Jadi Kawasan Wisata

**WADUK** Muara Nusa Dua merupakan waduk muara yang pertama kali dibangun di Indonesia yakni pada 1996 silam. Tujuan awalnya menyediakan air baku. Tetapi kini fungsinya berkembang dengan adanya proyek rehabilitasi, peningkatan, dan penataan kawasan wisata di waduk tersebut. Ke depan, di Waduk Muara Nusa Dua akan ditata sebagai kawasan wisata.

Presiden RI Joko Widodo saat kunjungan kerjanya di Waduk Muara Nusa Dua di Jalan By-pass Ngurah Rai, Jumat (14/6) kemarin mengungkapkan, waduk muara tersebut luasnya 35 hektar. Waduk ini menjadi sumber air baku untuk Denpasar, Bencu, Nusa Dua dan bandara.

Jokowi menyatakan, proyek rehabilitasi, peningkatan, dan penataan kawasan wisata Waduk Muara kini sudah berjalan 80 persen. Proyek ini ditargetkan rampung Desember mendatang. Sejauh ini dari sisi pengerjaan dimulainya sudah rapi.

"Nanti di kanan-kiri akan ada kayak resto, kafe, gitu. Ya dong, kalau bisa fungsinya tidak hanya air baku. Bisa untuk wisata, bisa untuk resto ya bagus," imbuhnya didampingi Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam kunjungan kerja tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga turut hadir.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sejak dibangun 1996 hingga tahun lalu, Waduk Muara Nusa Dua belum pernah direhabilitasi. Waduk ini memiliki kapasitas 700 ribu meter kubik, namun terus berkurang

sehingga hanya mampu mensuplai 300 liter per detik. "Dengan sekarang dikeruk, diperbaiki, ini akan meningkatkan menjadi 500 liter per detik untuk Denpasar, Bencu, Nusa Dua dan sekitar bandara," ujarnya.

Menurut Basuki, anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi mencapai Rp 205 miliar. Pascarehabilitasi baru dilakukan penataan untuk bisa menjadi kawasan wisata. Ide ini muncul saat dirinya datang ke waduk muara tersebut dua tahun lalu, ada banyak masyarakat yang memancing di situ. Namun kondisi waduk penuh dengan eceng gondok dan kumuh oleh sampah. Saat ini air waduk sudah dikelola PDAM. Jika nanti sudah menjadi kawasan wisata, bisa dikelola oleh Pemprov Bali.

Basuki yang juga Ketua Umum PB PODSI itu bahkan berencana menggelar lomba dayung di Waduk Muara Nusa Dua. Kendati demikian dia menegaskan, fungsi utama waduk tetap untuk mensuplai kebutuhan air baku. "Kebutuhan air baku di Bali terus meningkat. Saat ini sudah ada empat bendungan, dan akan dibangun dua bendungan lagi untuk air baku," jelasnya. (kmb32)



# OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Legian Denpasar

Kepala OJK Regional VIII Bali Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda mengatakan, pencabutan izin usaha PT BPR Legian dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR dalam jangka waktu pengawasan khusus. Jangka waktu pengawasan khusus tersebut sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal dua bulan dari 28 Maret sampai 28 Mei 2019.

Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus

menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009.

Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada nasabah PT BPR Legian agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku. "Seperti nasabah di perbankan baik bank umum maupun BPR, nasabah di BPR Legian dijamin LPS. Oleh karena itu, nasabah nasabah bank-bank yang bermasalah dananya akan dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi ketentuan penjaminan LPS," heber Elyanus Pongsoda.

aus (BDPK) disebabkan permasalahan pengelolaan manajemen yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Selain itu adanya intervensi negatif Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam kegiatan operasional bank yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu itu.

Ia mengatakan, dalam rangka likuidasi PT BPR Legian, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. LPS sebagai RUPS PT BPR Legian akan mengambil tindakan-tindakan yaitu, membubarkan badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, menetapkan status bank sebagai Bank Dalam Likuidasi dan menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

Yusron meminta nasabah

paling sedikit sebesar delapan persen.

Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status BDPK, yang harus memiliki rasio KPMM paling sedikit sebesar delapan persen.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan

Ketentuan penjaminan LPS menetapkan dana nasabah yang dijamin yaitu suku bunga sesuai dengan suku bunga penjaminan yang ditetapkan LPS secara triwulanan, nominal tidak lebih dari Rp 2 miliar, dan bukan syarat ketiga adalah bukan penyebab BPR bermasalah. "Jadi nasabah tidak perlu khawatir bila dananya di perbankan karena dijamin LPS sepanjang memenuhi kriteria LPS," imbuhnya.

penyimpan untuk menunggu pengumuman pembayaran klaim dana nasabah yang akan dilakukan di kantor PT BPR Legian, media cetak/koran dan website LPS. "Bagi nasabah peminjam dana, tetap bisa melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di Kantor Pusat PT BPR Legian dengan menghubungi petugas bank atau Tim Likuidasi," imbuhnya seraya mengimbau agar nasabah PT BPR Legian tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi PT BPR Legian. (kmb42)

Edisi : Sabtu, 22 Juni 2019

Hal : 2



# Sejumlah Proyek Besar Belum Direalisasikan

Tabanan (Bali Post) -

Hingga akhir triwulan II tahun 2019, sejumlah proyek fisik di Kabupaten Tabanan belum juga dilaksanakan. Padahal, beberapa di antaranya merupakan proyek skala besar yang harus segera diselesaikan, seperti GOR Debes yang akan digunakan sebagai arena Porprov Bali pada September mendatang.

Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPRPKP Tabanan Kadek Faridatini Suweca, seizin Kepala Dinas PUPRPKP, Jumat (28/6) kemarin, mengakui sejumlah proyek belum bisa direalisasikan. Menurutnya, ada sejumlah kendala yang dihadapi khususnya dari sisi tender. Hal itupun dianggap wajar, karena proyek fisik memang harus diawali dengan masa membuat perencanaan dan lainnya. Selsin itu, ada kendala beberapa regulasi yang harus segera diberlakukan. "Tetapi sekarang rata-rata sudah masuk proses tender. Astungkara awal triwulan III sudah mulai pelaksanaan fisiknya," terangnya.

Kata Faridatini, proyek di Bidang Bangunan Gedung setidaknya 80 persen sudah masuk di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk ditenderkan. Dari total 42 paket pekerjaan, yang sudah masuk proses tender sebanyak 32 paket. "Target saya akhir bulan Juni sudah 100 persen masuk ke proses tender," ucapnya.

Sejumlah proyek besar yang sudah mulai masuk

proses tender, selain GOR Debes ada pula perluasan gedung kejaksaan yang segera selesai tender, pembangunan gedung PMI dan Unit Transfusi Darah, begitu juga rehab gedung Polres Tabanan, finishing lanjutan RSUD Nyitdah, dan rehab gedung Dinas PUPRPKP. "Selain itu, juga lanjutan penataan tapal batas serta penataan kawasan TITP Sanda, Pupuan," jelasnya.

Di sisi lain, perihal proyek-proyek yang belum direalisasikan itu terus mendapat sorotan kalangan legislatif. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tabanan A.A. Dharma Putra, yang melihat banyak program fisik yang telah direncanakan belum dapat berjalan. Bahkan banyak pula program yang baru proses tender, bahkan ada yang sama sekali belum ditenderkan. Ia khawatir akan ada banyak proyek akan molor dan tidak selesai sampai akhir tahun anggaran.

Dharma Putra yang akrab dipanggil Gung Baron ini mengaku sudah berulang kali mengingatkan hal itu dalam rapat kerja dengan

eksekutif. Dia berharap agar semua program fisik yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak ada yang molor. "Saya heran sampai kini belum ada proyek yang jalan," katanya.

Pihaknya berharap OPD terkait dapat memprosesnya sesegera mungkin, khususnya di proses tender. Dengan demikian, program fisik dapat berjalan sesuai perencanaan. Kalau terkait aturan, hendaknya dapat segera dicarikan solusi, seperti koordinasi dengan pusat secepatnya dan dibuatkan aturan teknis di daerah sehingga tender tidak tertunda dan proyek jadi molor. "Setiap persoalan yang ada, segera dicarikan solusi," sarannya.

Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti PUPRPKP agar persoalan proyek fisik dapat segera dituntaskan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi juga sempat mempertanyakan molornya proyek fisik. Dia berharap instansi terkait segera merealisasikan pembangunan. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 29 Juni 2019

Hal : 7



## DPRD Gianyar Terima Penyampaian Dua Ranperda

BUPATI Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Gianyar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, Senin (10/6) kemarin. Sidang yang dibuka Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog ini dihadiri 27 anggota dewan dari 40 anggota dewan yang ada. Turut hadir Wakil Bupati Gianyar A.A. Gde Mayun, dan Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya.

Dalam pertanggungjawabannya, Bupati Mahayastra menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat tujuh jenis laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Secara garis besar, Mahayastra menyampaikan Pendapatan Daerah yang direncanakan Rp 2.052 triliun lebih sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 Rp 2.002 triliun lebih (97,59 persen).

Rincian realisasi penerimaan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan Rp 805 miliar lebih, terealisasi Rp 770 miliar lebih (95,58 persen). Pendapatan Transfer direncanakan Rp 1.192 triliun lebih, terealisasi Rp 1.176 miliar lebih (98,6 pers-

en). Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp 53 miliar lebih, terealisasi Rp 56 miliar lebih (105,19 persen). Pendapatan ini berasal dari Dana BOS APBN dan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari APBN Tahun 2018.

Lebih lanjut dikatakan, Belanja Daerah Tahun 2018 direncanakan Rp 1.900 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp 1.785 triliun lebih (93,99 persen). Di mana terdapat efisiensi belanja sebesar Rp 114,15 miliar lebih (6,01 persen). Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional direncanakan Rp 1.577 triliun lebih, terealisasi Rp 1.488 triliun lebih (94,36 persen). Belanja Modal direncanakan Rp 321 miliar lebih, terealisasi Rp 297 miliar lebih (92,33 persen). Belanja Tak Terduga direncanakan Rp 500 miliar lebih, terealisasi 0 persen. Belanja transfer direncanakan Rp 260,877 miliar lebih, terealisasi Rp 260,865 miliar lebih (99,99 persen).

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Penerimaan Daerah direncanakan Rp 153 miliar lebih, terealisasi Rp 140 miliar lebih (91,60 persen). Realisasi tersebut bersumber dari Silpa tahun 2017 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sementara Pengeluaran Daerah direncanakan Rp 44,125 miliar, terealisasi Rp 44,149 miliar (100,06 persen). Penerimaan Pendapatan Daerah lebih rendah sebesar Rp 49 miliar lebih dari yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan dampak erupsi Gunung Agung sehingga terjadi

penurunan di beberapa sektor penerimaan pajak daerah dan penurunan penerimaan dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi," imbuh Mahayastra.

Dikatakan pula, realisasi Belanja Daerah juga lebih rendah Rp 114 miliar lebih dari yang dianggarkan. Ini terjadi karena adanya efisiensi pengeluaran belanja. Di antaranya dari Belanja Operasi, Modal, serta Transfer. Nilai surplus/defisit ditambahkan pembiayaan neto menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan APBD 2018 sebesar Rp 51 miliar lebih. "Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil ini patut disyukuri dan tentunya tidak terlepas atas dukungan semua pihak yang telah bekerja keras sesuai norma-norma hukum demi kemajuan Kabupaten Gianyar," kata Mahayastra.

Selain menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, Bupati Mahayastra juga menyampaikan Ranperda tentang Penanaman Modal pada Perumda Gianyar. Ranperda ini diusulkan untuk ditetapkan bersama, guna memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas serta pengembangan Perumda Gianyar. Di samping itu, sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari bagi hasil laba perusahaan daerah. (ad179)

Edisi : Selasa, 11 Juni 2019

Hal : 9



# PHR Dominasi LHP BPK terhadap APBD 2018

## 91 Hotel Belum Dipungut Pajak

Singaraja (Bali Post) -

Pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan APBD Buleleng tahun 2018. Sesuai LHP, pemerintah daerah perlu menggenjot sumber pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Setelah dikaji, pemerintah mengalami hambatan ketika memungut pajak terutama Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Hal ini didukung dengan ditemukannya 91 hotel dan restoran di Bali Utara belum dipungut PHR.

Hal itu terungkap dalam rapat internal pimpinan dan anggota DPRD Buleleng bersama tim pakar menyikapi LHP BPK APBD Buleleng tahun 2018 di ruang gabungan komisi, Senin (10/6) kemarin.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan dihadiri komisi lengkap dengan anggotanya. Sedangkan dari tim pakar dikoordinatori oleh Nyoman Sukarna.

Supriatna mengatakan, penerimaan PHR dan retribusi di daerahnya mendominasi catatan dalam LHP BPK.

Catatan itu salah satunya soal membengkaknya piutang pajak yang belum masuk, menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, juga soal pungutan PHR yang belum optimal.

Dari LHP BPK terungkap piutang pajak daerah meningkat dari Rp 71.068.387.425,73 menjadi Rp 75.992.872.700,77 naik Rp 4.924.485.335,04 atau 6,93 persen. Tertinggi piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp 71.369.360.639,64. Piutang pajak hotel Rp 2.196.286.663,14, piutang pajak restoran Rp 1.495.847.939,93 dan piutang pajak air tanah Rp 805.064.160.

BPK juga menemukan pendapatan sektor pajak belum optimal. Ini terjadi karena dari 641 wajib pajak (WP) yang ditetapkan berdasarkan Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ada 29 hotel sudah memiliki izin operasi, namun belum ditetapkan dalam NPWD. Sementara dari 424 wajib pajak restoran, 13 restoran sudah memiliki izin operasi namun tidak memiliki NPWD. Akibatnya, pemerintah daerah belum memungut PHR sesuai Perda No. 8 Tahun 2011.

"Penerimaan pajak ini masih menjadi catatan oleh BPK dalam LHP yang sudah kita bahas. Kita tidak menyalahkan pemerintah, karena ada usaha yang tidak memiliki IMB dan ada yang mendapat izin operasional tapi tidak memiliki NPWD. Sehingga hal ini dijadikan catatan penting harus dicari jalan keluar oleh pemerintah," tandas dia.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Buleleng, Putu Mangku Mertayasa. Politisi asal Desa Banjar, Kecamatan Banjar ini mengatakan, 91 hotel yang tidak bisa dipunguti pajak tersebut, menimbulkan kerugian pemerintah. Apalagi, pajak tersebut bukan dibayar pemilik hotel atau restoran, tetapi pajak titipan dari wisatawan yang menginap atau yang menggunakan fasilitas restoran yang ada. "Pertanyaan kita selama ini ke mana uang itu? Tidak salah kalau hal ini menjadi catatan LHP BPK karena ada hotel sudah beroperasi dan mendapat izin namun tidak memiliki NPWD. Masalah ini perlu dicari solusi bersama," katanya.

Untuk mendapatkan penjelasan dan solusi, rencananya masalah ini akan dibahas lebih detail saat pembahasas LHP BPK terhadap APBD 2018 bersama eksekutif dalam minggu ini. Nantinya, dewan mendorong pemerin-

tah dalam memperbaiki tata kelola pungutan PHR dan optimalisasi perizinan hotel dan restoran di Bali Utara.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMPPSP) Putu Artawan mengatakan, dalam penerbitan izin operasional hotel dan restoran, pihaknya hanya berwenang memproses apabila ada permohonan. Sebelum izin diterbitkan, pihaknya melakukan kajian dan kalau berkas dinyatakan lengkap, maka sesuai kewenangan yang ada izin akan diterbitkan. Terkait hotel atau restoran yang belum memiliki NPWD, Artawan mengaku hal itu ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). "Kami sifatnya pasif, jika ada permohonan masuk setelah dikaji oleh tim dan berkas lengkap, izin akan diterbitkan. Langkah berikutnya untuk menetapkan NPWD agar bisa dipungut pajak itu diatur BKD," tegasnya. (kmb38)





## RSUP Sanglah Berharap Biaya Skrining Ditanggung BPJS Kesehatan ✓

Denpasar (Bali Post) -

RSUP Sanglah memiliki alat diagnosis kanker payudara dengan teknologi terbaru yaitu *painless mammography*. Alat ini hanya ada tiga di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya dan Denpasar. Namun sayangnya alat ini belum banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui secara dini terjadinya kelainan karena BPJS Kesehatan belum menanggung biaya skrining. Demikian ungkap Kepala Instalasi Radiologi RSUP Sanglah dr. I Made Dwija Putra Ayusta, Sp.Rad., belum lama ini.

Alat *painless mammography* ini digunakan untuk mendeteksi adanya kelainan pada payudara dengan lebih akurat. "Mammography ini ada untuk skrining payudara yang masih sehat, ada juga untuk diagnostik untuk mengetahui *grading* sakitnya seberapa. Menentukan penyakitnya ringan atau ganas dan membantu tindakan biopsi agar pengambilan sampel jaringan lebih tepat pada sasaran," jelasnya.

Alat ini menggunakan dosis X-ray yang rendah, 20-30 persen lebih rendah dari *mammography* yang biasa. Tingkat ketelitian alat ini bisa mencapai 80-90 persen dengan 3 dimensi. Namun dikonfirmasi dengan alat USG, sehingga hasilnya benar-benar aku-



PAINLESS MAMMOGRAPHY - I Made Dwija Putra Ayusta, Kepala Instalasi Radiologi RSUP Sanglah, bersama staf menunjukkan alat *painless mammography*.

rat. "Kita bisa mengiris-iris kedalaman dan mengetahui kelainannya lebih dalam, bisa menangkap gambar berupa *slice*," imbuhnya.

Namun pasien diharapkan melakukan pemeriksaan pada saat tidak sedang haid. Karena pada saat pemeriksaan, akan terasa nyeri. Namun dengan alat baru ini diakui tingkat nyerinya lebih rendah dibandingkan dengan alat *mammography* yang lain. Alat seharga Rp 5 miliar ini telah dibeli sejak tahun 2017, namun mulai dioperasikan pada April 2018. Hingga kini pemanfaatan alat tersebut masih minim.

Pihaknya hanya menangani 10 pasien setiap bulan. Ini

dikatakan masih kecil karena skrining atau diagnosis seharusnya lebih banyak dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Biaya untuk skrining dengan alat ini mencapai Rp 700.000. Pihaknya berharap, layanan skrining dapat ditanggung BPJS Kesehatan mengingat pentingnya peranan skrining dalam proses penyembuhan penyakit.

Dengan lebih cepat didiagnosis terjadinya kelainan, maka akan semakin mudah proses penyembuhan dan tingkat kesembuhan akan semakin tinggi. Bahkan, dikatakan, skrining lebih banyak disadari oleh warga negara asing. Sedangkan masyarakat

Bali sendiri masih enggan memeriksakan dirinya lebih dini karena ketakutan dengan hasil yang didapat.

Temuan jenis kanker terbanyak di RSUP Sanglah adalah kanker payudara, menempati posisi pertama. Ia menganjurkan, pasien yang memiliki keluarga dengan risiko tinggi dan memiliki riwayat kanker agar lebih dini memeriksakan dini. Risiko tersebut bisa dari luar dan genetik. Risiko dari luar meliputi gaya hidup mengonsumsi *fast food*, kerap terpapar radiasi seperti radiasi alat di rumah sakit dan radiasi alat elektronik. Namun radiasi alat elektronik dikatakan sangat kecil. (kmb42)

Edisi : Selasa, 25 Juni 2019

Hal : 5



## WTP Tidak Menjamin Bebas dari Pidana Korupsi



I Wayan Sumardika

MERAH predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kebanggaan lembaga pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat seperti lembaga kementerian maupun di luar kementerian dalam mengelola keuangan. Lembaga yang meraih WTP mempunyai *image* kualitas pengelolaan keuangan negara di lembaga tersebut sudah sesuai standar akuntansi pemerintah. Akan tetapi, fakta di lapangan mereka yang meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tidak menjamin terbebas dari

tindak pidana korupsi.

Bahkan, dari catatan pemerhati korupsi seperti ICW, pimpinan atau kepala daerah yang meraih WTP justru banyak, bahkan belasan yang terciduk KPK. Bahkan ada lembaga di kementerian "menyogok" BPK demi meraih predikat WTP. Ujung-ujungnya, baik penyuaup maupun auditor dari BPK sendiri justru menjadi pesakitan karena ditangkap KPK. Peraih opini WTP itu tidak memberi jaminan lembaga terbebas dari korupsi juga dibenarkan praktisi hukum I Wayan Sumardika, S.H., CLA.

Saat ditemui Minggu (9/6) kemarin, ia mengatakan jika audit dilakukan secara benar, jujur dan kredibel, proses pertanggungjawaban anggaran negara juga dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tak salah jika semua lembaga pemerintah berlomba-lomba supaya mendapat pengakuan opini WTP dari BPK. Namun moralitas jauh lebih penting karena realitas di lapangan, peraih WTP tidak menjamin terbebas dari pidana korupsi.

Pria yang sering menangani pidana korupsi itu menambahkan, baik provinsi, kabupaten/kota peraih WTP tidak menjamin di tahun anggaran itu tidak akan terjadi pidana korupsi. Karena, menurutnya, audit BPK yang dilakukan di tahun anggaran tersebut dapat dinilai sebagai audit yang tidak tuntas. "Mengapa saya sebut tidak tuntas, karena BPK tidak dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum bahwa tidak terjadi dugaan pidana korupsi di tahun anggaran itu. Baik di provinsi, kabupaten/kota atau di wilayah yang dapat WTP," tandas Sumardika.

Dia melihat terhadap beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota yang meraih WTP, sering pula terjadi di kemudian hari terjadi pidana korupsi. Bahkan penyidik, baik jaksa, polisi maupun KPK, untuk melengkapi hasil tangkapan atau temuannya, juga mengajukan permohonan ke BPK untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Misalnya, di salah satu proyek pengadaan barang dan jasa di suatu daerah. Jika penegak hukum menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyidik pasti meminta audit keuangan negara ke BPK. "Tni fakta. Banyak daerah yang meraih predikat WTP, tetapi akhirnya terjadi pidana korupsi di dalamnya," tandasnya.

Sumardika menambahkan, yang disayangkan, ketika BPK melakukan audit pemeriksaan keuangan daerah, terkadang petugas audit BPK menggunakan pegangan hasil audit ikwilkab dan ikwilprov atau inspektorat masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. "Jika kita lihat sejarah, adanya inspektorat wilayah yang mengaudit keuangan pemprov dan kabupaten, itu lebih banyak untuk kebutuhan internal," ulas Sumardika.

Makanya, sarannya, para kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota, termasuk pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, semestinya sedapat mungkin memiliki pengetahuan supaya terhindar dari jeratan pidana korupsi. (asa)

Edisi : Semn. 10 Juni 2019

Hal : 12



## Tekan Biaya Listrik, LPJU Pakai Lampu LED ✓

Singaraja (Bali Post) -

Tanggung jawab pembayaran listrik untuk lampu pencahayaan jalan umum (LPJU) menyedot anggaran APBD Buleleng. Dalam satu bulan saja, rata-rata pemerintah membayar rekening listrik untuk 34.700 titik LPJU di ruas jalan kabupaten, provinsi, dan jalan nasional sebesar Rp 1,4 miliar. Untuk menekan anggaran biaya listrik tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Buleleng mulai gencar melengkapi LPJU dengan kWh dan mengganti lampu boros energi dengan LED (*light emitting diode*).

Tingginya beban listrik itu tidak saja karena banyaknya LPJU yang terpasang, juga karena sebagian besar titik LPJU tersebut tidak dilengkapi dengan kWh.

Kepala Dinas PUPR Buleleng Ketut Suparta Wijaya, Minggu (23/6) kemarin mengatakan, dari 34.700 titik LPJU, 14.300 titik sudah memakai lampu LED. Penggantian tersebut dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Program ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran APBD Buleleng. Sedangkan sisanya sebanyak 23.300 titik masih menggunakan lampu boros energi.

Untuk tahun 2019, lanjut Suparta, pihaknya akan melanjutkan mengganti dengan lampu LED. Dinas PUPR akan memasang sisa stok lampu LED sebanyak 20.000 yang sudah dibeli sebelumnya. "Penggantian dengan lampu LED ini merupakan langkah kami menghemat anggaran untuk melunasi tagihan rekening listrik tiap bulan. Tahun ini kami kembali pasang lampu LED karena masih ada stok 20.000 buah," ujarnya.

Suparta juga menjelaskan, pemasangan kWh di titik lampu LPJU yang selama ini belum terpasang. Upaya ini khusus menyasar LPJU yang belakangan banyak dipasang kelompok masyarakat secara swadaya. Selain itu, LPJU yang masuk kategori liar karena tidak mengajukan permohonan ke Dinas PUPR, juga akan dipasang kWh. "Upaya ini solusi efektif untuk kita lakukan agar bisa menghemat pembayaran rekening listrik LPJU. Selama ini dari beban pembayaran listrik LPJU Rp 1,4 miliar, sekitar Rp 1,1 miliar titik LPJU-nya belum ada kWh-nya. Kalau sudah ada kWh-nya maka pemakaian listrik akan lebih rasional dengan pemakaian dalam satu bulan," jelasnya. (kmb38)

Edisi : Senin, 24 Juni 2019

Hal : 8



## Seragam Dewan ✓ Dianggarkan Rp 700 Juta Lebih

Denpasar (Bali Post) -

Menjelang pelantikan anggota DPRD Kota Denpasar hasil Pemilu 2019, jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar mulai disibukkan dengan pengadaan seragam bagi anggota yang akan dilantik. Dikonfirmasi Kamis (13/6) kemarin, Sekretaris DPRD Kota Denpasar Putu Gede Dharma Wiyasa mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan untuk pelantikan anggota dewan baru. Bahkan kini pengadaan barang berupa pakaian dewan sudah dalam proses tender di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. "Namun hasilnya belum selesai. Kita tunggu proses lelangnya dulu," ujarnya.

Dilihat dari alokasi waktunya, kata Dharma Wiyasa, sebenarnya cukup pendek. Oleh karena itu, pihaknya memastikan pakaian yang akan diprioritaskan untuk selesai, yakni yang dipakai pelantikan. "Kalau selesai secara keseluruhan kemungkinan tidak bisa. Mungkin yang akan diselesaikan terlebih dahulu adalah pakaian yang digunakan untuk pelantikannya saja," katanya.

Dharma Wiyasa mengatakan, masing-masing dewan akan mendapatkan beberapa jenis pakaian. Di antaranya PSL, PSH, PSR, PDL, serta seragam kedaerahan. "Kalau untuk seragam kedaerahannya di sini akan dipilih baju endek," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar A.A. Gede Risnawan mengakui pengadaan seragam dewan ini sudah masuk proses tender. Pagu yang dicanangkan untuk program pengadaan seragam ini sebesar Rp 759 juta.

Seperti diketahui, setelah Pemilu 2019 pada Agustus 2019 mendatang para wakil rakyat hasil Pemilu 2014 akan memasuki masa purnabakti. Setelah itu akan masuk para wakil rakyat hasil Pemilu 2019, dan akan dilantik akhir Agustus mendatang. Oleh karena itu, sejumlah persiapan sudah dilakukan jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar. (kmb12)

Edisi : Jum'at, 14 Juni 2019

Hal : 2



## Penataan Tapal Batas di Selabih Dianggarkan Rp 305 Juta ✓

Tabanan (Bali Post) -

Penataan lanjutan areal tapal batas Kabupaten Tabanan di Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat akan dilaksanakan tahun ini. Proyek berupa pendirian bangunan sejenis lumbung di bagian barat tepatnya di sebelah timur Tukad Yeh Leh ini dianggarkan Rp 305 juta.

Kabid Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

(PUPRPKP) Tabanan Ni Made Faridatini Suweca, Kamis (13/6) kemarin mengatakan, perbaikan dan penataan tapal batas itu merupakan usulan warga desa adat. Perbaikan sudah dimulai pada tahun 2018.

Selain diperbaiki, di lokasi tersebut juga direncanakan akan dibuatkan *rest area*. "Untuk saat ini penataan lanjutan akan ada pekerjaan seperti pembuatan *toilet*, ada penyederhanan, dan melanjutkan paving untuk

parkirnya," terang Farida.

Dengan penataan areal tapal batas tersebut, diharapkan pengendara yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Tabanan terlebih dahulu istirahat di areal tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Jika tidak ada halangan selama proses lelang, kata Farida, pengerjaan sudah bisa dimulai minggu pertama Agustus. Ditargetkan proyek tersebut tuntas akhir Desember. (kmb28)

Edisi : Jum'at, 14 Juni 2019

Hal : 7



## Mantan Perbekel Daub Puri Kelod Diperiksa Kejari Denpasar ✓

Denpasar (Bali Post) -

Mantan Perbekel Desa Daub Puri Kelod, Denpasar Barat, I Gusti Made WN, Kamis (27/6) kemarin diperiksa tim Pidsus Kejari Denpasar. Pemeriksaan dilakukan terkait penyidikan dugaan pengelolaan keuangan desa atas Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2017. Selain Gusti Made WN, juga ada lima saksi lainnya dimintai keterangan. Mereka terdiri dari staf dan mantan staf kantor desa di sana.

Kasi Intel Kejari Denpasar Agung Ary Kesuma membenarkan pihaknya memeriksa mantan perbekel dan aparat desa lainnya terkait dugaan penggunaan dana silpa. "Sebenarnya ada tujuh orang yang dipanggil. Namun hari ini (Kamis-red) yang datang enam orang,"

tandas Gung Ary Kesuma.

Pantauan *Bali Post* kemarin, enam orang saksi itu diperiksa jaksa yang berbeda. Bahkan Kasipidsus Nengah Astawa juga ikut memeriksa saksi yang hadir.

Kasipidsus Astawa yang dikonfirmasi atas perkembangan penyitaan barang bukti dan perkembangan hasil penyidikan mengatakan soal barang bukti masih dipilah. "Sejatinya semua soal SPJ itu berkaitan dengan apa yang kami sidik. Namun jika nanti ada dokumen hasil sitaan tidak berkaitan, kami akan kembalikan," jelas Astawa.

Disinggung soal penetapan tersangka, Astawa mengatakan hingga saat ini belum ada tersangka. Meski demikian, dia mengakui status perkaranya sudah dinaikkan menjadi pe-

nyidikan. "Nanti sebelum menetapkan status tersangka, kami akan lakukan ekspos terlebih dahulu," tandas Astawa.

Sebelumnya, belasan petugas dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar melakukan pengeledahan Kantor Perbekel Desa Daub Puri Kelod di Jalan Serma Repot No. 15, Denpasar Barat. Hasilnya, ratusan berkas/dokumen disita dari kantor di dekat Pasar Sanglah tersebut. Pengeledahan dipimpin langsung Kasipidsus Kejari Denpasar Nengah Astawa yang dilakukan mulai pukul 08.45 Wita. Lima boks dokumen tampak diangkat dengan menggunakan keranjang plastik. Dokumen itu disita dari tiga ruangan yang ada di kantor perbekel tersebut.

Pj. Perbekel Desa Daub Puri Kelod Luh Sukarmi mengapresiasi langkah penyidik kejaksaan. "Masalah pengeledahan ini saya terima dengan terbuka. Biar masalah ini cepat selesai," ucap Sukarmi saat itu.

Dia mengatakan, dengan peristiwa ini diharapkan administrasi pengelolaan keuangan Desa Daub Puri Kelod, Denpasar Barat lebih bagus ke depannya. Yang merisdi persoalan hingga dibidik kejaksaan di kantor desa itu dibenarkan diduga terkait dana Silpa tahun 2017. Lantas dokumen apa saja yang disita? Sukarmi yang lama bertugas di kecamatan ini mengatakan yang disita adalah SPJ dan SPPP (Surat Perintah Permohonan Pembayaran) dari tahun 2013 sampai 2016. (kmb37)

Edisi : Jum'at, 28 Juni 2019

Hal : 5



# Renovasi Gedung Puskesmas Selat Dianggarkan Rp 5,4 M ✓

**Amlapura (Bali Post) -**

Pemkab Karangasem melalui Dinas Kesehatan segera melakukan perbaikan gedung Puskesmas Selat. Anggaran perbaikan mencapai Rp 5,4 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Karangasem I Gusti Putra Pertama, Kamis (27/6) kemarin mengungkapkan, perbaikan Puskesmas Selat dilakukan karena kondisinya memang mengalami sejumlah kerusakan sehingga sudah layak untuk direnovasi. Renovasi utamanya dilakukan pada gedung di sebelah barat. Sedangkan di sebelah timur, akan dilakukan pembangunan gedung baru. Anggaran yang dipakai untuk renovasi dan pembangunan gedung baru bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bantuan pemerintah pusat.

"Sampai saat ini masih dalam proses pelelangan. Kami harapkan, sebelum 30 Juni ini, sudah ada pemenang sekaligus tanda tangan kontrak sehingga proses pembangunan bisa segera dilakukan," ujarnya.

Pertama menargetkan proses pembangunan sudah rampung November atau Desember sehingga awal tahun 2020, gedung sudah bisa dioperasikan. Saat ini, gedung puskesmas lama masih digunakan untuk manajemen dan administrasi. Namun, berkaitan dengan proses pelayanan, pihaknya untuk sementara meminjam gedung UPTD di Balai Benih Ikan (BBI) Selat.

"Sebelum pindah, kita sudah lebih dulu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk peminjaman gedung itu. Dari dinas telah memberikan pinjaman dua gedung di UPTD BBI," jelasnya. (kmb41)

Edisi : Jumat, 28 Juni 2019

Hal : 11



## Hingga Mei, Realisasi Santunan Penunggu Pasien Rp 1,9 Miliar

**Mangupura (Bali Post) -** Ribuan warga mengajukan klaim santunan penunggu pasien. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Badung, tahun ini khususnya hingga Mei, santunan penunggu pasien yang telah direalisasikan sebesar Rp 1,9 miliar lebih, dari 1.332 permohonan. Kepala Dinas Sosial Badung Ketut Sudarsana, Rabu (12/6) kemarin mengatakan, dibandingkan tahun lalu, tren permohonan santunan penunggu pasien relatif buk-

taatif. Dari data, tahun 2018 Dinas Sosial telah mencairkan Rp 5,9 miliar lebih dari 3.816 permohonan. Sementara tahun ini, hingga Mei, pihaknya telah mencairkan Rp 1,9 miliar lebih. "Hal ini kan sifatnya insidental dan tergantung sekali dari masyarakat kita yang sakit serta memenuhi syarat untuk mendapatkan santunan itu," ujarnya. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung ini mengatakan,

selama ini belum ada kendala terkait pencairan. Bahkan dia menyebut, semuanya sudah dicairkan. "Tidak ada yang belum cair. Begitu SPJ-nya lengkap, langsung kami bisa cairkan di BPKAD. Sepanjang memenuhi syarat, pasti cair karena program ini menjadi skala prioritas," jelasnya. Seperti diketahui, persyaratan pengajuan santunan tersebut, yakni berkas permohonan diajukan kepada Bupati Badung dengan melampirkan e-KTP, Kartu

Keluarga (KK) Badung, Kartu Badung Sehat (KBS), dan Surat Keterangan Rawat Inap. Jika penunggu tidak masuk dalam KK pasien, maka dilampirkan surat kuasa yang ditandatangani pasien. Sedangkan jika penunggu masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, bisa digantikan dengan surat keterangan domisili dari perbekel. Jangka waktu pengajuannya adalah maksimal 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Program

tersebut berlaku sejak Agustus 2017 lalu dan tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 45 Tahun 2017. Besarnya paling banyak Rp 5 juta dan hanya diberikan sekali selama setahun. Rincian berupa uang makan Rp 50 ribu per hari, uang transportasi Rp 50 ribu per hari, dan uang saku Rp 100 ribu per hari. Saran tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2011 tentang Pedoman Pemberian Bansos. (kmb)

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019  
Hal : 3



# Pengadaan Mobil Dinas Bupati Dianggarkan Rp 1,9 Miliar

Tabanan (Bali Post) -

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Tabanan akan melakukan pengadaan mobil dinas Bupati. Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai Rp 1,9 miliar, untuk satu unit mobil jenis Toyota Alphard.

Pada situs resmi LPSE Tabanan, tercantum daftar paket kendaraan dinas bermotor perorangan. Di sana tertera paket belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan kendaraan dinas bermotor dengan sumber dana APBD. Pagunya mencapai Rp 1.943.350.000 dan nilai har-

ga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 1.853.600.000. Proses lelang yang batas pendaftarannya sampai 17 Juni tersebut masih tahap pascakualifikasi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti ketika dikonfirmasi membenarkan,

tahun ini, Pemkab melakukan pengadaan kendaraan operasional kedinasan. Kendaraan itu diperuntukkan kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati. "Ya benar, kendaraan dinas untuk Bupati sudah ada," ujarnya, Rabu (12/6) kemarin. Dikatakannya, pengadaan

kendaraan dinas ini sebenarnya untuk menunjang operasional mengingat Bupati Tabanan tidak memiliki kendaraan dinas. "Kalau sebelumnya, beliau menggunakan kendaraan pribadi," ungkapnya.

Budiarti menjelaskan, nilai Rp 1,9 miliar itu baru anggaran pagu dan belum ada pemenang tender. "Itu baru pagu, kita belum bisa menentukan angka pasti karena belum ada pemenang," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019

Hal : 7



# Rp 25,2 Juta - Rp 18,9 Juta/Orang

Dari dua sumber dana yang didapat oleh seluruh anggota dewan, hanya satu yang murni dari Pemerintah melalui APBD.

SINGARAJA, NusaBali  
45 anggota DPRD Buleleng periode 2014-2019, akan mengakhiri masa baktinya Agustus 2019. Menyusul berakhirnya masa tugas ini, Pem-

kab Buleleng akan memberikan dana 'tali kasih' sebagai ucapan terimakasih atas jasa pengabdian mereka selama lima tahun.

Data dihimpun, sumber dana yang bakal dikantongi oleh masing-masing anggota dewan saat mengakhiri masa tugasnya, yakni APBD Kabupaten dan Yayasan Purnabakti (Yanarti). Rinciannya, untuk jabatan Ketua Dewan mendapat dana Rp 25.200.000, Wakil Ketua Dewan Rp 20.160.000, dan anggota sebesar Rp 18.900.000. Khusus anggota, karena ada anggota sebagai pengganti antar waktu (PAW), maka jumlah dana 'tali kasih' disesuaikan dengan masa

tugasnya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng Dewa Ketut Manuaba, Kamis (13/6) mengatakan, dari dua sumber dana yang didapat oleh seluruh anggota dewan, hanya satu yang murni dari Pemerintah melalui APBD. Sedangkan sumber dana dari Yanarti, merupakan dana-dana yang selama ini disimpan oleh masing-masing anggota melalui pemotongan uang representasi tiap bulannya. "Memang ada dua sumber. Kalau APBD itu murni dari pemerintah sebagai uang jasa pengabdian bagi seluruh anggota dewan. Kalau dari Yanarti itu, bisa dibilang tabungan anggota de-

wan. Karena tiap bulan uang representasi anggota dipotong oleh pihak Yanarti," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, pemberian uang jasa pengabdian oleh pemerintah sudah diatur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD. Disebutkan pada pasal 19 ayat 2, uang jasa pengabdian diberikan 6 kali uang representasi seluruh anggota. Untuk jabatan Ketua Dewan, uang representasi sebesar Rp 2.100.000 perbulan, Wakil Ketua Rp 1.680.000 perbulan, dan anggota sebesar Rp 1.575.000 perbulan. Sehingga jika 6 kali

dari uang representasi yang didapat, maka Ketua Dewan

akan mendapat uang jasa pengabdian nanti sebesar Rp 12.000.000, sedangkan Wakil Ketua Rp 10.080.000 dan anggota sebesar Rp 9.450.000. "Kalau anggota, karena ada yang PAW besarnya mungkin lebih sedikit," jelas Manuaba.

Jelas Sekwan Manuaba, khusus dana Yanarti, besaran yang didapat oleh Ketua, Wakil Ketua dan anggota, hampir sama dengan jumlah uang jasa pengabdian. Karena, dana Yanarti dibagikan melalui pemotongan uang representasi seluruh anggota sebesar 10 persen selama 5 tahun. Dicontohkan uang representasi Ketua Dewan sebesar Rp 2.100.000, maka simpanan

ke Yanarti setiap bulannya sebesar Rp 210.000. Sehingga selama 5 tahun atau 60 bulan, maka jumlahnya menjadi Rp 12.600.000. "Kalau tidak salah, jumlah dana Yanarti yang diterima nanti sama dengan uang jasa pengabdian," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini.

Menurut Sekwan Manuaba, uang jasa pengabdian dan dana Yanarti itu akan dicarikan setelah ada SK Pemberhentian terhadap seluruh anggota DPRD Buleleng. SK Pemberhentian ini akan dikeluarkan oleh Gubernur Bali, bersamaan dengan SK Pelantikan anggota periode 2019-2024. **k19**



# Terkesan Mangkrak, Lapangan Futsal Akan Dirampungkan Tahun Ini ✓

NEGARA, NusaBali

Proyek lapangan futsal di sebelah Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati Jembrana di Jalan Mayor Sugianyar 1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, yang digarap sejak akhir 2017 lalu, belum rampung hingga pertengahan 2019. Rencananya, lapangan futsal milik Pemkab Jembrana yang tinggal finishing itu akan dirampungkan sebelum akhir tahun ini.

Berdasar pemantauan pada Kamis (13/6), bangunan utama lapangan futsal yang digarap secara bertahap sejak dua tahun lalu itu sudah jadi. Di dalamnya sudah dilengkapi karpet maupun gawang termasuk dipasang listrik. Tetapi, lapangan futsal yang sudah lengkap dan gedungnya tinggal dicat, itu tampak belum ada tanda-tanda dilanjutkan finishingnya. Padahal dari informasi sebelumnya, lapangan futsal yang merupakan proyek dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Jembrana itu sditarget rampung tahun 2018.

Kadis Dikpora Jembrana Ni Nengah Wartini saat dikonfirmasi Kamis kemarin, mengakui untuk fisik lapangan futsal itu memang sudah dirampungkan sejak tahun lalu, namun belum sampai finishing. Untuk finishing terhadap lanjutan proyek itu sudah dianggarkan di APBD Jembrana 2019 ini, dan tinggal dikerjakan. "Kegiatan



GEDUNG untuk lapangan futsal di sebelah Rumjab Bupati Jembrana di Jalan Mayor Sugianyar 1, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana. Finishing gedung tersebut ditarget tuntas tahun ini.

finishingnya nanti melalui PL (penunjukan langsung). Hanya tinggal dicat dan melengkapi bola. Sudah akan dirampungkan tahun ini, dan nanti tinggal diresmikan. Mudah-mudahan peresmian juga bisa tahun ini," ujarnya.

Menurut Wartini, lapangan futsal milik Pemkab Jembrana itu akan dikelola Bidang Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) pada Dinas Dikpora Jembrana. Sesuai rancangan awal, pemanfaatan lapangan futsal itu akan diberikan secara gratis untuk masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan, juga

akan disewakan untuk kegiatan yang bersifat komersial. "Peruntukannya lebih

untuk masyarakat. Kalau ada komersial ya kita sewakan," ucapnya. **ode**

Edisi : Jum'at, 14 Juni 2019

Hal : 7



Evaluasi BI Terkait Moment Lebaran

# Transaksi Keluar Rp 4,1 T, Inflasi Terkendali ✓

DENPASAR, NusaBali

Net outflow atau transaksi tunai uang keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan pada Mei terkait momen Idul Fitri 2019, sebesar Rp 4,1 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari Lebaran 2018, sebesar Rp 1,94 triliun, juga Lebaran 2017 sebesar Rp 2,7 triliun. Hal itu, sesuai dengan pola musiman (momen hari raya keagamaan), dimana net outflow atau aliran uang yang keluar lebih tinggi dari aliran yang masuk (inflow).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpwb) Bali Causa Iman Carana menyampaikan hal tersebut, Kamis (13/6). Dijelaskan Causa Iman Carana, outflow sebesar Rp 4,1 triliun tersebut, artinya total uang tunai yang dikeluarkan BI melalui perbankan. "Perbankan yang melayani penarikan dari masyarakat. Kemudian perbankan yang menarik kepada BI," jelasnya.

Dari evaluasi itulah, kata Causa Iman Carana, outflow sebesar Rp 4,1 triliun tersebut lebih tinggi dari momen perayaan Idul Fitri dua periode sebelumnya.

Indikasi peningkatan outflow, juga ditandai dengan tren meningkatnya transaksi penukaran dan kas keliling jelang Idul Fitri. Dijelaskan Causa Iman Carana, pada Mei lalu nominal kas keliling mencapai Rp 7,6 miliar.

Jumlahnya lebih tinggi dibanding rata-rata bulanan periode Januari- Mei sebesar



Causa Iman Carana

Rp 2,8 miliar. Sementara pada Mei 2018, nominal kas keliling sebesar Rp 6,97 miliar.

"Lebih tinggi dari rata-rata bulan 2018 sebesar Rp 2,99 miliar," ujarnya.

Masih periode yang sama yakni Mei, nominal penukaran uang mencapai Rp 14,3 miliar, lebih tinggi dibanding rata-rata penukaran bulanan Januari- Mei 2019, sebesar Rp 11,11 miliar.

Sementara Mei 2018, nominal penukaran sebesar Rp 9,5 miliar. Nominal ini lebih tinggi dari rata-rata nominal penukaran bulanan 2018, rata-rata Rp 8,46 miliar.

Meningkatnya penukaran uang terkait momen Lebaran tersebut, kata Causa Iman Carana mengindikasikan masyarakat

masih tetap memiliki animo tinggi terhadap budaya penggunaan pemberian (uang baru) kepada keluarga, kerabat dan kolega jelang hari raya keagamaan.

"Ini juga mengindikasikan peningkatan pendapatan di Denpasar dan Bali pada umumnya," jelas Causa Iman Carana.

Soal inflasi pada bulan Ramadhan, Causa Iman Carana mengatakan dalam kondisi terkendali. Malah pada Mei 2019 berada dibawah inflasi nasional. Dimana inflasi di Bali secara bulanan, Mei sebesar 0,23 persen lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,28 persen, lebih rendah dari nasional sebesar 0,68 persen.

Secara spasial, inflasi bulanan Denpasar dan Singaraja, lanjut Causa Iman Carana tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Pada Mei lalu inflasi di Denpasar tercatat sebesar 0,22 persen lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,26 persen. Sedang inflasi di Singaraja 0,28 persen juga lebih rendah dari bulan sebelumnya 0,39 persen. "Melihat pola historis selama 5 tahun terakhir, kecenderungan peningkatan harga pada momen perayaan keagamaan (Idul Fitri) memang terjadi. Namun demikian sejak terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2015, inflasi pada periode Idul Fitri relatif terkendali," jelasnya. **k17**

Edisi : Jum'at, 14 Juni 2019

Hal : 11



# Kami Ini Polisi, Tapi Tertipu Juga

## DENPASAR, TRIBUN BALI

Philippus Damaug Gagonoadi (42) hanya bisa diam menunggu saat dihadirkan di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (20/6). Ia dididit karena diduga menipu mantan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen (purn) Dewa Made Parsana Rp 238 juta.

Dalam keterangannya, selaku korban Dewa Parsana mengaku tidak menyangka akan menjadi korban penipuan yang dilakukan Danang. Apalagi dalam pertemuan sebelumnya, Danang memberikan penawaran yang menggiurkan. "Walaupun kami ini polisi, kami juga tertipu," ucapnya di hadapan majelis hakim pimpinan KN Partha Barghawa.

Selam ditipu Rp 238 juta, beberapa toko elektronik di Palu juga menjadi korban. Terdakwa Danang sempat mengambil laptop di salah satu toko dengan mengatakan suruhan Dewa Parsana yang sempat tiga tahun menjabat sebagai Kapolda di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, pemilik karantina Polda Sulteng juga jadi korban penipuan terdakwa. "Di karantina dia ngutang sampai Rp 10 juta,"

ungkapnya.

Dari keterangan yang disampaikan Dewa Parsana itu, terdakwa membenarkan perbuatannya. Dengan telah mendengarkan keterangan korban, sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Kembali mengagendakan pemeriksaan keterangan para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut.

Dalam surat dakwaan Jaksa I Made Dips Umbarta membeberkan awal mula kasus ini terjadi. Dikatakannya, berawal dari pertemu-

an antara Brigjen (purn) Dewa Parsana dan terdakwa Danang yang merupakan Direktur PT Duta Bangun Artha pada September 2016 lalu. Di pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kerjasama pengembangan dan pengelolaan kawasan Monumen Gong Perdamasari milik Dewa Parsana di Palu.

"Salah satunya pembangunan taman cahaya dalam rangka penyambutan tahun baru 2017. Saksi korban lalu menyetujui kerjasama tersebut," jelasnya. Lalu pada

Nopember 2016, terdakwa menelpon Dewa Parsana dan menginformasikan jika perlengkapan taman cahaya sudah tiba. Namun peralatan tersebut masih ditahan pihak imigrasi. Terdakwa lalu meminta uang Rp 238 juta untuk membus peralatan tersebut dan selanjutnya dipasang di Monumen Gong Perdamasari. "Korban melalui anaknya mentransfer uang Rp 238 juta ke rekening PT Duta Bangun Artha milik terdakwa," ungkap Jaksa Dips Umbarta. (ean)



## Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod Digeledah Jaksa

★ Terkait Dugaan Korupsi APBDes Senilai Rp 1,03 Miliar ✓

DENPASAR, NusaBali

Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat digeledah oleh Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Denpasar, Kamis (20/6). Penggeledahan ini dilakukan tim jaksa untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod senilai Rp 1,03 miliar.

Pengeledahan Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod yang berlokasi di Jalan Serma Made Oka Denpasar Barat, Kamis kemarin, berlangsung selama 3 jam sejak pagi pukul 09.00 Wita hingga siang pukul 12.00 Wita. Penggeledahan tersebut dipimpin langsung Kasi Pidsus Kejari Denpasar, I Nengah Astawa.

Pengeledahan yang melibatkan 10 penyidik Pidsus Kejari Denpasar ini dilakukan di beberapa ruangan, antara lain, Ruang Perbekel Dauh Puri



berlanjut ke hal 25 Kolom 1

Petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar saat melakukan penggeledahan di Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod, Kamis (20/6).

## Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod Digeledah Jaksa ✓

SAMBUTAN DARI HALAMAN 1

Kelod, Ruang Bendahara Desa Dauh Puri Kelod, dan Ruang Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kelod. Dari penggeledahan tersebut, petugas kejaksaan menyita 5 boks dan 3 kardus berisi dokumen anggaran periode 2013-2017. Selain itu, ada beberapa file dari komputer Kantor Perbekel Dauh Puri Kelod yang disita.

"Dokumen yang kami sita di antaranya SP (Surat Pertanggungjawaban), SPP (Surat Permohonan Pembayaran), dan dokumen-dokumen lainnya mulai tahun 2013 sampai 2017," papar Nengah Astawa.

Menurut Astawa, saat ini penyidik Pidsus Kejari Denpasar masih memilah dokumen-dokumen tersebut. "Berkas-berkas yang tidak relevan akan dikembalikan lagi. Jika ditemukan dokumen berkas yang ada korelasinya dengan kasus yang ditangani, barulah kami mengajukan surat penyitaan ke pengadilan," lanjut mantan jaksa Kejari Gianyar ini.

Sambil memeriksa dokumen yang disita, kata Astawa, penyidik kejaksaan rencananya akan kembali memanggil beberapa pejabat dari Pemkot Denpasar untuk diminta keterangannya.

Setelah itu, dilanjutkan dengan minta keterangan pejabat Desa Dauh Puri Kelod dan saksi-saksi lainnya. "Masih ada saksi ahli dan audit BPKP untuk menentukan kerugian negara dalam kasus ini," katanya.

Terkait calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod sebesar Rp 1,03 miliar ini, Astawa enggan berkomentar. Dia juga bungkam saat ditanya status mantan Perbekel Dauh Puri Kelod, I Gusti Made Wira Namiarta, yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Kota Denpasar 2019-2024 dari PDIP Dapil Denpasar Barat. "Nanti setelah selesai semua pemeriksaan, akan dilakukan ekspos untuk menentukan tersangka," elak Astawa.

Yang pasti, menurut Astawa, dari kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar, sudah ada pengembalian ke kas daerah sekitar Rp 300 juta. Rinciannya, mantan Perbekel IGM Wira Namiarta mengembalikan sebesar Rp 8,5 juta, Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kelod kembalikan Rp 102 juta, dan Bendahara Desa Dauh Puri Kelod kembalikan Rp 144 juta. "Nah, sisanya sekitar Rp 770 juta ini masih kami dalam lagi, ke mana saja aliran uangnya,"

tegas Astawa.

Sementara itu, Pjs Perbekel Dauh Puri Kelod, Luh Sukarmini, mengatakan tidak terlalu paham dengan perkara yang kini ditangani Kejari Denpasar tersebut. Meski demikian, pihaknya berharap segala permasalahan bisa segera tuntas. "Kami berharap tidak lagi ada masalah ke depannya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warga," ujar Luh Sukarmini.

Kasus dugaan korupsi APBDes Rp 1,03 miliar di Desa Dauh Puri Kelod ini pertama kali dibongkar seorang aktivis, I Nyoman Mardika. Dalam kasus ini, diduga ada penyelewengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,03 miliar. Dugaan penyelewengan muncul ketika selisihnya antara Silpa APBDes Dauh Puri Kelod tahun 2017 sebesar Rp 1,95 miliar berbeda dengan dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, IGM Wira Namiarta, serta Bendahara dan Kaur Keuangan.

Dari jumlah tersebut, uang yang masih berada di tangan Bendahara Desa Dauh Puri Kelod sebesar Rp 877 juta, sementara ditangan Kaur Keuangan mencapai Rp 102,82 juta, dan yang dipegang Perbekel (walitu itu) IGM Wira Namiarta hanya Rp 8,5 juta. "Dari Silpa tersebut,

ada uang Rp 1 miliar lebih yang tidak jelas keberadaannya," ungkap Nyoman Mardika didampingi tim kuasa hukumnya dari Yayasan Manikaya Kauca yang dikoordinasikan Ketut Bakuk, beberapa waktu lalu.

Dugaan penyelewengan APBDes ini sudah sempat dilaporkan ke Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Agustus 2017 lalu. Oleh Jaya Negara, laporan ini diserahkan ke Inspektorat Kota Denpasar, yang kemudian langsung melakukan penelusuran.

Hasilnya, ditemukan adanya selisih antara Silpa dan uang yang berada di tangan Bendahara Desa Dauh Puri Kelod. Temuan ini lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). "Jadi, sudah ada hasil resmi dari Inspektorat Kota Denpasar," kata Mardika.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, paling lambat 2 bulan atau 60 hari kerja Inspektorat wajib melaporkan temuan tersebut kepada penegak hukum. Namun, setelah 5 bulan berlalu ternyata tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat Kota Denpasar. "Karena tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat, maka kami berinisiatif melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Bali," ungkap Mardika saat itu. **re: rex**

Edisi : Jum'at, 21 Juni 2019

Hal : 1815



## Transaksi Stand PKB Bisa ✓ Tembus di Atas Rp 14 Miliar

DENPASAR, NusaBali

Transaksi produk industri kerajinan, seperti fesyen, kerajinan perak, ukiran kayu, furnitur, perhiasan dan lainnya, di arena Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-41 diperkirakan meningkat. Hal itu mengacu nilai transaksi yang terus meningkat dalam setiap ajang. Perkiraan tersebut mengacu kecenderungan, peningkatan omset penjualan setiap pelaksanaan PKB.

Yang kedua, jumlah peserta yang lebih banyak dari PKB tahun 2018. Kenyataan di lapangan, masyarakat pengunjung PKB yang antusias, membludak. Lebih-lebih pada hari libur. "Berdasarkan kecenderungan tersebut, semestinya transaksi produk kerajinan/UKM pada PKB kali ini di atas Rp 14 miliar," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Bali I Putu Astawa, merujuk pencapaian tahun lalu.

Untuk diketahui, lanjut Astawa pada PKB ke-40 tahun 2018, jumlah peserta pameran industri di PKB

mencapai 215. Jumlah tersebut relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan transaksi rata-rata meningkat sekitar Rp 1 miliar setiap tahun.

Sedang pada PKB kali ini, jumlah peserta meningkat menjadi 304 orang peserta dan gratis, tidak dikenakan sewa stand. "Ini karena Pak Gubernur (Gubernur I Wayan Koster) ingin memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku industri," jelas Astawa. Berdasarkan indikasi-indikasi tersebut, Astawa optimis transaksi produk industri di ajang PKB ke-41, melampau angka Rp 14 miliar. "Sekarang kan belum dihitung, karena masih jalan," jelasnya.

Pada saat nanti, jelang penutupan dia berharap total nilai transaksi kerajinan industri yang dihandle Provinsi dalam hal ini Disdagprin akan diketahui. Kata dia, angka transaksi itu penting, sebagai salah satu bahan evaluasi atau progress. "Secara logika nilai transaksi mesti meningkat," tegasnya. **k17**

Edisi : Jum'at, 28 Juni 2019

Hal : II



# Tunggakan Pajak ABT Capai Ratusan Juta ✓

Dari 32 wajib pajak  
ABT, baru 4 yang  
menggunakan  
water meter.

BANGLI, NusaBali

Sejumlah pengusaha macet bayar pajak air bawah tanah (ABT). Imbasnya, tunggakan pajat ABT mencapai ratusan juta. Anggota DPRD Bangli soroti menumpuknya tunggakan pajak ABT saat rapat kerja dengan eksekutif di gedung dewan, Kamis (27/6). Tunggakan pajak ABT ini jadi temuan BPK.

Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha mengatakan ban-

yak perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah yang nunggak membayar pajak. Ada juga perusahaan yang belum tersentuh pajak, padahal sudah memanfaatkan ABT untuk tujuan komersil. "Apalagi belum semua pengguna ABT atau wajib pajak pasang water meter. Sehingga besaran pajak yang harus dibayar tidak sesuai kenyataan penggunaan," sesal Satria Yudha.

Menurutnya, banyak potensi pajak yang belum tersentuh. Sejumlah usaha yang penghasilan cukup tinggi tidak kena pajak. "Meski belum ada izin, semestinya tetap dikenakan pajak. Pemerintah bisa menjaring dengan dibuatkan NPWD

(Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah,' sarannya. Sampai saat ini dewan belum mendapat jawaban adakah imbas dari pemanfaatan ABT. Ada pengaruh atau tidak terhadap air permukaan. Satria Yudha meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan potensi usaha di Bangli. Setelah ada data baru diklasifikasi usaha yang patut dan wajib kena pajak. Semakin banyak potensi pajak bisa menjadi peluang menambah pendapatan asli daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Gede Suryawan mengungkapkan wajib pajak dari ABT sampai saat ini sebanyak 32 wajib pajak. Dari 32 wajib pajak baru 4 yang menggunakan water meter. "Nantinya semua wajib pajak akan dilengkapi water meter. Dari jumlah wajib pajak kebanyakan pemanfaatan ABT untuk peternakan," terangnya. Gede Suryawan mengakui sejumlah wajib pajak nunggak bayar pajak. BKPAD sudah melayangkan surat teguran dan berkoordinasi dengan Pemprov Bali selaku yang mengeluarkan izin. BKPAD Bangli tidak punya kewenangan mencabut izin pengusaha yang ngemplang pajak. "Jika tetap membandel pastinya ditindak tegas," terangnya. **esa**



RAPAT kerja DPRD Bangli dengan eksekutif di kantor DPRD Bangli, Kamis (27/6).



# Kenaikan PBB Dikurangi Hingga 90 Persen

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng akhirnya mau menyikapi gelombang protes dari sejumlah wajib pajak atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 tahun 2019, keberatan tersebut dapat diakomodir dengan pengurangan pajak sebesar 40 persen - 90 persen dari nilai kenaikan. Hanya saja, pemberian pengurangan pajak tersebut masih selektif.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Buleleng dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, Rabu (12/6), di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara.

Menyikapi gelombang protes kenaikan PBB P2 itu, Kepala BKD Buleleng Gede Sugiarta Widiada mengatakan, pengurangan pajak 40 persen - 90 persen dari nilai kenaikan dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi terhadap subjek dan objek pajak. Disebutkan, untuk subjek pajak memperhatikan kemampuan wajib pajak (WP) membayar pajak, seperti petani, pensiunan pegawai dan pengusaha. "Kalau petani dan pensiunan bisa mendapat keringanan dari nilai kenaikan pajak sampai 50 persen. Tentu ini berbeda bagi pengusaha," katanya.

Sedangkan menyangkut objek pajak, Sugiarta menjelaskan, keringanan pajak dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi lahan dan bangunan. Terhadap lahan kritis, prosentase

keringanan pajak diberikan berbeda dengan lahan subur. "Keringanan pajak ini dapat diberikan setelah wajib pajak mengajukan keberatan. Mekanismenya seperti apa, kami sudah pernah sosialisasikan kepada para perbeker. Dan kami juga minta kepada masing-masing desa/kelurahan agar dapat mengumpulkan warganya agar mengetahui tata cara mekanisme pengurangan pajak," ungkap Sugiarta.

Masih kata Sugiarta, sejauh ini sudah ada permohonan keberatan yang masuk sebanyak 112 permohonan. Dari jumlah itu, 90 permohonan keberatan sudah mendapat keringanan pajak dengan prosentase 40 persen - 90 persen. "Sisanya masih dalam proses, karena ini masih perlu verifikasi lebih lanjut. Karena dalam verifikasi itu kami juga

Nomor 15 Tahun 2019, yang memberi keringanan akibat kenaikan pajak lebih digencarkan lagi. Sehingga tidak ada lagi keresahan masyarakat terhadap penyesuaian tarif NJOP. Karena, pemerintah sudah memberikan solusi dengan mengakomodir keberatan atas kenaikan pajak. "Kami juga perlu mendapatkan laporan rutin, berapa SPPT yang mengalami kenaikan atau penurunan, termasuk berapa banyak yang mendapat keringanan," katanya.

Sebelumnya, gelombang protes atas kenaikan PBB P2 terus bergulir. Terakhir, tokoh masyarakat Desa Anturan, Kecamatan Buleleng mendatangi Gedung DPRD Buleleng. Mereka menyebut, kenaikan PBB kali ini dianggap kenaikan gila, karena kenaikannya sangat tinggi. **l19**

mengecek bukti-bukti kemampuan keuangan wajib pajak. Misalnya kemampuan membayar telepon, membayar air dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Sugiarta menegaskan, dengan penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), tidak semua obyek pajak mengalami kenaikan pajak. Sehingga bagi WP yang tidak mengalami kenaikan atau kenaikan tidak terlalu tinggi, sudah melunasi kewajibannya. Sugiarta juga memberikan data, dimana dari 202.113 SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang)

yang sudah diedarkan 42.252 lembar sudah pelunasan dengan nilai Rp 4.915.017.457, atau sebesar 12,35 persen dari target PBB tahun 2019 sebesar Rp 24 miliar.

Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara meminta agar sosialisasi terhadap Perbup



## Pemohon Santunan Penunggu Pasien Tembus 1.332 Hingga Mei 2019

MANGUPURA, NusaBali

Pemohon santunan penunggu pasien tembus 1.332 orang pada periode Januari-Mei 2019. Pemkab Badung juga telah mencairkan santunan tersebut dengan nilai total anggaran mencapai Rp 1,9 miliar.

"Dari data kami, tahun 2018 lalu mencairkan Rp 5,9 miliar lebih dari 3.816 permohonan. Sementara di 2019 hingga bulan Mei, sudah mencairkan Rp 1,9 miliar dengan 1.332 permohonan," ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung Ketut Sudarsana saat dihubungi, Rabu (12/6).

Menurut Sudarsana, sejauh ini program yang dicanangkan sejak era Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta berjalan tanpa kendala. Bahkan, permohonan yang masuk ke Dinas Sosial langsung ditindaklanjuti. Bila persyaratannya lengkap maka akan langsung cair. "Tidak ada yang belum cair, begitu SPJ-nya lengkap langsung bisa kami cair-

kan di BPKAD. Sampai saat ini belum ada yang tidak dicairkan sepanjang memenuhi syarat, pasti cair," tegasnya.

Mengenai persyaratan bantuan santunan penunggu pasien ini, berkas diajukan kepada Bupati Badung dengan melampirkan beberapa persyaratan berupa E-KTP, Kartu Keluarga (KK) Badung, Kartu Badung Sehat (KBS), dan Surat Keterangan Rawat Inap. Namun, bila penunggu tidak masuk dalam KK pasien, maka dilampirkan surat kuasa yang ditandatangani pasien. Kemudian, bila penunggu masih di bawah umur dan belum memiliki KTP, bisa digantikan dengan surat keterangan domisili dari perbekel setempat.

Perlu diperhatikan juga jangka waktu pengajuannya maksimal 30 hari setelah keluar dari rumah sakit. Jika lewat dari 30 hari, maka otomatis pengajuan tidak akan diterima.

Sudarsana yang notabene

mantan Kepala BLH Badung, itu menambahkan program santunan penunggu pasien ini menjadi salah satu prioritas. "Program santunan penunggu pasien masuk program prioritas, sebab merupakan program strategis," tandasnya.

Perincian santunan penunggu pasien berupa uang makan sebesar Rp 50 ribu per hari, uang transport Rp 50 per hari, dan uang saku Rp 100 ribu per hari. Dengan demikian, dalam sehari total Rp 200 ribu. "Tapi santunan tetap dibatasi paling banyak sebesar Rp 5 juta dan hanya diberikan sekali selama setahun," kata Sudarsana.

Seperti diketahui, santunan penunggu pasien ini telah berlaku sejak 18 Agustus 2017 lalu dan telah tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 45 Tahun 2017. Adapun besaran tersebut merujuk pada Perbup 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bansos. **asa**

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019

Hal : 2



## Masa Jabatan Anggota Dewan Badung Tinggal Dua Bulan RDTR Badung Utara Terancam Tak Bisa Selesai

MANGUPURA, NusaBali

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Badung Utara yang meliputi tiga kecamatan, Mengwi, Abiansemal, dan Petang, terancam tidak bisa selesai hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Badung periode 2014-2019 pada 4 Agustus 2019. Sebab, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung.

Ketua Pansus RDTR Badung Utara I Wayan Suyasa, mengakui pembahasan RDTR tergolong pelik, sehingga tidak mudah menyelesaikan pembahasan di tingkat pansus. Karenanya dia pesimis RDTR Badung Utara meliputi RDTR Kecamatan Mengwi, RDTR Kecamatan Abiansemal, dan RDTR Kecamatan Petang, selesai tahun ini.

"Kalau RDTR Badung Selatan sudah rampung. Malah, RDTR Kecamatan Kuta Selatan sudah disahkan. Sedangkan, RDTR Kecamatan Kuta dan RDTR Kecamatan Kuta Utara, juga sudah rampung tinggal pengesahan," kata Suyasa, Rabu (12/6).

"Jadi, untuk dua ini (Ranperda RDTR Kecamatan Kuta dan RDTR Kecamatan Kuta Utara) bisa dituntaskan sebelum masa jabatan kami berakhir Agustus ini. Sekarang tinggal menunggu jadwal sidang saja," imbuhnya.



I Putu Parwata



I Wayan Suyasa

Disinggung alotnya pembahasan RDTR Badung Utara, politisi Partai Golkar ini mengakui pembahasan RDTR ini berkaitan dengan lintas instansi, bahkan sangat terkait dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di pusat saja, urusan RDTR dibidangi oleh 12 kementerian yang saling berkaitan. "Sebetulnya sudah pernah beberapa kali pembahasan. Tapi, karena masing-masing punya kewenangan sendiri-sendiri, sehingga ini cukup sulit. Kesulitan ini lah yang membuat kita tidak bisa ditarget," tutur Suyasa.

Walau demikian, pihaknya akan tetap berupaya agar RDTR Badung bisa selesai. "Kapan targetnya, tentu kami tidak bisa (pastikan). Karena Perda RDTR ini tidak

sama seperti perda-perda yang lain. Kalau perda lain umurnya paling lima tahun. Sementara, kalau Perda RDTR ini umurnya bisa 25 tahun masih berlaku," ucapnya.

Sementara, dalam beberapa kesempatan, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata menargetkan RDTR Kecamatan Kuta dan RDTR Kecamatan Kuta Utara masuk prioritas untuk disahkan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Badung periode 2014-2019. "Yang kami kejar saat ini adalah Perda Pertanian, Perda Desa Adat, Perda Parkir, dan Perda Disabilitas. Sementara perda tahun sebelumnya yang kami harapkan juga tuntas tahun ini adalah Perda RDTR di masing-masing kecamatan," kata Parwata. **asa**

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019

Hal : 2



## Tahun Ini Bupati ✓ Tabanan Bakal Naik Mobil Dinas Alphard



Dewa Ayu Sri Budiarti

TABANAN, NusaBali

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, justru tahun 2019 Bupati Tabanan akan dibelikan mobil dinas baru berupa Toyota Alphard. Saat ini belanja kendaraan tersebut sudah masuk daftar lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan pagu Rp 1.943.350.000.

Sesuai daftar lelang di LPSE Tabanan, pengadaan tersebut masuk nama paket Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas

Bermotor Perorangan. Pagu yang bersumber dari APBD itu mencapai Rp 1.943.350.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 1.853.600.000. Proses lelang tersebut batas pendaftarannya sampai 17 Juni 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa tahun 2019 melakukan pengadaan mobil dinas. Kendaraan itu diperuntukkan pimpinan. "Iya benar lelang kendaraan dinas untuk Bupati, kalau Wakil Bupati sudah ada," ujarnya, Rabu (12/6).

Dikatakan pengadaan kendaraan dinas ini untuk menunjang operasional kedinasan. Karena sekarang ini Bupati Tabanan tidak memiliki kendaraan dinas. "Kalau sebelumnya beliau menggunakan kendaraan pribadi," katanya.

Sementara itu disinggung anggaran yang diplotkan untuk belanja kendaraan sebesar Rp 1,9 miliar, Budiarti menjelaskan bahwa itu baru anggaran pagu belum ada pemenang. "Itu baru pagu, kita belum bisa menentukan sekarang angka pasti karena belum ada pemenang," tandasnya. **des**

Edisi : Kamis, 13 Juni 2019

Hal : 7



## Bupati Giri Prasta Serahkan 565 Bantuan Rumah Layak Huni

MANGUPUJA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana bantuan rumah layak huni (BRLH) kepada 565 warga. Penyerahan bantuan sebesar Rp 55 juta kepada masing-masing penerima, dilakukan secara simbolis di Wintilan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (19/6).

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Badung AA Bayu Kumara mengatakan, BRLH merupakan salah satu misi Bupati Badung yaitu meningkatkan daya saing melalui peningkatan SDM dan infrastruktur daerah. Program ini sejalan dengan agenda menuntaskan masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Program ini mulai digulirkan sejak 2016 dan tahun ini memasuki tahun ketiga. Jumlah

permohonan bantuan sebanyak 6.846 KK. Setelah verifikasi, yang layak mendapat bantuan sebanyak 2.180 KK," ungkap Bayu Kumara.

"Sejarah ini yang sudah mendapat bantuan sebanyak 775 KK dengan jumlah dana Rp 42,185 miliar. Untuk tahun ini dibantu 565 KK dengan nilai Rp 31,75 miliar. Jadi BRLH hingga tahun 2019 sebanyak 1.332 KK," imbuhnya.

Mengenai kriteria calon penerima BRLH, lanjut Bayu Kumara, yakni harus KK warga Badung, memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dan tidak dalam sengketa, belum memiliki rumah atau memiliki atau menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah, berpenghasi-

lan paling banyak senilai upah minimum daerah. "Yang paling penting itu adalah harus warga asli Badung," tegasnya.

Sementara Bupati Giri Prasta menekankan agar pembangunan rumah layak huni dilakukan secara gotong royong dan bentuknya juga seragam, dilengkapi dua kamar tidur, satu ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. "Saya harapkan bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, ke depan juga akan diberi bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan usaha dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

Bupati Giri Prasta menambahkan, bantuan ini merupakan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung. Selain BRLH akan berlanjut ke bantuan bedah warung dan bedah WC. **asa**



BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan 565 bantuan rumah layak huni di Wintilan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (19/6).

Edisi : Kamis, 20 Juni 2019

Hal : 2



## APBD Perubahan 2019 ✓ Terancam Dirasionalisasi

★ Perlu Dana Rp 29 Miliar Tutup Uang  
Jaminan BPJS

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kini tengah membutuhkan dana sekitar Rp 29 miliar, guna memenuhi kewajiban meng-cover seluruh warga Buleleng dalam program Program Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Dana sebesar itu harus dialokasikan dalam APBD Perubahan 2019 yang segera diajukan ke Lembaga DPRD Buleleng. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Buleleng tengah menggali sumber-sumber keuangan guna menutup keperluan dana UHC tersebut.

Dalam pemenuhan UHC 100 persen dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 818.289 jiwa, kebutuhan dana selama ini ditanggung bersama antara Pemkab Buleleng dengan Pemprov Bali. Pemkab Buleleng mendapat jatah sebesar Rp 42,8 miliar, sedangkan Pemprov Bali sebesar Rp 44,5 miliar. Nah untuk Pemkab Buleleng, dalam APBD Induk 2019 hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 14,3 miliar. Sedangkan Pemprov Bali, sudah mengalokasikan dana secara penuh di APBD Induk 2019.

Nah, kekurangan dana dari Kabupaten sebesar Rp 28,5 miliar, kini harus terpenuhi di APBD Perubahan 2019. Selain

memenuhi kekurangan dana tersebut, Pemkab Buleleng juga harus menambah dana sekitar Rp 1,2 miliar, karena masih ada tambahan warga yang mesti ditanggung sebanyak 19.807 jiwa atau 2,42 persen dari total jumlah penduduk. Sehingga kebutuhan dana keseluruhan yang mesti disiapkan dalam APBD Perubahan 2019 nanti sebesar Rp 29,6 miliar.

Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra yang ditemui Senin (24/6) mengakui kebutuhan dana dalam program UHC yang disiapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 29,6 miliar. Namun Sutjidra belum dapat memastikan apakah nanti akan ada rasionalisasi anggaran atau tidak. "Saya rasa belum, karena dari hitungan sementara, angkanya sudah didapat oleh BKD dan Bappeda Litbang. Dan ini juga atas petunjuk dari Pak Bupati," terangnya.

Menurut Sutjidra, upaya memenuhi kebutuhan dana sebesar Rp 29,6 Miliar itu sebagai bentuk komitmen Pemkab Buleleng dalam melaksanakan program UHC di tahun 2019. Sehingga nantinya, tidak ada lagi persoalan warga yang sudah ber KTP Buleleng kesulitan mendapat layanan kesehatan. **k19**

Edisi : Kamis, 27 Juni 2019

Hal : 4



# Klungkung Putihkan Piutang Rp 1,6 M

Dari segi kebijakan akuntansi, jelas Bupati, piutang ini akan menunggu lama maka hingga menjadi angka pengganggu.

SEMARAPURA, NusaBali  
Bupati Klungkung I Nyoman

rektor RSUD Klungkung dr Nyoman Kesuma mengatakan, terkait penghapusan itu, dari sisi aturan keuangan memungkinkan dilakukan sepanjang sesuai prosedur. Seperti penagihan, namun tetap juga tidak bisa terbayarkan, atau ada alasan tertentu yang bisa diajukan RS ke bupati untuk penghapusan piutang.

Prosedur sudah dilalui seperti bersurat ke Dinsos Bali, ternyata itu menjadi wewenang

Suwirta akan memutihkan atau menghapuskan piutang untuk klaim kesehatan terhadap pengungsi erupsi Gunung Agung, di RSUD Klungkung, Rp 1,6 miliar lebih. "Secara aturan memungkinkan, ini demi rasa kemanusiaan kepada saudara kita di Karangasem," ujar Bupati Suwirta, Selasa (26/6).

Dari segi kebijakan akuntansi, jelas Bupati, piutang ini akan menunggu lama maka hingga menjadi angka pen-

ganggu. Bupati akan membahas untuk memutihkan klaim piutang ini. "Saya minta kepada dokter dan tenaga medis di RSUD untuk mengiklaskan sekian persen untuk jaspelnya sekian persen ini. Setelah itu saya baru mengambil keputusan," ujarnya. Dia mengaku sudah menugaskan Sekda Klungkung Gede Putu Winastra untuk mengkaji pemutihan ini.

Dikonfirmasi terpisah, Di-

BNPB Bali, sehingga bersurat ke sana. BNPB Bali mengungkapkan dari Rp 1,6 miliar itu bisa dibayarkan hanya Rp 78 juta. Sisanya akan dibayarkan Pemkab Karangasem. "Rp 78 juta sudah ditransfer ke RSUD Klungkung oleh BPBD Karangasem. Sisanya diusahakan bisa dilunasi tahun ini. Pemkab Karangasem masih berkoordinasi dengan Provinsi Bali untuk mencari celah pembayaran," ujarnya. @ wan



## BPBD Karangasem Tangani Pohon Tumbang dan Longsor

AMLAPURA, NusaBali

TRC BPBD (Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Karangasem menangani pohon aren yang tumbang dan tanah longsor bersama relawan Pasebaya Agung, relawan Destana, Dinas PUPR dan warga. Penanganan pertama pohon aren tumbang di Banjar Wates Kaja, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu (15/6) pukul 07.30 Wita. Berlanjut penanganan tanah longsor di Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur.

Pohon aren yang tumbang tinggi 15 meter, diameter 45 cm melintang di jalan desa dilaporkan Kelian Banjar Wates Kaja I Putu Pujana, kepada Perbekel Duda Timur I Gede Pawana. Selanjutnya I Gede Pawana melaporkan ke TRC BPBD Karangasem.

TRC BPBD yang dikoordinasikan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa melakukan penanganan dengan membawa tiga chainsaw digunakan memotong batang pohon aren yang berusia tua. Penanganan itu dibantu relawan, Kelian Banjar Wates Kaja I Putu Pujana, dan warga masyarakat setempat.

Pohon aren yang roboh itu, diperkirakan berusia sekitar 40 tahun bagian akarnya telah keropos. "Pohon aren biasanya rawan roboh, batangnya besar dan berat, sedangkan akarnya sebagai penyangga cepat keropos," jelas Ida Bagus Ketut Arimbawa.

IB Ketut Arimbawa mengingatkan, jika memiliki pohon aren telah berusia cukup tua sebaiknya ditebang. Sebab, keberadaannya



BPBD bersama relawan tangani pohon aren tumbang di Banjar Wates Kaja, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Karangasem, Sabtu(15/6).

nya membahayakan, terutama di musim hujan.

Bukan hanya pohon aren katanya, pohon lainnya juga membahayakan jika usianya telah tua dan posisinya condong ke jalan raya atau ke rumah penduduk. "Lebih baik korbannya pohon itu dari pada menimbulkan risiko. Kan lebih baik ditebang, bisa digunakan bahan bangunan atau kayu bakar dari pada dibiarkan roboh sesuai keyakinan tidak lagi bisa digunakan bahan bangunan," katanya.

Usai melakukan penanganan pohon aren berlanjut menangani tanah longsor yang menimpa setengah badan jalan di Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur. Setengah badan jalan yang terganggu akibat longsor menghubungkan Banjar Pesangkan, menuju Banjar Juuk Legi, Desa Duda Timur.

Longsor terjadi pukul 08.00 Wita, dilaporkan Kelian Banjar

Juuk Legi I Gede Tamtawi, kepada Perbekel Duda Timur I Gede Pawana. Laporan itu kemudian diteruskan ke TRC BPBD Karangasem. Saat melakukan penanganan longsor, TRC BPBD juga melibatkan petugas dari Dinas PUPR Karangasem, relawan Pasebaya Agung, relawan Destana, dan warga masyarakat.

"Kami merasa terbantu dengan adanya relawan, dan bantuan masyarakat. Di sinilah pentingnya kerjasama bersinergi," lanjut IB Ketut Arimbawa.

Perbekel Duda Timur yang juga Ketua Pasebaya Agung Karangasem I Gede Pawana mengaku siap membantu pemerintah, bidang mitigasi bencana. "Kami telah dua tahun memimpin Pasebaya Agung, selalu bersinergi dengan pemerintah mendukung masyarakat bidang kebencanaan Gunung Agung, tanah longsor dan pohon tumbang," jelasnya. **K16**



# Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 1,9 Miliar

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 1,9 miliar saat menghadiri rangkaian Karya Pitra Yadnya Pranawa Bhuwana Kosa Manusa Yadnya lan Atma Wedana Maligia Punggel, Desa Adat Pecatu tahun 2019 pada Anggara Paing Tulu, Selasa (11/6).

Bupati Giri Prasta hadir bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa, Sekda Badung Adi Arnawa, Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Kariyana. Dana hibah sebesar Rp 1,9

miliar untuk pelaksanaan karya Pitra Yadnya diterima Ketua Panitia I Wayan Teja didampingi Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta.

Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, menyatakan karya Pitra Yadnya ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Tahun ini sebanyak 290 peserta yang ikut prosesi Pitra Yadnya. Sedangkan nyekah atau atma wedana diikuti sebanyak 297, mapetik atau ngangkit diikuti 363, dan matatah diikuti sebanyak 105 krama.

"Puncak acara akan dilak-

sanakan pada Wraspati Wage Tolu, Kamis (13/6). Kemudian prosesi ngangkit dan mapetik akan dilaksanakan pada 16 Juni serta matatah pada 17 Juni," ujarnya.

Dikatakannya, pendanaan karya Pitra Yadnya selain didukung oleh LPD Desa Pecatu melalui Iuran Dana (Ida) Ngaben, juga bersumber dari dana desa dan bantuan dari Pemkab Badung. "Selain dari program Ida Ngaben LPD sebesar Rp 540 juta, ada juga sumbangan dari APBDes sebesar Rp 150 juta. Sedangkan dari dana sosial

LPD sebesar Rp 200 juta, punia LPD sebesar Rp 172 juta, dana dari Pemkab Badung sebesar Rp 1,9 miliar, dan punia dari sejumlah pihak," kata Sumerta.

Sementara Bupati Giri Prasta mengemukakan Pitra Yadnya harus terus digerakkan dan dimunculkan dengan satu konsep yaitu gotong royong. Pemerintah Kabupaten Badung tentu tidak tutup mata dalam kegiatan seperti itu, dan turut serta membantu krama. "Ini merupakan salah satu cara untuk meringankan beban krama," ujarnya. **dar**

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 2



## Ekspor Bali Jeblok 9,98 Persen ✓

DENPASAR, NusaBali

Nilai ekspor barang dari Bali pada April 2019, sebesar 51,5 juta dollar AS (Rp 732.587,5 miliar). Nilai tersebut turun 9,98 persen dibanding Maret. Penurunan nilai ekspor tersebut dominan dipengaruhi turunnya ekspor dengan tujuan Australia dan Tiongkok.

Ekspor ke Australia turun 3,3 juta dollar atau Rp 46,942 miliar atau (-59,48 persen) dan ekspor

ke Tiongkok turun 1,9 juta dollar atau Rp 27,027 miliar atau -58,83 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Adi Nugroho, mengatakan untuk ekspor ke Australia didominasi turunnya produk ekspor barang perhiasan/permata. Nilainya 3,7 juta dollar atau Rp 52,632 miliar.

"Sedang ekspor dengan tujuan Tiongkok didominasi turunnya ekspor buah-buahan," jelasnya,

Selasa (11/6).

Nilai penurunan ekspor buah-buahan tersebut, sebesar 1,1 juta dollar atau Rp 15,647 miliar.

Lanjut Adi Nugroho, selain ekspor dengan tujuan Australia dan Tiongkok, ekspor ke beberapa negara yang juga mengalami penurunan, juga memberi andil. Ekspor tersebut diantaranya ke Spanyol dan Italia.

Sementara pangsa utama 10 komoditas utama ekspor Bali,

khususnya pada April adalah Amerika Serikat. Dari sepuluh produk ekspor tersebut, kata Adi Nugroho 6 item dengan tujuan Amerika Serikat.

Diantaranya produk ikan dan udang, produk pakaian jadi bukan rajutan, produk kayu dan barang dari kayu, produk perabot penerangan rumah, produk barang rajutan dan produk kertas/karton. ☎ k17

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 10



## Festival Yeh Gangga Sedot Dana Rp 1 Miliar ✓

TABANAN, NusaBali

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Desa Adat Yeh Gangga akan menggelar Festival Yeh Gangga. Festival yang kedua kalinya digelar kali ini digelontor dana sebesar Rp 1 miliar. Festival rencananya diselenggarakan selama dua hari pada 22 - 23 Juni 2019.

Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Made Yasa menjelaskan susunan acara festival tengah dirancang oleh panitia Desa Adat Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan. "Tengah disusun, sebelum audiensi ke pimpinan," ujarnya, Selasa (11/6).

Menurut Yasa, pada Festival Yeh Gangga II ini Pemkab Tabanan bekerjasama dengan Desa Adat Yeh Gangga. Segala susunan acara dan kreativitas diserahkan ke pihak desa adat. Termasuk anggaran Rp 1 miliar bersumber dari BKK Badung diserahkan ke desa adat. "Artinya kami (pembkab) tidak kaku, silakan desa adat yang mengemas," imbuhnya.

Namun Yasa mengharapkan acara yang dibuat agar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dapat meningkatkan keberadaan objek, mengenalkan kuliner laut yang ada di Yeh Gangga seperti lobster, pindang, dan ikan. "Ini juga belum audiensi dengan pimpinan, mungkin ada tambahan acara. Yang jelas kami ingin kenalkan potensi yang ada di Pantai Yeh Gangga," tegasnya.

Saat festival digelar nanti, Yasa tidak mematok target kunjungan. Karena wisata di Yeh Gangga masih tergolong

embrio. Makanya dibuat festival ini untuk membantu memperkenalkan dan meningkatkan potensi setempat. "Belum bisa kami patok (tingkat kunjungan, *Red*), masih baru ya itu," tuturnya.

Namun Yasa menambahkan sejatinya di Pantai Yeh Gangga ada beberapa kawasan yang bisa dikembangkan. Contohnya tebing batu bolong bisa dijadikan tempat selfie serta dibuat beberapa stand kuliner khas Yeh Gangga. "Ya perlahan dulu, sama-sama saling mendukung," tandasnya. **des**

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 7



### Sikapi Temuan BPK RI

## DPRD Minta Aksi Nyata Pemkab

SINGARAJA, NusaBali

DPRD Buleleng meminta aksi nyata Pemkab Buleleng untuk menindaklanjuti temuan BPK RI atas laporan pertanggungjawaban APBD 2018. Karena temuan BPK itu wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI diterima.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng atas LHP BPK RI dan sejumlah Ranperda, Selasa (11/6) pagi di Gedung DPRD Buleleng. Rapat dipimpin Ketua DPRD Gede Supriatna, dihadiri Wakil Bupati Buleleng dr Nyoman Sutjitra, Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka, serta pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Supriatna mengatakan, pihaknya meminta agar eksekutif menyampaikan langkah-langkah kongkrit yang diambil menyikapi beberapa temuan BPK RI atas APBD 2018. "Kami sebagai lembaga pengawas, meminta seperti apa langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah terhadap catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK. Ini wajib disikapi oleh pemerintah daerah, jangan sampai menjadi catatan lagi di kemudian hari," katanya.

Untuk diketahui, BPK RI memberikan sejumlah catatan sebagai temuan atas audit APBD 2018. BPK menemukan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dari 641 hotel yang semestinya dipungut pajak, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kondisi yang sama juga terjadi di pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum ditetapkan sebagai WP sehingga pajaknya tidak bisa dipungut, karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Akibat pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran tersebut, berpengaruh pada target Pendapatan Asli Daerah. Disebutkan, target PAD pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 376.365.727.547, namun realisasinya hanya sebesar Rp 335.555.493.392, atau 89,6 persen. Melesetnya capaian target PAD, juga dipengaruhi oleh tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah.

Terbukti piutang pajak daerah meningkat dari sebesar Rp 71.068.387.425,73 menjadi Rp 75.992.872.760,77 atau terjadi kenaikan sebesar Rp 4.924.485.335,04 atau 6,93 persen. Tercatat, tunggakan paling tinggi dari piutang PBB sebesar Rp 71.369.360.639,64, kemudian piutang pajak hotel Rp 2.196.286.663,14, dan piutang pajak restoran Rp 1.495.047.039,93, dan piutang pajak air tanah sebesar Rp

805.064.160.

Sekda Buleleng Dewa Ketut Puspaka menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah dalam menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. "Narasi sudah kami buat, termasuk juga aksinya seperti apa sudah kami siapkan, tinggal nanti menerapkan saja. Dan nanti kami akan sampaikan kepada lembaga dewan juga," katanya.

Menurutnya, semua catatan dari hasil temuan BPK RI akan ditindaklanjuti seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, BPK RI sangat menghargai sikap Pemkab Buleleng dalam menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK RI tersebut. "Karena kami tahu resiko-resiko mana saja tidak menindaklanjuti catatan dari LHP BPK RI itu. Malah kami selalu merespon cepat catatan BPK RI itu, dan kami sampaikan dan juga melaksanakan," tandasnya. @ k19

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 4



## Warga Anturan Protes Kenaikan PBB

SINGARAJA, NusaBali

Gelombang protes atas kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) kembali terjadi. Kali ini, sejumlah tokoh masyarakat Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Buleleng, menyuarakan protes dengan mendatangi Gedung DPRD Buleleng, Selasa (11/6) siang.

Tokoh masyarakat Anturan itu, antara lain Perbekel Anturan I Made Budi Arsana, Bendesa Pakraman Anturan Ketut Mangku, Ketua Kertha Desa Pakraman Anturan Made Suwinaya, dan krama Ketut Supadra. Kehadiran mereka diterima Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara bersama sejumlah anggota Komisi III DPRD.

Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat Anturan menyatakan kenaikan PBB P2 tersebut telah meresahkan masyarakat. Disamping itu, tidak pernah ada sosialisasi

dan kenaikan PBB kali ini merupakan kenaikan paling gila. Ketut Supandra mengaku, dulunya hanya membayar PBB Rp 151.000 untuk sebidang tanah kering yang tidak menghasilkan apapun. Kini dengan kenaikan itu, harus membayar pajak Rp 896.000. "Kenaikan pajak ini betul betul kenaikan yang gila. Yang jelas, kami sebagai masyarakat keberatan pajak yang sangat tinggi. Tanah saya, sela pula sing mentik (ketela pun tidak tumbuh, Red) Pak, malah harus bayar pajak naiknya sangat gila. Seharunya kenaikan pajak itu berdasarkan survei hasil, bukan berdasarkan NJOP (nilai jual objek pajak). Kalau NJOP-nya tanah saya tinggi, saya mau jual tanah saya, saya berikan komisi 10 persen pak yang berhasil mecari-kan pembeli," ketus Supadra sambil menunjukkan SPPT miliknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bendesa Pakraman Anturan Ketut Mangku.

Dikatakan, sejak menerima SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) dua hari

lalu, banyak warganya kaget dengan kenaikan pajak yang harus dibayar. Dia sendiri me-

miliki lahan yang sebelumnya hanya membayar Rp 300.000, kini harus membayar sebesar Rp1,3 juta. "Saya sempat panen jagung mendapat Rp 300.000, sekarang pajak naik, kan minus penghasilan saya. Intinya agar pajak yang besar ini dapat diturunkan, minimal sama dengan tahun tahun lalu," katanya.

kita harus berani, dari pada masyarakat bergejolak, lebih baik tunda dulu. Terlambat juga tidak masalah pembayaran itu. Perbupnya juga harus dirubah," tegas politisi Partai Golkar, asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Anggota Komisi III Putu Tirtha Adnyana melihat persoalan ini sebagai masalah yang serius. Dia pun meminta kepada pimpinan DPRD untuk merekomendasikan agar Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng menunda pemungutan PBB di tahun 2019, walaupun akan berpengaruh dari sisi PAD Buleleng. Dia khawatir kenaikan tarif PBB yang signifikan ini akan menimbulkan gejolak, karena keberatan ini mungkin dirasakan oleh seluruh wajib pajak di kabupaten Buleleng. "PAD berkurang kalau ditunda, itulah resiko

Atas penyampaian aspirasi dari sejumlah masyarakat Desa Anturan ini, Dewan rencananya akan memanggil Badan Keuangan daerah (BKD) Buleleng termasuk mengundang Tim Appraisal yang diminta melakukan kajian terhadap NJOP. Rencananya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu akan dilaksanakan Rabu, (12/6) ini. "Kami akan RDP, dan kami akan sampaikan keluhan warga. Dan kami juga akan tanyakan, apa sih kriterianya untuk menentukan NJOP," kata Wakil Ketua Dewan, Ketut Susila Umbara usai memimpin pertemuan. **k19**

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 4



## Lima Pejabat Pemkot Denpasar Diperiksa

★ Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod

DENPASAR, NusaBali

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar memeriksa 5 pejabat Pemkot Denpasar pada, Selasa (18/6), terkait perkara dugaan korupsi APBDes Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat senilai Rp 1 miliar lebih. Setelah pejabat Pemkot, rencananya pemeriksaan akan dilanjutkan ke staf dan pejabat Desa Dauh Puri Kelod.

Lima pejabat Pemkot Denpasar yang diperiksa, Selasa kemarin, yaitu Inspektoral, IB Gde Sidharta, Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), IB Alit Wiradana, Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang juga mantan Camat Denpasar Barat, IB Joni Wiratama, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Made Pasek Mandira dan Camat Denpasar Barat, AA Ngurah Made Wijaya.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar, Nengah Astawa, mengatakan pemeriksaan lima pejabat Pemkot Denpasar ini dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod. Kelima pejabat Pemkot tersebut diperiksa selama 4 jam mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita.

"Jadi perkara ini sudah naik status dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Untuk lima saksi ini yang pertama kami periksa dan kami akan kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya untuk melengkapi berkas perkara ini," tegasnya. Dijelaskan Astawa, pemeriksaan kelima saksi ini masih terkait penyelewengan dana desa yang dikelola Desa Dauh Puri Kelod. Namun Astawa enggan berkomentar lebih banyak terkait materi pemeriksaan kali ini. Disinggung pemeriksaan untuk Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, mantan jaksa Kejari Gianyar ini mengatakan pemeriksaan belum sampai ke sana.

"Untuk Walikota sepertinya belum ke sana. Yang pasti setelah pemeriksaan pejabat Pemkot akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di antaranya staf dan pejabat Desa Dauh Puri Kelod," lanjutnya.

Ditambahkannya, dari kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar, disebutkan sudah ada pengembalian ke kas daerah sekitar Rp 300 juta lebih, yaitu dari mantan Perbekel Dauh Puri Kelod, I Gusti Made WN sebesar Rp 8,5 juta, Kaur Keuangan Rp 102 juta dan

Bendahara Rp 144 juta. "Nah sisanya sekitar Rp 770 juta ini masih kami dalam lagi. Ke mana saja aliran uang ini," bebernyanya.

Terkait pemeriksaan mantan Perbekel, I Gusti Made WN, Astawa belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pemeriksaan. "Yang bersangkutan (mantan Perbekel, red) sudah sempat dimintai klarifikasi saat pengumpulan data. Tapi untuk penyidikan belum diperiksa," pungkasnya.

Kasus dugaan korupsi ini pertama kali dibongkar seorang warga yang juga aktivis, I Nyoman Mardika. Dalam kasus ini diduga ada penyelewengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1 miliar lebih.

Dugaan penyelewengan muncul ketika selisihnya antara SILPA APBDes Dauh Puri Kelod tahun 2017 sebesar Rp 1,95 miliar berbeda dengan dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, I Gusti Made WN dan Bendahara serta Kaur Keuangan.

Dari jumlah tersebut uang yang masih berada di tangan bendahara desa sebesar Rp 877 juta, dipegang I Gusti Made WN Rp 8,5 juta dan di tangan kaur keuangan sebesar Rp 102,82 juta. "Dari Silpa tersebut ada uang Rp 1 miliar lebih yang tidak jelas keberadaannya," ujar Mardika yang didampingi tim hukumnya dari Yayasan Manikaya Kauca yang dikoordinir Ketut Bakuh.

Dugaan penyelewengan ini sudah sempat dilaporkan ke Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara pada Agustus 2017 lalu. Oleh Jaya Negara, laporan ini diserahkan ke Inspektoral Kota Denpasar yang langsung melakukan penelusuran. Hasilnya, ditemukan adanya selisih antara SILPA dan uang yang berada di tangan bendahara. Temuan ini lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

"Jadi sudah ada hasil resmi dari Inspektoral," tegasnya. Sesuai ketentuan perundang-undangan paling lama dua bulan atau 60 hari kerja Inspektoral wajib melaporkan temuan tersebut kepada penegak hukum. Namun, setelah 5 bulan berlalu tidak ada tindak lanjut dari Inspektoral Kota Denpasar. "Karena tidak ada tindak lanjut dari Inspektoral maka kami berinisiatif melaporkannya ke Kejati Bali," jelas Mardika saat itu. rez

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 5



# Tunjangan Purna Bakti Dewan Badung Enam Kali Gaji

MANGUPURA, NusaBali

Anggota DPRD Kabupaten Badung akan memasuki masa purna bakti pada 4 Agustus 2019 mendatang. Sebagai bentuk pengabdian tiap-tiap anggota dewan akan mendapatkan tunjangan purna bakti, dengan besaran disesuaikan tugas masing-masing.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing anggota dewan akan mendapatkan enam kali uang representasi. Namun, besaran dana purna bakti ini ada sedikit perbedaan antara pimpinan dan anggota.

Jabatan ketua DPRD uang representasi sebesar Rp 2.100.000, atau uang purna bakti 6 x Rp 2.100.000 yakni sebesar Rp 12.600.000. Jabatan wakil ketua DPRD

memperoleh uang representasi Rp 1.860.000, sehingga dana purna bakti untuk wakil ketua DPRD sebesar Rp 11.160.000, atau dengan kalkulasi 6 x Rp 1.860.000. Sedangkan, untuk besaran uang representasi anggota DPRD dihitung Rp 1.575.000,00, sehingga para anggota DPRD Badung yang jumlahnya 37 orang masing-masing akan mendapatkan dana purna bakti sebesar Rp 9.450.000,

atau 6 x Rp.1575.000.

Secara keseluruhan besaran dana purna bakti yang dialokasikan untuk 40 anggota DPRD Badung mencapai Rp 358 juta.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Badung I Nyoman Predangga yang dikonfirmasi, Selasa (18/6), membenarkan bahwa anggota DPRD Badung periode 2014-2019 yang akan mengakhiri masa jabatan per 4 Agustus 2019 akan mendapat

dana purna bakti. Pemberian tunjangan purna bakti sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017. "Pemberian dana purna bakti ini berlaku seluruh Indonesia," ujarnya.

Mengenai besaran dana purna bakti, besarnya enam kali uang representasi. Dana ini lanjut dia, akan diberikan setelah masa jabatan anggota dewan berakhir. Artinya, bila masa jabatan berakhir 4 Agustus maka di bulan itu juga dana

purna bakti sudah cair. "Anggaran sudah ada. Untuk pemberian masih direncanakan, biar tidak menyalahi aturan. Tapi, sesuai ketentuan begitu masa jabatan berakhir sudah bisa diberikan," kata Predangga.

Selanjutnya mengenai rencana pelantikan anggota DPRD baru periode 2019-2024, Predangga menyebut masih menunggu petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badung serta Surat Keputusan

(SK) Gubernur Bali. Sebelum ada SK Gubernur, pelantikan belum bisa dilakukan.

Bagi calon legislatif terpilih periode 2019-2024 sudah dilakukan pengukuran baju untuk acara pelantikan. Masing-masing anggota dijatah seragam pelantikan seharga Rp 5 juta. Bahkan, anggota dewan baru ini juga tengah disiapkan 2 buah lencana emas 22 karat dengan masing-masing sebesar 5 gram dan 10 gram. **asa**

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 2



## Telan Dana Rp 400 Juta ✓

**SEBANYAK** 40 anggota DPRD Gianyar terpilih periode 2019-2024, mendatangi Sekretariat DPRD Gianyar, Selasa (18/6). Mereka melakukan sesi 'nyikut baju', untuk dikenakan saat menjabat nanti. Selain mendapatkan seragam, anggota dewan juga akan mendapatkan pin emas, yang harganya terpasang Rp 400 juta.

Pantauan *Tribun Bali*, suasana pengukuran seragam yang dilakukan para calon DPRD Gianyar yang baru ini relatif menarik. Para calon yang baru pertama kali terpilih, terlihat malu-malu saat memasuki gedung dewan. Sementara calon incumbent, menunjukkan senioritas. Bahkan ada yang tervesan saklek. Namun di balik hal itu, suasana 'sedih' juga terjadi di pojokan-pojokan kursi di sudut gedung DPRD Gianyar. Mereka yang tak terpilih lagi, hanya melihat acara 'nyikut' baju tersebut dengan pandangan kosong.

Sekretaris DPRD Gianyar, Wayan Arthana mengatakan, pengukuran seragam dewan baru ini relatif awal. Itu karena proses penjahitan membutuhkan waktu yang relatif lama. Seragam yang akan dibuat, sebanyak empat buah, meliputi pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), dan pakaian full dress.

Terkait pin emas yang nantinya akan dsematkan di dada para dewan, Arthana mengatakan, pihaknya menganggarkan Rp 10 juta per biji. Namun berapa harga pin emas tersebut, Arthana belum mengetahui. "Harga emas itu kan terus berubah-ubah, bahkan tiap detik. Karena itu kami anggarkan Rp 10 juta per biji, belum dipotong pajak dan lain-lain," ujarnya. (weg)

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 8



# Rumah Dinas Bupati Dianggarkan Rp 11,5 M

**Kenapa anggaran rumah dinas bupati sampai Rp 11,5 miliar, Sekda Wisnu Wijaya mengarahkan agar ditanya ke Dinas PUPR.**

GIANYAR, NusaBali

Pemkab Gianyar akan membangun rumah jabatan untuk Bupati Gianyar I Made Agus Mahayatra dengan APBD 2019 senilai Rp 11,5 miliar. Pembangunan rumah jabatan berlantai II dengan anggaran fantastis ini berlokasi sekitar 4,5 kilometer arah timur Kantor Bupati Gianyar, tepatnya di Banjar Peteluan, Desa Temesi, Gianyar, atau eks Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar.

Rencana pembangunan rumah dinas untuk Bupati Gianyar ini dibenarkan oleh Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, saat dikonfirmasi Selasa (25/6) kemarin. Namun Wisnu Wijaya

enggan berkomentar detail rencana proyek ini. "Ya ada. Tapi itu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Gianyar, yang lebih tahu," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan rumah dinas termasuk Rumah Dinas Bupati Gianyar ini sudah menjadi kewajiban dari eksekutif. Karena rumah dinas sebelumnya sudah dijadikan areal perkantoran. Selama ini Bupati Gianyar tidak punya rumah dinas sehingga tinggal di kediamannya di Denpasar. "Karena memang kami ingin untuk koordinasi dengan Bupati agar lebih cepat dan pelaporan cepat. Kan gitu. Sedangkan saat ini beliau (Bupati Mahayatra) masih tinggal di Denpasar," katanya.

Diketahui, rumah dinas baru untuk Bupati Gianyar itu akan dibangun di eks Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gianyar, memiliki luas sekitar 19 are. Kantor Disnaker sudah dipindah ke tempat lain. Diketahui pula lahan tersebut sebenarnya merupakan aset Pemprov Bali Bali yang dipinjamkan ke Pemkab Gianyar.

Kenapa anggaran rumah dinas bupati sampai Rp 11,5 miliar, Sekda Wisnu Wijaya mengarah-

kan agar ditanya ke Dinas PUPR. "Anggarannya cukup besar, tanyakan saja ke PUPR. Kalau tidak salah, sekarang rumah dinas ini masih tahap perencanaan, mudah mudahan bisa selesai tahun ini," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kadis PUPR Gianyar I Wayan Karya mengatakan, anggaran Rp 11,5 miliar untuk pembangunan rumah dinas Bupati Gianyar sudah dianggarkan pada APBD 2019. Rumah mewah itu dikatakan akan dibangun dengan lantai dua. Realisasi proyek ini masih dalam tahap perencanaan. "Itu sedang perencanaan," terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Asisten III Sekda Gianyar I Wayan Sudamia. Bahwa Kantor Disnaker Gianyar yang lama, status tanahnya merupakan aset Pemprov Bali yang dipinjamkan kepada Pemkab Gianyar. Menurut dia, luas tanah tersebut sekitar 19 are. "Pembuatan rumah dinas bupati tahun 2019 ini baru tahap perencanaan, 2020 baru pelaksanaan. Rumah dinas itu wajib. Luasnya sekitar 19 are, biar ada halaman, karena pak bupati sangat suka ada kebun, beliau suka kalau di halaman ada pohon besar," ujarnya. **nv**

Edisi : Rabu, 26 Juni 2019

Hal : 6



## Bupati Eka Tolak Mobil Dinas ✓

TABANAN, NusaBali

Rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Alphard untuk Bupati Tabanan tahun 2019, ditanggapi langsung oleh Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Dia menolak pengadaan tersebut dari awal karena akan menjadi beban APBD Tabanan.

"Saya berterimakasih ada perhatiannya. Tetapi saya rasa tidak perlu saat ini, karena saya juga akan selesai menjabat," ujarnya di sela-sela menghadiri gebyar pajak di Gedung I Ketut Maria, Jumat (14/6).

Menurut Bupati Eka, pengadaan mobil dinas bagi pimpinan daerah memang wajar. Dan, wakil bupati pun sudah lebih dahulu menganggarkan mobil dinasnya tahun 2018 dengan jenis mobil Alphard. Pengadaan mobil dinas bupati memang benar dianggarkan tahun 2019, sesuai ketentuan Protokol Pimpinan Daerah, karena merupakan sarana penunjang operasional kedinasan. Namun secara pribadi dirinya tidak menginginkan pengadaan tersebut karena menjadi beban APBD dan sudah tidak pas mengingat sekarang masa jabatan Bupati Tabanan segera usai. Disamping itu, selama ini Bupati Eka sudah terbiasa memakai mobil pribadi untuk kegiatan pribadi maupun kedinasan. "Sampai saat ini saya belum terlalu memerlukan mobil dinas. Jadi, tolong jangan terlalu dibesar-besarkan," ungkapnya.

Bupati Eka berharap anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut bisa digunakan untuk program pembangunan lainnya. Bupati Eka juga menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang peduli dengan Pemkab Tabanan. Menurutnya, hal ini salah satu bentuk keterbukaan publik dalam kecintaan kita terhadap daerah. "Mari selalu terus berbenah di segala bidang. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang peduli terhadap roda pemerintahan di Kabupaten Tabanan," ujarnya.

Ditekankan oleh Bupati Eka, di sisa akhir masa jabatannya dia ingin fokus dan meninggalkan kesan baik untuk dapat



Ni Putu Eka Wiryastuti

menjadi inspirasi serta meninggalkan sejarah bermanfaat bagi Tabanan. Dia juga menghimbau seluruh masyarakat Tabanan agar berpilar kritis, namun bisa dipertanggungjawabkan.

"Mari kedepankan rasa memiliki dan persatuan. Di sisa akhir masa jabatan, saya ingin menyelesaikan segala 'pekerjaan rumah' program yg masih perlu dipikirkan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus kita selesaikan bersama-sama oleh seluruh element masyarakat," tandasnya.

Seperti berita sebelumnya, berdasarkan daftar lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Tabanan, pengadaan mobil tersebut masuk nama paket Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Dimana pagu yang bersumber dari APBD itu mencapai Rp 1.943.350.000 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1.853.600.000. Proses lelang yang batas pendaftarannya sampai tanggal 17 Juni 2018 tersebut masih tahap pasca kualifikasi. @ des



## Dukung Karya Pitra Yadnya Banjar Adat Bangkiangsidem, Penarungan Mengwi ✓ Bupati Giri Prasta Serahkan Bantuan Rp 300 Juta

MANGUPURA, NusaBali

Krama Banjar Adat Bangkiangsidem Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kamis (13/6) lalu menggelar upacara pitra yadnya, nyekah bersama dirangkaikan dengan upacara manusa yadnya, mesangih, metelubulan, mepetik dan sapuleger yang diselenggarakan di balai banjar setempat.

Upacara tersebut dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Kabag Humas Putu Ngurah Thomas Yuniarta, Camat Mengwi I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra beserta unsur Tripika Kecamatan, Perbekel Penarungan Ni Wayan Kerni. Hadir pula tokoh masyarakat I Bagus Alit Sucipta, IGN Kusuma Kalakan, dan Made Yudana, Bendesa Adat Penarungan I Made Widiada, Manggala Adat dan Dinas se-Desa Penarungan.

Dalam kesempatan ini Bupati Giri Prasta menyerahkan secara simbolis bantuan pemerintah Kabupaten Badung untuk karya pitra yadnya dan manusa yadnya sebesar Rp 300 juta serta dana hibah Rp 1,5 miliar untuk pembangunan balai banjar dan hibah bantuan seperangkat gong sebesar Rp 268 juta.

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya menyampaikan rasa senang dan bahagia karena krama Banjar Adat Bangkiangsidem bisa bersatu untuk melaksanakan upacara pitra yadnya nyekah bersama. Dikatakan pihaknya selaku Pemerintah Kabupaten Badung akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kesempatan ini memfasilitasi upacara nyekah bersama di Banjar Adat Bangkiangsidem. "Semoga



Bupati Giri Prasta menyerahkan bantuan kepada Krama Banjar Adat Bangkiangsidem Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kamis (13/6).

upacara pitra yadnya dan manusa yadnya ini berjalan lancar sidadaningdon labdakarya nyujur krama Banjar Adat Bangkiangsidem gemah ripah lohjinawi," harapnya.

Mehurut Bupati, dukungan pemerintah dalam upacara nyekah secara bersama ini merupakan wujud perhatian dan kehadiran Pemerintah Kabupaten Badung dalam meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah banjar untuk melunasi kewajiban sekala dan niskala kepada leluhur melalui upacara yadnya ini. "Karena di Bali yang pertama kita mengenal tentang dharmaaning leluhur, yang kedua dharmaaning agama dan yang ketiga dharmaaning negara. Melalui pelaksanaan karya Pitra yadnya ini masyarakat telah melaksanakan dharmaaning terhadap leluhur," ujar Bupati Giri Prasta.

Selain itu diharapkannya juga

melalui karya pitra yadnya ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar krama wimuda, winata dan wiwerda (anak-anak, sekala teruna dan orang tua) harus bersatu. "Karena dengan bersatu berarti setengah perjuangan sudah berhasil, sebaliknya kalau masyarakat tidak bersatu maka setengah perjuangan akan gagal. Dengan bersatu apapun pembangunan yang dilaksanakan akan berhasil," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Giri Prasta juga mengharapkan agar upacara ini dilaksanakan sesuai dengan sastra Agama Hindu. Didalam upacara pitra yadnya umat Hindu mempercayai tentang reinkarnasi atau terahir kembali. Kaitannya dengan upacara nyekah Bupati menjelaskan tentang tata cara saat ngelinggihan sang hyang pitara di

kemulan merajan dengan konsep adu muka. "Konsep adu muka merupakan tata cara yang benar pada saat upacara ngelinggihan sang hyang pitara di kemulan merajan, dimana posisi kita saat ngelinggihan berhadapan dengan pelinggih kemulan. Disisi kiri posisi kita (utara) merupakan tempat linggih sang hyang pitara istri (perempuan) dan disisi kanan posisi kita (selatan) adalah linggih sang hyang pitara lanang (laki-laki), sedangkan di posisi tengah merupakan linggih siwa guru," terangnya.

Sementara, Manggala Karya I Ketut Dibia melaporkan rangkaian karya telah dimulai sejak tanggal 2 Juni 2019 dengan upacara atur piuning karya. Puncak karya pitra yadnya berlangsung pada Buda Pon Tolu, tanggal 12 Juni 2019 kemarin dilanjutkan dengan upacara manusa yadnya pada hari ini tanggal 13 Juni 2019, sedangkan nyegara gunung akan dilaksanakan pada hari berikutnya. Upacara ini merupakan program rutin yang diadakan setiap 5 tahun sesuai perarem krama Banjar Adat Bangkiangsidem, tahun ini diikuti peserta nyekah sebanyak 13 peserta, mesangih 23 peserta, metelubulan diikuti oleh 4 peserta dan sapuleger 1 peserta.

"Dengan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bapak Bupati, kami sebagai krama Banjar Adat Bangkiangsidem merasa sangat terbantu sekali. Semua pembiayaan untuk karya ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung. Kami masyarakat hanya melaksanakan ayah-ayah saja," ujarnya. @asa



## Pencairan Anggaran PKB Buleleng Tunggu Bupati ✓

SINGARAJA, Nusabali

Ratusan seniman Buleleng yang akan tampil di Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-41 Provinsi Bali sampai saat ini masih menunggu pencairan biaya yang akan dipakai selama pementasan. Pencairan anggaran itu kini masih menunggu tanda tangan (TTD) Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan dipastikan sudah dapat direalisasikan pekan depan.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Gede Komang menjamin seluruh seniman Buleleng dipastikan 'mebel' saat berangkat ke Denpasar. Bahkan beberapa kesenian yang dijadwalkan tampil sejak tanggal 15-16

Juni, biaya pementasan mereka sudah dicairkan lebih awal. "Untuk dana PKB besok dan lusa sudah cair, sedangkan sisanya sedang diproses TU, Senin nanti diajukan ke Bupati untuk dimintakan tanda tangan, sehingga Selasa depan bisa diproses dan Rabu sudah bisa didistribusikan," kata Gede Komang.

Kontingen Buleleng diperkuat ratusan senimannya akan mengikuti 16 jenis kegiatan dalam PKB Bali ke-41. Seluruhnya disebut menghabiskan anggaran dengan total Rp 990 juta bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Proses pencairan memang sedikit lambat lantaran Dinas Kebudayaan

haris memenuhi beberapa persyaratan pencairan dana tersebut. "Masalah anggaran sudah tidak ada masalah dan kami pastikan semua seniman Buleleng nanti mebel ke PKB," ucap Gede Komang.

Selama sebulan penuh, Buleleng mengikuti 16 jenis kegiatan. Buleleng terpaksa absen di empat kegiatan. Delapan kegiatan yang dimaksudkan yakni kesenian tembang girang atau arja negak, drama gog klasik era 70-an, kesenian kolosal, dan kesenian hasil rekonstruksi.

Absennya Buleleng di sejumlah kegiatan PKB itu dikarenakan memang seniman di bidang tersebut

sangat minim. Meski ada beberapa seperti kesenian Arja, pemainnya tak memenuhi jumlah minimal yang ditetapkan oleh panitia provinsi. Selain itu yang menjadi penyebab lain karena keterbatasan anggaran, sehingga ada beberapa kesenian yang melibatkan seniman banyak seperti kesenian kolosal dan rekonstruksi belum dapat ditampilkan.

"Ke depan ini yang perlu menjadi pemikiran semua. Sehingga targetnya minimal kita mengikuti item kegiatan provinsi bisa 100 persen. Sekarang 2019 kemampuan daerah belum begitu besar beri daya dukung di Dinas Kebudayaan," jelas dia. **k23**



## Diusulkan, Rp 50 Juta Biaya Audit Keuangan PDNKK

SEMARAPURA, NusaBali

Keuangan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) milik Pemkab Klungkung, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali. Karena hasil audit yang dilakukan Inspektorat Daerah (Irda) Klungkung terhadap keuangan perusahaan ini meragukan.

Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018, BPK merekomendasikan untuk dilakukan audit independen dari Kantor Akuntan Publik. Guna menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemkab Klungkung akan segera menganggarkan biaya untuk audit dari Akuntan Publik. Plt Direktur PDNKK Klungkung I Wayan Ardiasa, yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Klungkung I Wayan Ardiasa, mengatakan sudah menyiapkan surat untuk kepada akuntan publik untuk dilakukan audit untuk memeriksa aset dan usaha di PDNKK. "Kami rencananya akan usulkan anggaran untuk audit PDNKK ini Rp 50 juta" ujar Ardiasa, Jumat (21/6).

Ardiasa yang baru menjabat Plt PDNKK sejak sebulan ini, mengaku sempat mengecek ke Kantor PDNKK, namun sudah tidak ada operasional. Kata dia, para pegawainya sudah tidak ada, namun mesin foto copy, brankas, mobil dan lainnya masih berada pada tempatnya. "Saat saya ke sana sudah tidak ada orang," kata Ardiasa.

Apapun hasil auditnya nanti, jelas dia, tentu akan dikoordinasikan dengan mantan Direktur PDNKK I Wayan Sukadana.

Mengingat dalam masa audit 2018, yang bersangkutan masih menjabat. Sementara itu, laporan keuangan PDNKK kurang diyakini andal karena tidak menyajikan informasi akurat dan belum pernah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Tahun 2018 operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri. Namun masih diwajibkan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018, namun tidak balance. Segala bentuk pertanggungjawaban bidang keuangan perusahaan masih menjadi tanggungjawab direksi. "Menegenai audit dari keuangan PDNKK, Pemkab akan menganggarkan agar diaudit dari Kantor Akuntan Publik," ujar Sekda Klungkung Gede Putu Winastra, belum lama ini.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta juga sudah memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai PDNKK di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung pada Sabtu (10/11/2018), mengingat PDNKK sedang mengalami permasalahan keuangan yang menyebabkan pegawainya tidak dibayar dari mulai sejak April 2018. Hutang gaji itu terjadi karena cashflow atau perputaran uang perusahaan yang sangat lambat. Bupati Suwirta memberikan pilihan kepada pegawai jika ingin bertahan, silahkan bertahan dan para pegawai diperbolehkan jika ingin mengundurkan diri dari PDNKK dan Pemkab Klungkung masih akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. **wan**

Edisi : Sabtu, 22 Juni 2019

Hal : 6



## Pertanggungjawaban Bupati Diterima ✓ Torehkan SILPA Rp 56,475 Miliar



SIDANG paripurna pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.

SINGARAJA, NusaBali

Pertanggungjawaban Bupati Buleleng atas pelaksanaan APBD tahun 2018, resmi diterima oleh DPRD Buleleng. Ini ditandai dengan disahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, melalui sidang paripurna, Jumat (21/6) pagi di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Pengesahan Perda Pertanggungjawaban Bupati tersebut, setelah seluruh fraksi (PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura dan NasDem) dapat menerima pertanggungjawaban tersebut, sehari sebelumnya, Kamis (20/6). "Melalui pendapat akhir

fraksi-fraksi telah menyatakan kesepakatan terhadap materi yang tertuang dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, disertai sejumlah saran dan masukan. Harapan kami, kerja sama yang baik ini perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pengabdian kita serta meningkatkan prestasi individu dan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng di masa mendatang," kata juru bicara Badan Anggaran DPRD Buleleng, Wayan Masdana.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 tercatat, realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2018 sebesar Rp 2.052.836.000.659, sedangkan realisasi belanja dan transfer

Rp 2.064.477.377.258, sehingga defisit yang dihasilkan Rp 11.641.376.599.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 68.117.090.827, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan atas sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp 93.843.090.827, dan pengeluaran pembiayaan Rp 25.726.000.000. Dari perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan netto tersebut, tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun 2018 sebesar Rp 56.475.714.227, dengan rincian saldo kas di Kas Daerah Rp 23.564.949.732, Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 92.234.716, Kas di Bendahara Penerimaan Rp 94.320.516, Kas BLUD RSUD Rp 5.979.298.574, Kas Lainnya Rp 374.489, dan Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp 22.155.736.236, dan Saldo Kas Lain yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah Rp 4.588.826.961.

Untuk komposisi Aset, Kewajiban dan Kelayaan bersih yang tertuang dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2018, meliputi, jumlah Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng tercatat senilai Rp 2.391.575.544.908, dengan jumlah Kewajiban senilai Rp 12.501.315.690, jumlah Kelayaan Bersih sebesar Rp 2.379.074.229.218. "Selanjutnya terhadap hal-hal yang belum bisa kita wujudkan dalam tahun anggaran 2018, kami akan berikan perhatian yang serius untuk ditangani serta diperbaiki pada masa yang akan datang," kata Bupati Agus Suradnyana. **■ k19**

Edisi : Sabtu, 22 Juni 2019

Hal : 4



## Bawaslu Bali Selidiki Manipulasi LPPDK Dr Somvir Saksi Ngaku Digelontor Rp 500.000

DENPASAR, NusaBali  
Bawaslu Bali panggil pelapor dan saksi-saksi kasus dugaan manipulasi data Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) caleg terpilih DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, Dr Somvir, Jumat (28/6). Terungkap, salah seorang saksi, Komang Edi Arta Wijaya alias Dewa Jack, 36, mengaku pernah



Bersambung ke Hal-15 Kolom 5 Pelapor Gede Suardana diperiksa Bawaslu terkait kasus Dr Somvir, Jumat (28/6).

## Saksi Ngaku Digelontor Rp 500.000 ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

digelontor Dr Somvir uang Rp 500.000 untuk cari suara.

Pelapor Gede Suardana, 50, yang notabene Ketua Dewan Pembina Forum Peduli Masyarakat Kecil Buleleng, hadir penuh panggilan Bawaslu Bali di Denpasar, Jumat kemarin, bersama dua saksi. Mereka masing-masing Dewa Jack (saksi asal Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng) dan Nyoman Redana, 60 (asal Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng).

Gede Suardana selaku pelapor, melengkapi bukti-bukti dan keterangannya terkait dengan manipulasi LPPDK Dr Somvir hingga nilainya nol. Sedangkan saksi Dewa Jack dan Nyoman Redana membawa bukti pencetakan alat peraga kampanye Dr Somvir. Dewa Jack menyodorkan bukti alat peraga kampanye Dr Somvir yang pernah dibawa ke salah satu saksi lainnya, Karel, warga Desa Kaliuntu, Kecamatan Buleleng.

Alat peraga tersebut juga ada bukti tempat dan perusahaan jasa pencetaknya. "Saya sendiri pernah bawa alat peraga kampanye Dr Somvir," ujar Dewa

Jack sebelum diminta keterangan di ruang sidang Bawaslu Bali, Jalan Muh Yamin Niti Mandala Denpasar, Jumat kemarin.

Bukti yang dibawa saksi Dewa Jack menunjukkan Dr Somvir mustahil tidak menggunakan biaya saat kampanye Pileg 2019. Dewa Jack sendiri mengaku pernah diberi uang Rp 500.000 oleh Dr Somvir untuk kompensasi mendapatkan suara di Pileg 2019. "Uang tersebut sebagai uang muka untuk mencari suara dengan harga per kepala Rp 100.000," ungkap Dewa Jack.

Sedangkan pelapor Gede Suardana kemarin menyodorkan barang bukti berupa brosur alat peraga kampanye Dr Somvir, yang dipesan di Singaraja Letter, 12 Februari 2019. "Balih dan brosur-brosur yang dibuat, ada buktinya. Pemesanannya juga ada buktinya. Kalau itu sumbangan atau pembelian, harusnya dalam LPPDK karada nilainya. Tapi, ini kok LPPDK-nya kok nol?" ujar aktivis anti korupsi asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini usai pemeriksaan di Bawaslu kemarin.

Suardana semakin yakin

kalau Dr Somvir keluaran banyak biaya di Pileg 2019. Termasuk ketika membagikan uang Rp 5 juta yang kini diusut DKPP terkasit kasus money politics. Suardana yakin Bawaslu Bali akan bekerja maksimal dengan bukti yang membuat kasus Dr Somvir terang benderang.

Sementara itu, Kordiv Pendindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Bali, Wayan Wirka, mengatakan bahwa proses klarifikasi tidak bisa dipublikasikan. Alasannya, karena prosesnya sedang berjalan. "Kami belum bisa publikasikan. Nanti masih ada pihak terkait akan kami klarifikasi. Salah satunya, KPU Bali," tandas Wayan Wirka se usai minta keterangan pelapor Suardana dan dua saksi terkait kasus manipulasi LPPDK Dr Somvir, Jumat kemarin.

Menurut Wirka, tidak menutup kemungkinan nanti Bawaslu Bali akan memanggil juga DPW NasDem Bali terkait kasus ini. "Yang jelas nanti akan ada pemanggilan pihak-pihak terkait. Rencananya, Selasa depan (2 Juli 2019) kita agendakan klarifikasi," kata mantan anggota Panwaslu Tabanan ini. **nat**

Edisi : Sabtu, 29 Juni 2019

Hal : 1 & 15



## Denpasar Inflasi 0,22%, Singaraja 0,28%

DENPASAR, NusaBali

Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar inflasi sebesar 0,22 persen pada Mei lalu. Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Mei 2019 antara lain: biaya pemeliharaan/servis kendaraan; tarif angkutan antar kota; air kemasan, jeruk, pepaya, dan cabai merah. Kepala BPS Provinsi Bali Adi Nugroho menjelaskan, Senin (10/6).

Dikatakan ada lima kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi secara month to month (m to m) yakni kelompok VII yang meliputi transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, sebesar 0,89 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau) sebesar 0,53 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,15 persen; serta

kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar) sebesar 0,09 persen.

"Dua kelompok tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok I bahan makanan sebesar -0,44 persen serta kelompok sandang sebesar -0,01 persen," jelas Adi Nugroho.

Inflasi di kota Denpasar berada di urutan ke-76 dari 81 kota di Indonesia yang mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di kota Tual, Maluku dengan besar inflasi 2,91 persen. Sedang terendah adalah Kediri, Jawa Timur dengan tingkat inflasi 0,05 persen.

Inflasi juga tercatat di kota Singaraja pada Mei lalu, sebesar 0,28 persen. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan indeks enam kelompok pengeluaran. Di antaranya kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,89 persen; kelompok bahan makanan sebesar 0,59 persen; kelompok

sandang sebesar 0,25 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,09 persen serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,01 persen.

Sedangkan kelompok yang tercatat mengalami penurunan indeks atau deflasi adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar -0,13 persen. Dijelaskan Adi Nugroho, komoditas yang memberikan andil atau sumbangan inflasi pada bulan Mei 2019 antara lain: bawang merah, angglutan antar kota, daging ayam ras, apel, bawang putih, pisang, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, bayam, sawi hijau, tarif parkir, buncis dan jeruk. Singaraja menempati urutan ke-73 dari 81 kota yang mengalami inflasi. Kata Adi Nugroho, inflasi di Denpasar dan Singaraja, masih terkendali. **k17**

Edisi : Selasa, 11 Juni 2019

Hal : 10



# Puluhan Hotel dan Restoran Lolos Bayar Pajak

## ★ Jadi Temuan BPK RI

**Kewajiban bayar pajak tidak dilakukan karena hotel maupun restoran dimaksud belum ditetapkan sebagai wajib pajak.**

SINGARAJA, NusaBali

Puluhan hotel dan restoran diketahui tidak pernah membayar pajak, menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, atas pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2018. Menariknya, puluhan hotel dan restoran itu tidak membayar pajak karena Pemkab Buleleng tidak menetapkan sebagai wajib pajak (WP).

Data dihimpun, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), BPK RI mencatat ada 641 hotel yang semestinya dipungut pajak. Namun dari jumlah itu, sebanyak 29 hotel tidak dipungut pajak karena belum ditetapkan sebagai WP, sehingga hotel tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Kondisi yang sama juga terjadi di pajak restoran. Dari 424 restoran, 13 restoran belum

ditetapkan sebagai WP sehingga pajaknya tidak bisa dipungut, karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). "Ini kok aneh, bagaimana bisa mendapatkan izin operasional. Padahal salah satu syarat pengajuan izin itu harus ada NPWP. Ini salahnya dimana, OPD yang mengurus izinya, atau OPD yang mengurus perpajakan. Atau apakah hotel dan restoran ini memang belum memiliki izin atau bagaimana," kata Ketua Komisi I DPRD Buleleng Putu Mangku Mertayasa, dalam pembahasan hasil audit BPK RI terhadap APBD 2018, Senin (10/6) pagi, di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja.

Pembahasan hasil audit BPK RI kemarin melibatkan gabungan komisi dengan tim ahli DPRD Buleleng. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Dari pembahasan tersebut terungkap pula, akibat pajak yang tidak dipungut dari 29 hotel dan 13 restoran tersebut, berpengaruh pada target Pendapatan Asli Daerah. Disebutkan, target PAD pada tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 376.365.727.547, namun realisasinya hanya sebesar Rp 335.555.493.392, atau 89,6 persen.

Melesetnya capaian target PAD, juga dipengaruhi oleh tidak intensifnya penagihan piutang pajak daerah. Terbukti piutang pajak daerah meningkat dari sebesar Rp 71.068.387.425,73 menjadi Rp 75.992.872.760,77 atau terjadi kenaikan sebesar

Rp 4.924.485.335,04 atau 6,93 persen. Tercatat, tunggakan paling tinggi dari piutang PBB sebesar Rp 71.369.360.639,64, kemudian piutang pajak hotel Rp 2.196.286.663,14, dan piutang pajak restoran Rp 1.495.847.039,93, dan piutang pajak air tanah Rp 805.064.160.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supit usai memimpin rapat mengaku telah menyusun jadwal untuk membahas lebih lanjut temuan tersebut dengan eksekutif. "Kita akan bahas ini bersama-sama dengan eksekutif. Karena ini temuan memang harus diakui dan dilaksanakan oleh eksekutif untuk perbaikan. Sehingga dalam Pemeriksaan tahun anggaran selanjutnya tidak muncul lagi temuan yang sama," tegasnya.

Sementara terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Putu Artawan menyebut, pihaknya tidak memiliki data terkait dengan hotel dan restoran yang belum memiliki izin. Selama ini, tupoksi BPMPTSP Buleleng hanya memberikan pelayanan secara administrasi untuk pengurusan izin. "Kalau kami, sifatnya siaga yang memohon izin, kami lakukan kajian dan pengecekan ke lapangan, jika memenuhi syarat izin kami keluarkan. Mengenai data hotel dan restoran yang tidak memiliki izin bukan kami ranahnya, mungkin di Tim Yustisi, dan masalah apakah mereka sudah terdaftar (WP, red) ada di BKD," jelasnya. **■ k19**

Edisi : Selasa, 11 Juni 2019

Hal : 12



# Bansos 2018 Jadi Temuan BPK

SEMARAPURA, NusaBali  
Anggota DPRD Klungkung dan Pemkab Klungkung menggelar Sidang Paripurna terkait rekomendasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2018. Dalam LHP BPK ini terungkap dana bansos (bantuan sosial) dan sistem laporan keuangan PDNKK (Pe-

rusahaan Daerah Nusa Kerta Kosala) jadi temuan. Rapat Paripurna ini digelar di gedung DPRD Klungkung, Senin (17/6) pagi, dipimpin Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, dihadiri anggota DPRD. Dari eksekutif hadir, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta. Dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD

Klungkung I Nengah Aryanta membacakan rekomendasi dewan terhadap LHP BPK 2018. Dia menyebutkan adanya temuan BPK terkait dengan kepatuhan yakni 18 kelompok masyarakat penerima hibah secara totalitas Rp 691,50 juta, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana, pada saat

uji petik dilaksanakan. Selain itu, ditemukan adanya keterlambatan penyampaian LPJ dana hibah yang melebihi batas waktu 10 Januari 2019. Ditemukan pula 11 penerima bantuan sosial dari 153 penerima bansos 2018, belum menyampaikan LPJ penggunaan dana senilai Rp 165 juta.

Sehingga keadaan ini mengakibatkan adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, khususnya Perbup Nomor 30 Tahun 2016 tentang pedoman pemberitan hibah dan bantuan sosial.

Aryanta meminta bupati menindaklanjuti temuan itu serta memerintahkan kepada BPKPD agar lebih intensif dalam menagih LPJ penggunaan dana hibah maupun dana bansos sesuai rekomendasi BPK. Selain itu, meninjau kembali Perbup 30 Tahun 2016 khususnya terkait limit akhir penyampaian LPJ. "Hibah

berupa uang yang bersumber dari APBD Perubahan, tidaklah mungkin dapat dipenuhi per 10 Januari tahun berikutnya," ujarnya. Terlebih NPAD terbit pada bulan Desember tahun berkenaan.

Kemudian, jelas dia, eksekutif agar mengkonsultasikan ke BPK Perwakilan Bali terkait rekomendasi BPK yang mensyaratkan adanya desain/gambar yang harus dilampirkan oleh kelompok masyarakat dalam pengajuan proposal bansos. Kalau pun hal ini wajib, namun desain bangunan tersebut hendaknya dibuat secara sederhana, tidak seperti RKS (rencana kerja dan syarat teknis) pada kegiatan proyek yang ditenderkan pemerintah.

Sementara itu, laporan keuangan PDNKK (Perusahaan Daerah Nusa Kerta Kosala) kurang diyakini andal. Karena laporan tidak menyajikan informasi akurat dan belum pernah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2018 operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri. Namun masih diwajibkan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018 dengan posisi tidak balance. Sebagai entitas akuntansi segala pertanggungjawaban bidang keuangan perusahaan ada pada pihak direksi.

DPRD juga memberikan apresiasi kepada Bupati Klungkung beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. "Agar saudara Bupati beserta seluruh jajarannya segera menindaklanjuti temuan hasil BPK," ujarnya.

Sekda Klungkung Gde Putu Wirastra mengatakan, terkait keterlambatan pengumpulan LPJ hibah dan bansos dari ke-

lompok masyarakat, yang menjadi catatan BPK tersebut, sudah bisa diselesaikan sebelum batas waktu maksimal selama 60 hari sejak pemeriksaan BPK tersebut. Sesuai Perbup harus sudah dikumpulkan per 10 Januari, namun saat dihitung pemeriksaan dari BPK per 24 Mei 2019, ada yang belum nyetor LPJ. "Semua penerima hibah dan bansos yang terlambat mengumpulkan LPJ, sudah nyetor semuanya," ujar Sekda.

Kata Sekda untuk keterlambatan itu, mungkin karena keterlambatan pengerjaan pembangunan. Mengenai Perbup tentang hibah dan bansos tersebut juga akan dikaji lagi. Terkait audit keuangan PDNKK, Pemkab akan ganggarkan untuk dilakukan audit dari Akuntan Publik. "Kami sudah melakukan audit dari Irda (Inspektorat Daerah), namun belum dari Akuntan Publik," katanya. @ wan

Edisi : Selasa, 18 Juni

Hal : 6



## Proyek Pemasangan Kabel di Jalan Darmawangsa, Nusa Dua Bekas Galian Belum Diperbaiki, PUPR Ancam Tutup Paksa

MANGUPURA, NusaBali

Proyek pemasangan kabel bawah tanah di sepanjang ruas Jalan Darmawangsa, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Padahal, pengerjaan proyek tersebut memicu berbagai persoalan seperti kemacetan dan jalan menjadi rusak. Pihak pengelola proyek juga belum melakukan pengaspalan jalan bekas galian. Atas hal itu, Dinas PUPR Badung menperingatkan alias mewarung pengelola, bahkan akan menutup paksa pekerjaan itu.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, Ito Bagus Surya Suamba, menjelaskan pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat dan pengguna jalan atas ketidakny-

amanan dari proyek pengerjaan kabel bawah tanah tersebut. Menyikapi hal itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengelola agar segera merampungkan pengerjaan dan memperbaiki aspal yang bancur akibat galian. Namun, koordinasi yang dilakukan selama sebulan belakangan ini tidak mendapat respons yang bagus. Sehingga Dinas PUPR kemudian melayangkan dua kali surat peringatan. "Jadi kondisi di lapangan memang sangat miris. Kami coba koordinasi, tapi tidak direspons. Ya, terpaksa kami layangkan surat peringatan pertama dan kedua pada bulan Mei lalu," ungkap Surya Suamba saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (17/6) siang.

Surya Suamba menegaskan, setelah melayangkan peringatan, pihak pengelola bersurat ke PUPR

dan mengaku akan segera merampungkan pengerjaan pada 10 Juni lalu. Namun, sampai saat ini janji itu tidak ditepati dan jalanan masih dalam kondisi rusak. Karena tidak adanya sikap baik, pihak PUPR rencananya akan melakukan penutupan paksa pengerjaan itu jika tidak diselesaikan dan dilakukan proses pengaspalan dua hari ke depan. Surya Suamba menggarisbawahi bahwa PUPR Badung sudah siap melakukan pengerjaan dengan anggaran Pemkab Badung sebesar Rp 1 miliar.

"Kalau tidak kerja (melakukan pengaspalan) dalam dua hari ke depan, kami akan stop seluruh pengerjaan mereka. Apakah itu sudah selesai atau tidak, kami akan tutup dan tidak boleh ada lagi pengerjaan. Kami siap melakukan pengerjaan dengan anggaran sendiri," tandas Surya Suamba.

Sementara pengawas proyek penanaman kabel, Toto Hadiani mengakui adanya teguran dari Dinas PUPR Kabupaten Badung. Menurut dia, pihaknya akan bekerja semaksimal mungkin untuk merampungkan pemasangan kabel itu dalam beberapa hari ke depan. Saat ini mereka sedang berkoordinasi dengan perusahaan pemasok aspal untuk memperbaiki jalan di Jalan Darmawangsa. Ditanya terkait proses pengerjaan yang dijadwalkan selesai 10 Juni lalu, Toto mengakui hal itu tidak sesuai rencana karena terdapat beberapa faktor. "Ya, kami kena teguran. Kami akan melakukan perbaikan jalan dalam pekan ini. Kami sudah koordinasi dengan penyedia aspal. Harapannya dalam pekan ini sudah mulai pengaspalan," kata Toto saat dikonfirmasi secara terpisah. **RD**

Edisi : Selasa, 18 Juni 2019

Hal : 2



# Diperiksa, Tiga Perbekel Tutup Mulut

**"Tadi kami ditanya terkait pengadaan mobil. Mohon maaf ya saya capek sekali. Besok kami datang lagi,"**

DENPASAR, Nusabali

Tiga orang saksi dalam pengadaan kendaraan mobil Xpander Ewood A/T hitam dan roda dua untuk operasional pemerintahan desa dan BPD se-Kabupaten Gianyar datang ke Polda Bali untuk memberikan klarifikasi, pada Senin (17/6) pagi. Namun ketiganya kompak tutup mulut ketika di-

tanya soal materi pemeriksaan yang dilakukan penyidik.

Ketiga orang yang datang kemarin, yakni Gusti Nyoman Gede Susila selaku Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah (FKPL) Kabupaten Gianyar, Ketua II FKPL Gianyar, I Gede Purnadi Yoga yang merupakan Perbekel Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring dan Sekretaris FKPL Gianyar, I Made Junarta yang merupakan Perbekel Bukian, Kecamatan Payangan.

Ketiganya tiba di Polda Bali di Jalan WR Supratman sekitar pukul 09.00 Wita langsung menuju ruangan Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali di lantai IV. Ketiganya terlihat datang dengan membawa berkas dokumen yang disimpan di dalam tas maupun map. Ketiganya diperiksa pada

dua ruangan berbeda. I Gusti Nyoman Gede Susila dan I Made Junarta diperiksa pada satu ruangan, sementara I Gede Purnadi Yoga diperiksa pada ruangan sebelahnya.

Ketiganya menjalani pemeriksaan selama hampir 7,5 jam hingga pukul 16.30 Wita. Dipantau dari balik jendela ruangan pemeriksaan ketiganya tampak serius memberikan keterangan. Masing-masing membuka map yang berisi tumpukan berkas dokumen yang mereka bawa. Terlihat muka dari ketiganya tampak tak gairah, namun mereka tetap mengikuti pemeriksaan dengan baik.

Sekitar pukul 16.30 Wita Gede Susila dan Made Junarta keluar dari ruang pemeriksaan. Saat dicegat wartawan awalnya keduanya saling lempar untuk

beri keterangan tapi akhirnya tak ada yang mau bicara. Keduanya berusaha dengan cepat untuk segera turun ke lantai I

gedung pemeriksaan.

Karena terus dikejar wartawan, Made Junarta mengatakan pihaknya datang hanya

untuk memberikan klarifikasi. Penyidik menanyakan hal-hal seputar pengadaan mobil yang kini tengah dibidik Polda Bali. "Tadi kami ditanya terkait pengadaan mobil. Mohon maaf ya saya capek sekali. Besok kami datang lagi," tutur Made Junarta dengan wajah lesu didampingi oleh Gede Susila yang terus diam tanpa kata.

Terpisah Wadir Krimsus Polda Bali, AKBP Bambang Tertianto dikonfirmasi terpisah kemarin siang enggan berkomentar banyak. Mantan penyidik utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini hanya membenarkan adanya pemeriksaan itu. "Ketiganya dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Ini guna memperjelas terkait pengadaan mobil operasional pemerintahan desa dan BPD se-Kabupaten Gianyar,"

tulis AKBP Bambang melalui pesan singkatnya.

Sebagaimana diberitakan, 63 mobil Xpander tersebut dibeli di dealer PT Bumen Redja Abadi, Denpasar, atas nama pemesan Ketua FKPL Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila, 10 Januari 2019. Namun usai rapat, Kamis kemarin, kepada Nusabali, Susila mengaku selaku Ketua FKPL Gianyar, dirinya bukan terlibat dalam pengadaan mobil ini. Dia mengaku hanya mengkoordinasikan dan menyosialisasikan terkait Perbup Gianyar tentang pengadaan mobil ini. "Pengadaan mobil ini lun di masing-masing desa. Hak dan kewenangannya pun di masing-masing desa. Yang jelas, saya bukan pembeli, hanya mewakili perbekel lain untuk memesan agar barang menyakinkan," jelasnya. **pol**

Edisi : Selasa, 18 Juni 2019

Hal : 5



# Dewan Soroti Temuan BPK di 8 OPD



Rapat paripurna membahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli di DPRD Bangli, Senin (24/6).

## Penganggaran belanja tahun anggaran 2018 belum tertib.

BANGLI, NusaBali

DPRD Bangli menggelar rapat paripurna membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 di gedung DPRD Bangli, Senin (24/6). Dalam rapat paripurna itu, anggota dewan melalui pemandangan umum fraksi soroti temuan BPK di delapan OPD lingkungan Pemkab Bangli. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Rapat paripurna

dihadiri Bupati Bangli I Made Gianyar.

Juru bicara Fraksi Demokrat, I Made Krisnawa menyinggung hasil pemeriksaan BPK di Dinas Pendidikan, PMD, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perizinan. Dalam penganggaran belanja tahun anggaran 2018 yang belum tertib. "Apa langkah Pemkab Bangli menindaklanjuti temuan tersebut," tanya Made Krisnawa.

Made Krisnawa juga menyinggung pengelolaan pajak daerah oleh BKPAD tidak sesuai ketentuan terkait tentang

uji petik dari BPK. Uji petik dilakukan kepada sejumlah wajib pajak seperti Toya Devasya maupun kepada wajib pajak lainnya, sehingga terjadi kekurangan pembayaran pajak hiburan dan restoran. "Kami mendesak BKPAD mengambil langkah-langkah tegas dan berkoordinasi dengan OPD terkait," pinta I Made Krisnawa. Sementara juru bicara Fraksi PKPI, Wayan Wedana pertanyakan realisasi target pajak Rp 1,161 triliun. Realisasinya Rp 1,106 triliun. "Langkah apa yang telah diambil pemerintah untuk menindaklanjuti temuan BPK," kata Wayan Wedana.

Bupati Bangli Made Gianyar menyampaikan hasil pemeriksaan BPK, Pemkab Bangli meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Dari kedua hal tersebut kita harus bekerja keras, bekerja dengan cepat, cermat dari semua unsur baik dari sisi penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan harus terintegrasi sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang lebih baik," ungkap Bupati Made Gianyar. **esa**

Edisi : Selasa, 25 Juni 2019

Hal : 8



# Bantu Lansia, Dinsos Anggarkan Rp 2,54 M

Setelah anggaran cair, dana ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

AMLAPURA, NusaBali

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karangasem sediakan bantuan Rp 2,54 miliar untuk 879 lansia dan penyandang disabilitas. Rinciannya 500 lansia, 111 penyandang disabili-

tas, dan 268 ASDB (asistensi sosial penyandang disabilitas). Mereka yang termasuk ASDB yakni yang menderita cacat tetap, telantar, dan yatim piatu dari keluarga kurang mampu.

Kadis Sosial Karangasem, Ni Ketut Puspa Kumari mengungkapkan bantuan untuk lansia sebesar Rp 3 juta per orang total Rp 1,5 miliar per tahun. Penyandang ASDB Rp 2,4 juta per tahun total Rp 643,5 juta, sedangkan 111 penyandang disabilitas Rp 400 juta. Penerima bantuan

berdasarkan hasil survei dan rekomendasi kelian banjar diketahui perbekel dan camat. "Bantuan yang diberikan tidak seberapa, tetapi lumayan bisa membantu meringankan beban sosial masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan bantuan bisa kami tingkatkan," ungkap Puspa Kumari, Minggu (9/6).

Penyerahan bantuan direncanakan bertepatan pada Hari Lansia, 29 Mei lalu. Namun karena masih proses amprah dan dana belum cair, peny-

erahannya diundur. Setelah anggaran cair, dana ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri meminta segera menjadwalkan penyerahan bantuan tunai kepada lansia dan penyandang disabilitas. Terpisah, Perbekel Desa Sukadana, I Gede Suardana, juga merayakan Hari Lansia dan membagikan sumbangan sembako. Perbekel Gede Suardana menyerahkan 29 paket sembako di 10 banjar dinas. **k16**

Edisi : Senin, 10 Juni 2019

Hal : 8



# Kucuran dari APBN Dikurangi

DENPASAR, NusaBali

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan disebut akan mengalami pengurangan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RSUP Sanglah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dimungkinkan untuk mengelola biaya-biaya operasional, termasuk yang bersumber dari masyarakat.

"Bukannya tidak dibiaya lagi oleh APBN. Tetap ada pembiayaan, namun karena sudah berstatus BLU, rumah sakit diberikan kelonggaran untuk mengelola biaya-biaya operasional, termasuk untuk mendapatkan biaya-biaya yang memang berasal dari masyarakat. Artinya belanja modal, gaji, masih tetap

didrop. Tapi rumah sakit yang berstatus BLU juga diizinkan untuk melihat peluang pasar dengan melakukan terobosan-terobosan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Drg Oscar Primadi MPH, saat menjadi keynote speaker seminar 'Menuju Kemandirian Rumah Sakit Secara Finansial' di RSUP Sanglah, Kamis (13/6).

Dia melihat, beberapa terobosan telah dilakukan oleh RSUP Sanglah. Salah satunya

program transplantasi ginjal yang dilakukan dengan sukses.

Terobosan ini, kata dia, yang diharapkan terus dikembangkan sehingga bisa membantu rumah sakit mandiri secara finansial. "Bahkan saya dengar dari Pak Dirut, nanti akan ada program di bidang kesehatan kornea, dan lain-lain. Dengan adanya status BLU, kita berharap rumah sakit bisa mengupayakan kemandirian finansialnya. BLU bukan 'swastanisasi', tapi meru-

upakan bagian dari upaya memberdayakan dan memberikan keluwesan rumah sakit dalam pembiayaan operasionalnya," terang drg Oscar.

Dia menambahkan, semua rumah sakit vertikal (di bawah Kementerian Kesehatan) sudah berstatus BLU. Sejauh ini, kata dia, beberapa rumah sakit di Pulau Jawa termasuk RSUP Sanglah sudah mulai menapak ke arah perbaikan-perbaikan serta inovasi. Menurutnya, sejumlah tantangan harus diatasi oleh masing-masing rumah sakit seperti teknologi dan era digitalisasi, perubahan persaingan, termasuk kemampuan melihat peluang pasar. "Saya berharap RSUP Sanglah bisa menjadi model," imbuhnya.

Sementara Direktur Utama (Dirut) RSUP Sanglah, dr I Wayan Sudana MKes menjelaskan, RSUP Sanglah sudah memulai. Pertama, pihaknya terus melakukan upaya-upaya menjaga dan meningkatkan cash ratio, sehingga kemampuan untuk mandiri semakin meningkat. Kemudian, upaya memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana. Selain itu, kejelian memanfaatkan perkembangan

teknologi dan menangkap peluang pasar.

Salah satunya, indikator keuangan RSUP Sanglah, dimana sebelumnya cash ratio terlihat masih merah, sekarang sudah kita tinggalkan merah tersebut. Kalau cash ratio merah itu artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, cash kita lebih kecil dari hutang. Sekarang sudah terbalik, Cash yang kita miliki lebih besar dari hutang yang ada," jelas Dirut Sudana.

Dia menambahkan, pendapatan RSUP Sanglah sendiri tahun lalu mencapai Rp 609 miliar. Pihaknya optimis tahun ini bisa menghasilkan pendapatan sebesar Rp 614 miliar. Dengan optimalisasi SDM dan sarana prasarana, serta pengembangan layanan baru akan terus dilakukan inovasi. Salah satunya program layanan transplantasi ginjal. Selain itu, juga akan dikembangkan program layanan baru yakni transplantasi kornea.

"Inipun kita belum bicara soal optimalisasi peralatan dan sumber daya manusia. Apalagi beberapa modal, seperti KSO (kerjasama operasional) sudah mulai kita kurangi. Kita ganti dengan modal kita sendiri. Sehingga pendapatan bisa masuk ke rumah sakit," tandasnya. @ ind



## Gaji ke 13 PNS Cair 1 Juli ✓

JAKARTA, NusaBali

Kabar gembira datang untuk para aparatur sipil negara (ASN) alias PNS, prajurit TNI dan anggota Polri. Pasalnya, pada tanggal 1 Juli 2019 mereka akan mendapatkan gaji bulanan dan gaji ke-13.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses pencairan gaji ke-13 sudah mulai diproses oleh para satuan kerja (Satker) ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

"Jadi nanti pembayaran bersamaan dengan gaji tanggal 1 Juli," ujar Sri Mulyani di Komplek Istana, Jakarta, seperti dilansir detik, Kamis (13/6).

Gaji ke-13, kata Sri Mulyani diperuntukkan bagi para abdi negara sebagai modal biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru. Adapun, besaran gaji ke-13 yakni take home pay (THP) sama besaran gaji per bulan.

Oleh karena itu, mulai tanggal 1 Juli 2019 pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 dan juga pembayaran gaji bulanan bagi seluruh abdi negara.

"Iya memang kan 1 Juli. Proses sekarang sedang dilakukan. Kan mereka sudah selesai lebaran jadi satker yang memegang portofolio pembayaran gaji sudah mulai men-

gajukan," ungkap dia.

Sekedar informasi, waktu pencairan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

"Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni," bunyi aturan Ayat 4 pasal (3) PP ini.

Dalam lampiran PP ini juga disebutkan, komponen gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan akan berbeda. Adapun, gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri akan terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja.

Sedangkan, pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan. ☺

Edisi : Jum'at, 14 Juni 2019

Hal : 4



# KPK Tuntut Pansel Capim Jaring Polisi dan Jaksa

JAKARTA, NusaBali

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menantang panitia seleksi Calon Pimpinan atau Pansel Capim KPK jilid V dapat menjangkit sosok-sosok yang berintegritas tinggi. Terpenting, independen dan tidak bisa ditekani institusi asalnya.

"Bisa enggak nyari orang kayak gitu? Kalau dia polisi, enggak diatur-atur. Kalau dia jaksa, enggak diatur-atur. Kalau dia siapa pun yang datang ke KPK itu antara dia dengan Tuhan-nya, sehingga dia independen, sehingga kebijakan-kebijakan dia sangat independen," kata Saut, seperti dilansir *vivanews*, Kamis (13/6).

Saut menceritakan, awalnya mencalonkan diri sebagai komisioner KPK jilid IV. Ketika itu, dia mendaftarkan diri atas keinginan pribadi, tanpa membawa kepentingan pihak lain atau institusi.

"Saya datang ke KPK, saya dengan Tuhan. Saya enggak ada

yang ngatur istri saya, anak saya, alumni saya, enggak boleh atur-atur saya," kata Saut.

Menurut Saut, sikap independen dan berintegritas adalah bagian penting untuk memperkuat KPK. Dengan begitu, KPK nantinya tak akan terpengaruh, apalagi diintervensi oleh pihak-pihak tertentu.

"Itu akan menjadikan kebijakan-kebijakan dia sangat independen. Apakah arogan? Itu enggak juga, karena itulah yang disebut integritas. Integritas kan tadi saya bilang sembilan nilai, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, adil, dan seterusnya," kata Saut.

Pada Rabu kemarin (12/6), Pansel Capim KPK yang diketuai Yenti Ganarsih mendatangi kantor KPK. Pansel meminta wejangan Agus Rahardjo es, terkait proses seleksi pimpinan KPK jilid V. Pansel juga meminta KPK menelusuri rekam jejak para calon.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian men-



Saut Situmorang

gatakan sudah ada sejumlah anggotanya yang ingin mengajukan diri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK.

"Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, ASDM. Ada delapan. Masih terbuka kesempatan, karena pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4

Juli, masih ada waktu," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, seperti dilansir *cnindonesia*, Kamis (13/6).

Ia tidak melihat potensi konflik kepentingan jika anggota Polri menjadi bagian dari KPK. Menurut dia, mereka akan terikat peraturan di KPK, sehingga diharuskan profesional dan

tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan yang tidak menjadi pekerjaannya.

"Sebagian besar mereka profesional, dan mereka selesai dalam keadaan prestasi yang baik, tidak membuat masalah. Jadi sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan-peraturan KPK. Anggota Polri kota juga enggak banyak ikut campur tentang operasionalnya," kata Tito menjabarkan.

Kepada mereka yang mengajukan diri, Tito berpesan soal pentingnya rekam jejak.

Ia juga meminta mereka memperhatikan berbagai kompetensi yang dimiliki seperti pengalaman di reserse, pengalaman menangani kasus korupsi dan kemampuan melalui berbagai tes yang diselenggarakan pansel KPK. Tito juga meminta anggotanya tetap dicek soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menurutnya menentukan proses seleksi. ☞



## Karangasem Sulit Anggaran

**BANGUNAN** Kuno di Karangasem cukup banyak. Di antaranya adalah peninggalan Raja Karangasem. Dari Taman Ujung hingga laman Tirta Gangga.

Bangunan-bangunan ini menurut Kadis Kebudayaan Nengah Arnawa mengatakan bangunan kuno di Karangasem belum mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan daerah.

"Belum ada perawatan bangunan kuno di Karangasem, belum ada dana dari APBD," ujarnya.

Hanya saja sebagian di antaranya bangunan Kuno tersebut sudah masuk sebagai cagar Budaya. Kalau masuk

cagar budaya maka berhak mendapat dana untuk pemugaran. Hanya saja harus mengajukan proposal untuk apa saja pemugaran tersebut. Di antaranya yang sudah masuk cagar budaya di Karangasem adalah Taman Ujung.

Menurut Arnawa Taman Ujung sudah masuk Cagar Budaya sejak tahun 2018. Di antaranya yang masuk cagar budaya sesuai SK nomor 302/HK tahun 2018. Juga penetapan Taman Ujung Karangasem sebagai situs cagar budaya.

Taman Ujung sendiri juga sempat mendapat bantuan

revitalisasi dari Bank Dunia. "Dibantu pinjaman Bank Dunia untuk revitalisasi," ujar Artawa alias Sentot.

Pengelola Taman Ujung Ide Made Alit mengakui kalau Situs Taman Ujung sudah masuk Cagar Budaya. Hanya saja menurut Ide Made Alit, selama dia jadi pengelola Taman Ujung sejak 2,5 tahun lalu belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Hal yang sama juga terjadi untuk Puri Karangasem. Bahkan Taman Ujung diakui malah bisa menghasilkan PAD buat Karangasem. (tra/pit)

Edisi : Minggu, 16 Juni 2019

Hal : 2



## Perawatan Berbiaya Rp 800 Juta

**KESIBUKAN** pemeliharaan benda-benda budaya di Buleleng memang butuh keseriusan. Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Komang menjelaskan langkah awal pihaknya melakukan pemugaran dan penataan peninggalan bersejarah yang ada di Buleleng.

Mulai dari peninggalan purbakala berupa artefak yang berada di halaman luar museum Buleleng, memperbaiki tata ruang museum, agar lebih representatif untuk dikunjungi. Juga mempertajam atau memperjelas gambar-gambar pewayangan yang berada di museum Buleleng.

"Itulah sisi perbaikan dan perawatan benda peninggalan bersejarah yang kami lakukan tahun 2019 saat ini," ungkapnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Diaku, Buleleng memang kaya akan peninggalan bersejarah. Mulai dari lontar-lontar lama yang terawat di museum Gedong Kirtya, gambar-gambar wayang yang memuat cerita pewayangan masyarakat, artefak, buku-buku lama dan peninggalan cagar budaya dan lainnya.

Melihat banyak peninggalan bersejarah di Buleleng pihaknya harus rutin melakukan perawatan. Seminggu sekali di hari Jumat. Ada petugas khusus yang merawat dan melestarikan peninggalan bersejarah. Baik yang berada pada museum Buleleng, museum Sunda kecil dan museum Gedong Kirtya.

"Kalau petugas ada lima orang yang rutin merawat dengan melakukan pengecekan terlebih dulu, setelah itu dibersihkan dengan tetap menjaga keindahan benda, tidak mencoret dan memastikan bahwa jumlah benda peninggalan tak ada yang hilang.

Selain itu dalam ruangan museum dipasang alat pendingin ruangan. Agar benda tidak mengalami kerapuhan, rusak dan berdebu," terangnya.

Untuk biaya perawatan peninggalan bersejarah memang terbilang cukup mahal. Namun, tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah. "Tahun 2019 saat ini biaya perawatan untuk benda-benda peninggalan mencapai Rp 800 juta. Itu juga termasuk dengan biaya perbaikan gedung museum Buleleng," tuturnya.

Selain ancaman kerusakan dari benda bersejarah, juga ancaman kehilangan. Karena jadi incaran orang-orang.

Nah, untuk menghindari ancaman benda bersejarah yang hilang. Selain adanya petugas keamanan. Juga melakukan pemasangan CCTV. Kemudian suasana terang berada disekitar museum dengan pemasangan lampu. Jadi setiap orang atau warga masuk ketika malam hari dapat terlihat dengan nyata. "Yang paling utama memastikan kunci dari museum itu kondisi baik dan terkunci," tuturnya.

Sejauh ini peninggalan bersejarah yang ada di Buleleng juga mulai dikunjungi oleh para wisatawan. Kunjungan wisatawan masih dari mancanegara yakni Eropa. Mereka yang datang lebih banyak membandingkan peninggalan sejarah yang ada di negaranya dengan di Indonesia. Untuk wisatawan lokal lebih banyak anak TK dan SD yang datang ke museum.

"Adanya museum Buleleng, museum Sunda Kecil, museum Gedong Kirtya dan peninggalan bersejarah lainnya di Buleleng. Mudah-mudahan jadi modal awal untuk pengembangan pariwisata di Buleleng," pungkasnya. **(ulf/pt)**



## Warga Miskin ✓ dapat Bantuan

**SINGARAJA-** Warga miskin di Buleleng mendapat bantuan dari Dinas Sosial Bali. Adalah I Komang Artawan, 28. Dia menderita lumpuh sejak lahir dan tidak memiliki identitas diri (KTP) "Hari ini (kemarin) kami berikan sembako kepada Artawan," kata I Dewa Gde Mahendra Putra kemarin (15/6).

Mahendra mengatakan, mengetahui adanya warga miskin di Buleleng dari media, pihaknya sangat prihatin melihat kondisi Artawan. Karena kondisinya lumpuh, juga yang bersangkutan menderita disabilitas yang sudah cukup parah dan hal itu harus segera dilakukan penanggulangan. "Artawan yang belum memiliki identitas penduduk, kami sudah meminta dinas terkait guna memberikan fasilitas dalam pembuatan e-KTP dan KIS," ucapnya.

Mahendra menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bantuan kursi kursi roda. Namun, terkait bantuan bedah rumah diajukan terlebih dahulu melalui desa setempat. "Yang jelas dalam pemberian kursi roda

dan pemberian bantuan bedah rumah juga sudah diusulkan melalui desa setempat dan yang jelas yang bersangkutan sudah bisa berobat dan akan diberikan bantuan bedah rumah tahun ini," sambung dia.

Sementara Kepala Desa Pohbergong, Nyoman Sukrawan menyatakan pihaknya sangat bersyukur perhatian pemerintah provinsi terhadap masyarakat kurang mampu dengan cara mengecek langsung. "Kami benar-benar salut dengan pemerintah baik dengan provinsi dan kabupaten yang telah memberikan perhatian terhadap warga kami. Yang bersangkutan akan menerima bantuan bedah rumah tahun ini," ungkapnya.

Menurut dia, di desa Pohbergong masih banyak warga yang menempati rumah tidak layak huni. Jumlahnya sebanyak 30 warga. Namun, sudah diusulkan menerima rehab rumah dari Pemkab Buleleng.

Kadis Catatan Sipil Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni saat dikonfirmasi mengakui telah

berupaya jemput bola guna melakukan perekaman e-KTP dan pembuatan KK bagi warga

masyarakat yang mengalami kelumpuhan.

"Sudah kami datang ke rumah

yang bersangkutan dan sekarang sudah selesai semuanya. Besok (hari ini- Red) tinggal

menyerahkan kepada yang bersangkutan," pungkasnya. (uli/dot)

Edisi : Minggu, 16 Juni 2019

Hal : 6



## Radar Bali

### Pilkada Karangasem, KPU Usulkan Rp 31 M<sup>✓</sup>

AMLAPURA-KPU Karangasem langsung ancap-ancang untuk menggelar hajatan Pilkada 2020. Menurut Komisioner KPU Karangasem bidang hukum Ngurah Gede Maharjana, tahapan Pilkada serentak adalah pengusulan anggaran. KPU Karangasem sendiri mengusulkan anggaran sebesar Rp 31 miliar.

Maharjana mengatakan, dana tersebut akan dipergunakan untuk semua tahapan Pilkada yang akan dilakukan selama satu tahun. Di antaranya adalah tahapan kampanye, pengadaan berbagai kebutuhan Pilkada termasuk kotak suara dan honor KPPS serta pejabat haddock lainnya. Menurut dia, untuk kotak suara harus pengadaan ulang. "Karena kotak suara Pilpres dan Pileg lalu menggunakan karton dan sekali pakai. Pengadaan kali ini juga dengan karton untuk sekali pakai," kata dia kemarin (22/6).

Selain itu anggaran juga akan dipergunakan untuk tahapan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih. Ngurah yakin kalau untuk dapat pemilih dipastikan akan ada perubahan dari Pilpres dan Pileg. Utamanya adalah pemilih pemula yang saat Pilpres dan Pileg lalu belum berusia 17 tahun.

Pilkada 2020 akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan di Bali sendiri akan dilakukan enam pemilihan kepala daerah termasuk di Karangasem.

Sementara untuk pengamanan Polres Karangasem dan Kodim Karangasem juga mengajukan anggaran sendiri. Hal yang sama juga dilakukan Buwaslu dengan mengajukan anggaran sendiri. Total anggaran untuk Pilkada 2020 ini akan menghabiskan Rp 54 miliar. Anggaran ini sudah dilakukan pembahasan awal oleh tim anggaran Pemkab Karangasem. Kedepan harus dianggarkan di APBD dan dibahas oleh DPRD Karangasem dan juga eksekutif. (tra/dot)

Edisi : Minggu, 23 Juni 2019

Hal : 3



# Bantuan PKB Bakal Naik

## Mulai Tahun 2020

**DENPASAR** - Gubernur Bali, Wayan Koster menjanjikan adanya kenaikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Bali ke masing-masing kabupaten/ kota. Kenaikannya mencapai dua kali lipat. Kondisi tersebut untuk menyikapi, beberapa kesenian yang potensial dimiliki masing-masing kabupten/kota yang tidak bisa tampil lantaran permasalahan dana.

Koster menuturkan tahun ini BKK untuk PKB untuk masing-masing kabupaten kota kecuali Badung sudah mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya Rp 200 juta menjadi menjadi Rp 450 juta. "Untuk Bangli Rp 500 juta. Untuk tahun depan (2020) naik lagi dua kali lipat," janjinya.

ditemui Senin (10/6) lalu.

Dia mengakui, untuk tahun ini tidak bisa melakukan hal yang maksimal untuk merapikan soal anggaran BKK tersebut.

Ini mengingat, Koster yang baru resmi menjabat sebagai gubernur Bali terhitung sejak bulan September 2018. "Kebijakan umum anggarannya sudah disusun sebelum saya menjabat sebagai gubernur. Jadi kurang leluasa saya untuk menyusun prioritas program tahun 2019 ini. Tahun 2020 baru *full* sudah saya desain," kata Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menambahkan dengan adanya penambahan BKK untuk kabupaten/ kota setiap perhelatan PKB, diharapkan bisa mengikuti semua item seni dan budaya yang ada di even PKB. "Jadi seni budaya itu bisa

menjadi penguatan pada pelestarian tradisi dan juga mengakomodasi perkembangan zaman," tandasnya.

Sekadar diketahui, sejumlah kabupaten di Bali mengaku kurang pendanaan dalam mengikuti PKB. Akibat persoalan dana ini, banyak kabupaten tidak mengikutsertakan sejumlah jenis kesenian. Kabupaten menjadi sangat selektif dalam membawa duta keseniannya masing-masing menyesuaikan anggaran yang disiapkan. Persoalan minimnya dana untuk kepesertaan di PKB adalah kucuran dana dari provinsi yang minim, di samping anggaran dari APBD kabupaten masing-masing yang juga minim. Hanya beberapa kabupaten/ kota yang bisa *fullteam* untuk mengikuti PKB, di antaranya adalah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. (zul/yor)

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 7



# Jika Pungli, Kasek Dicapot

## Kadisdikpora Ajak Warga Awasi PPDB

**MANGUPURA** - Pemerintah Kabupaten Badung telah mengulirkan program sekolah gratis untuk siswa di Kabupaten Badung. Namun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Badung tetap mengingatkan kepada sekolah untuk tidak melakukan praktek pungutan liar (pungli) kepada peserta didik. Bila terbukti melakukan pungli, kepala sekolah (Kepsek) terancam dicopot dari jabatannya.

Hal itu dilontarkan oleh Kadisdikpora Badung Ketut

Widia Astika saat menerima sosialisasi Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badung. Selasa (11/7) kemarin. Widia Astika menegaskan semua keperluan sekolah negeri se-Kabupaten Badung sudah sepenuhnya ditanggung pemerintah melalui APBD Badung. Jadi, siswa maupun pihak sekolah, mestinya fokus untuk mentransformasi ilmu kepada anak didik. Sehingga sekolah negeri di Kabupaten Badung kualitasnya tetap terjaga. "Kalau ada sampai ketemu di sekolah di Badung terima pungutan akan langsung kami copot kepala sekolahnya. Ini sesuai perintah Bapak Bupati," tegas Widia Astika saat sosialisasi



**Kalau ada sampai ketemu di sekolah di Badung terima pungutan akan langsung kami copot kepala sekolahnya. Ini sesuai perintah Bapak Bupati."**

**KETUT WIDIA ASTIKA**  
Kadisdikpora Badung

si tersebut, kemarin.

Sejauh ini ini belum ada di temukan pemungutan liar di sekolah. Namun pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejatinya sangat berpotensi terjadi adanya pungutan.

Pihaknya juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat turut serta mengawasi sehingga tidak terjadi praktek pungli di sekolah. Namun PPDB untuk tingkat SMP sudah melalui online tentu praktek pungli tidak bisa dilakukan. Sementara untuk SD belum menerapkan sistem online sehingga hal ini perlu diwaspadai dan diawasi. "Kami imbau kepada masyarakat di Badung. Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan liar mohon dilaporkan," tandas pejabat asal Kerobokan, Kuta Utara Badung.

Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Luh Suryaniti yang selaku Ketua Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP)

Badung mengatakan sosialisasi UPP itu dalam rangka memperkuat komitmen Kabupaten Badung untuk tidak melakukan pungli. Bahkan sosialisasi tersebut akan dilaksanakan di semua OPD yang melakukan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara pihaknya menyatakan untuk di Kabupaten Badung belum terdapat indikasi yang di nyatakan pungli "Ini merupakan kerja rutin untuk memberantas pungli yang ada di Kabupaten Badung. Kami akan sasar Badan Pendapatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan yang lainnya. Tapi yang jelas semua OPD akan kami berikan sosialisasi pungli," pungkasnya. (dwt/yor)

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 4



## Mantan Ketua LPD Pacung Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR – I Nyoman Jaya, 49, tidak rugi membawa uang tunai pecahan seratus ribuan sebesar Rp 142.928.529 ke Pengadilan Tipikor Denpasar belum lama ini. Uang yang dibawa Jaya sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi LPD Pacung, Bitra, Gianyar tahun 1999-2012, itu menyelamatkan Jaya dari tuntutan berat jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam sidang dengan agenda tuntutan kemarin (11/6), pria yang kesehatannya dagang minuman ringan itu hanya dituntut pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan alias 1,5 tahun. Padahal, dalam Pasal 3 UU Tipikor yang didakwakan JPU, terdakwa terancam pidana penjara paling lama hingga 20 tahun.

"Terdakwa telah menipiskan uang sebagai pengganti kerugian negara. Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya," ujar JPU Putu Iskadi Kekeran dan I Made Eddy Setiawan, kemarin (11/6).

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Esthar Oktavi, JPU juga menuntut

denda Rp 50 juta. "Jika tidak mampu membayar diganti tiga bulan kurungan," imbuh JPU.

JPU menilai terdakwa sebagai Ketua LPD Pacung bersalah menggunakan dana LPD Desa Pacung untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatan LPD tidak dapat beroperasi, dan mengalami kerugian senilai Rp 142 juta lebih. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menanggapi tuntutan dari tim jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar itu, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan (pledoi) tertulis. Sidang pun akan dilanjutkan pekan depan.

Sebagaimana diketahui, kasus ini berawal ketika LPD Desa Pacung mengalami masalah sejak tahun 1996. Kemudian dilaksanakan paruman, dan terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Bendesa Adat Pacung men-

yatakan mengambil alih pengelolaan LPD. Lalu terdakwa memberhentikan ketua LPD, sekretaris LPD dan bendahara yang menjabat sebelumnya.

Dalam perjalanannya, terdakwa mengambil alih jabatan sebagai ketua LPD dan tanpa melalui paruman desa, kemudian menunjuk bendahara dan sekretaris tanpa paruman. Ketika memimpin LPD ini, terdakwa malah mengelola LPD Desa Pacung tidak mengacu pada sistem atau prosedur LPD. Ia memberikan kredit kepada masyarakat tanpa disertai jaminan. Juga tanpa adanya persyaratan permohonan kredit. Lalu permasalahan terjadi di LPD, diantaranya kas LPD tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana deposito nasabah yang telah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan karena saldo per 31 Desember 2012 tercatat Rp.146.476.029, namun uang di kasir hanya Rp 3.547.500. Sehingga terjadi selisih Rp 142.928.523. Uang itu digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. (san/yor)

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 1



## Pilkada Terancam tanpa Pengawas

NEGARA - Pilkada Jembrana 2020 mendatang, terancam tidak akan ada pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Pasalnya, anggaran yang diusulkan pada pemerintah kabupaten akan dipotong lagi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan Rp 7,2 miliar, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 5,7 miliar. Anggaran tersebut untuk kebutuhan pengawasan selama pilkada 2020 mendatang. "Tapi informasi terbaru akan dikurangi lagi," ujarnya.

Pengurangan anggaran tersebut, dihitung berdasarkan anggaran pilkada 2015, ditambah inflasi 8 persen setiap tahun. Sehingga muncul angka 40 persen penambahan dari anggaran pilkada sebelumnya, jadi dari Rp 3 miliar pilkada 2015, ditambah sekitar Rp 1,2 miliar, totalnya Rp 4,2 miliar.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, beberapa pos anggaran akan dipotong. Salah satunya pengawas di setiap TPS akan dihilangkan. "Skenario terburuk tidak ada pengawas di TPS, karena tidak ada anggaran untuk honor," terangnya.

Pihaknya masih berharap anggaran yang diajukan sebelumnya Rp 5,7 miliar disetujui tanpa ada pengurangan lagi, sehingga pengawasan pilkada 2020 mendatang dilakukan maksimal hingga ke tingkat TPS. (bas/gup)



**Skenario terburuk tidak ada pengawas di TPS, karena tidak ada anggaran untuk honor."**

**PANDE MADE ADY MULIAWAN**

*Ketua Bawaslu Jembrana*

Edisi : Rabu, 12 Juni 2019

Hal : 9



# Warga Ogah Menunggu Pemkab

## Perbaiki Jalan Rusak Berat secara Swadaya

**SEMARAPURA-** Kecamatan Nusa Penida banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Sayangnya, banyak jalan menuju sejumlah objek wisata rusak parah. Tak ingin berlama-lama menunggu perbaikan dari Pemkab Klungkung, warga Nusa Penida melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Perbaikan jalan rusak dimulai dari Desa Bunga Mekar yang merupakan jalan kabupaten menuju sejumlah objek wisata terkenal seperti Pantai Klungkung dan lainnya, Selasa (18/5).

Koordinator perbaikan jalan I Nengah Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan. Menurut dia jalan di desa tersebut rusak parah. Kondisi jalan tersebut pun kerap membuat wisatawan

terjatuh. Padahal jalan tersebut adalah jalan kabupaten menuju sejumlah objek wisata terkenal seperti Pantai Klungkung dan lainnya. "Ada delapan titik yang kondisinya rusak berat. Rusak sudah cukup lama," katanya.

Atas kondisi itu, sejumlah warga yang awalnya berbincang santai akhirnya memutuskan untuk melakukan penggalangan bantuan untuk memperbaiki jalan yang rusak secara swadaya. Ide tersebut tak hanya didukung warga Desa Bunga Mekar. Namun, juga sejumlah warga desa tetangga seperti Desa Sakti, Batumadeg, Suana, dan desa lain. "Ada warga yang membantu berupa pasir, semen, uang tunai dan tenaga" ujarnya.

Kemarin warga Banjar Gelagah dan Behu mulai memperbaiki jalan tersebut menggunakan bantuan yang telah terkumpul. Jalan yang rusak

di desa diperkirakan mencapai 1,1 kilometer. Dengan bantuan tersebut, jalan yang bisa diperbaiki sekitar 60 meter. Sementara saat ini baru 15 meter jalan rusak yang telah diperbaiki. "Kami melakukan hal ini bukan untuk membuat pemerintah geram. Kami lakukan ini untuk menunjukkan bahwa kami juga bisa memberikan kontribusi," tandasnya.

Untuk diketahui, Kecamatan Nusa Penida yang memiliki jalan paling panjang dibandingkan kecamatan lainnya, yakni sekitar 229.007 meter dengan kondisi baik sekitar 151.912 meter. Sedangkan rusak berat sekitar 37.785 meter. Untuk itu ada sekitar 21 kilometer panjang jalan yang rencananya diperbaiki di tahun 2019. Jumlah anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan jalan sekitar Rp 31,8 miliar. (ayu/dot)



**GOTONG ROYONG:** Warga Desa Bunga Mekar memperbaiki jalan rusak, kemarin.

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 2



## Melali ke Australia, Unggah Foto ke Media Sosial, Alasan untuk Pelatihan

**GEDUNG DPRD** Badung sejak Senin lalu (24/6) terlihat sepi. Tidak ada penghuni. Begitu juga Selasa kemarin, Surwung.

Usut punya usut, memang tidak ada satu pun anggota DPRD Badung yang masuk kantor. Mereka sedang menggelar acara melali (jalan-jalan) ke luar negeri. Padahal, Maret lalu, mereka sudah melakukan perjalanan serupa ke India.

"Yang kunjungan ke luar negeri 24 orang anggota. Untuk yang tidak ke luar negeri kunjungan ke kota Tangerang," kata sumber pegawai di DPRD Badung, Selasa (25/6).

Luar negeri yang dimaksud adalah Australia. Persisnya ke Kota Melbourne, ibu kota Negara bagian Victoria. Kota ini memang tua, karena pernah menjadi ibu kota Negara

Australia sebelum pindah ke Canberra. Keberangkatan dewan ke luar negeri itu sejak 22 Juni dan akan berakhir 29 Juni nanti. "Nanti hari Senin tanggal 1 Juli baru ngantor," ucapnya.

Celakanya, tidak ada satu pun anggota DPRD Badung yang menjaga gawang. Semuanya pergi. Walhasil, para tamu anggota dewan luar daerah yang berkunjung ke dewan Badung pun hanya diterima oleh staf.

Kunjungan ke luar negeri dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi kedua wakilnya, yakni I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rombongan sempat

melakukan sesi foto bersama di depan Gedung Parlemen Victoria, Melbourne.

Hal tersebut terlihat dari unggahan salah seorang anggota DPRD Badung melalui media sosial mereka. Yang ikut dalam sesi foto tersebut adalah, pimpinan DPRD Badung, beserta anggota yakni; I Made Sumerta, I Made Subawa, Ni Luh Gede Sri Mediastuti, I Ketut Subagia, Ida Bagus Alit Arga Patra, Ni Ketut Suweni, I Nyoman Satria, I Kadek Sudarmaja, I Wayan Suyasa, I Nyoman Dirga Yusa, I Gusti Ngurah Shaskara, I Made Ponda Wirawan, Ida Bagus

Sunartha, I Nyoman Gede Wiradana, I Wayan Regep, dan I Putu Alit Yandinata. Selain itu ada juga beberapa anggota dewan rutin mengunggah kegiatannya selama di Australia, melalui status di media sosial WhatsApp.

Ketua DPRD I Putu Parwata ketika dikonfirmasi tak menampik bahwa sebagian anggota dewan Badung ke luar negeri. Kunjungan tersebut dalam rangka pelatihan. "Training/ pelatihan dan outbound," kata Parwata saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, kemarin.

Kata dia pelatihan yang dilakukan di Australia yakni

meliputi pelatihan employment (ketenagakerjaan), lingkungan, sosial, budaya dan tourism (pariwisata). "Pelatihan ini untuk mencari bahan sehingga nanti kita lakukan evaluasi tourism yang ada di Badung. Ini sangat *urgent* sekali kaitannya sangat luas. Makanya regulasi kita lakukan dengan baik melalui studi empiris," pungkasnya. Padahal, dalam hitungan bulan, anggota DPRD Badung periode ini akan habis masa kerja. Anggota DPRD Badung periode 2019-2024 akan dilantik antara Agustus-Oktober 2019 mendatang. (made dwija putra/yor)

Edisi : Radar, 26 Juni 2019

Hal : 4



# Command Centre Mulai Ditenderkan

DED Rp 400 Juta,  
Biaya Gedung Rp  
4,6 Miliar

**SINGARAJA** - Proses pembangunan gedung Buleleng Command Centre kini masuk dalam tahap tender. Pembangunan diharapkan sudah bisa dimulai pada awal Agustus mendatang. Hanya saja fasilitas tersebut, belum bisa digunakan tahun ini.

Untuk membangun gedung tersebut, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo Sandi) Buleleng, menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,6 miliar. Selain Diskominfo juga menyediakan anggaran Rp 400 juta untuk jasa pengawasan konstruksi dan penyusunan detail engineering design (DED).

"DED-nya sudah selesai. Sekarang dokumen tendernya sudah kami ajukan ke Bagian Layanan Pengadaan Setda. Kalau lancar, paling tidak awal Agustus konstruksinya sudah mulai," kata Kepala Diskominfo Sandi Buleleng Ketut Suweca saat ditemui kemarin (14/6). Menurutnya pembangunan

command centre akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yakni pembangunan konstruksi yang akan dilakukan tahun ini. Sementara tahap kedua adalah pekerjaan interior dan pengadaan barang elektronik, yang akan dilakukan tahun depan.

"Nanti gedungnya dua lantai. Kami memanfaatkan lahan seluas 4,5 are di sebelah barat Lobi Atiti Wisma. Mudah-mudahan akhir 2020 sudah bisa beroperasi penuh," imbuhnya. Sekadar diketahui, command centre akan menjadi pusat data milik pemerintah di Kabupaten Buleleng. Data-data yang selama ini tersebar di beberapa dinas, akan dihimpun menjadi satu. Data-data tersebut akan diolah menjadi bentuk digital, sehingga lebih mudah diakses. Selain itu Command Centre juga akan menjadi lokasi penyimpanan server milik pemerintah. Selama ini server-server data milik pemerintah, disimpan oleh masing-masing dinas. Pemusatan server akan memudahkan pemerintah mengelola dan memelihara aplikasi. Terlebih kini ada 54 buah aplikasi yang dikelola pemerintah. (eps/gup)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 8



## Dana Pembinaan Sanggar segera Cair

**SINGARAJA** - Dana pembinaan sanggar-sanggar yang akan pentas pada Pesta Kesenian Bali ke-41 di Taman Budaya Bali, dijanjikan cair pekan depan. Pemerintah mengklaim saat ini masih ada beberapa proses administrasi yang harus diselesaikan.

Hingga kini dana pembinaan untuk sanggar belum dicairkan seluruhnya. Dana tersebut baru dicairkan untuk sanggar yang akan tampil pada parade pembukaan hari

ini (15/6), serta untuk biaya ikat serta lomba merungkal bunga dan jamur yang akan dilangsungkan Minggu (16/6). "Kami sudah ajukan pada Pak Bupati. Mudah-mudahan, Senin (pekan depan) sudah disposisi. Jadi, Selasa atau Rabu depan sudah bisa dicairkan," kata Kepala Dinas Kebudayaan Buleleng Gede Komang yang dikonfirmasi kemarin (14/6).

Ia pun memahami masalah dana pembinaan itu akan sangat memengaruhi sanggar. Sebab dana itu

akan digunakan untuk operasional keberangkatan saat pementasan. Menurutnya keterlambatan itu disebabkan karena beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Gede Komang pun menjamin bila pekan depan sanggar-sanggar sudah mengantongi anggaran ke Denpasar. "Malu orang Buleleng kalau nggak bawa bekel. Hampir tiap hari tim kami berupaya supaya (pencairan anggaran) ini cepat," tegasnya.

Asal tahu saja, Disbud Buleleng

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 990 juta untuk dana pembinaan. Alokasi dana itu berasal dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Badung. Tiap-tiap sanggar mendapat dana pembinaan yang berbeda. Untuk kegiatan parade misalnya. Disbud mengalokasikan anggaran Rp 105 juta. Sementara untuk pementasan wayang wong, Disbud hanya mengalokasikan anggaran Rp 35 juta. (eps/gup)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 8



# Miliaran, Tunggakan Pajak Hotel di Buleleng

## Pasang Stiker, Tim Yustisi Ancam Lakukan Penyitaan

**SINGARAJA** – Sejumlah hotel berbintang di kawasan Lovina, Singaraja ternyata menunggak pajak hingga miliar rupiah. Ini pun membuat geram Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng. Pasalnya, setelah diberikan teguran dan BKD telah berupaya secara persuasif melakukan pendekatan agar wajib pajak membayar tunggakan pajak. Namun tak kunjung dilakukan pembayaran.

BKD dengan tim yustisi akhirnya turun ke lapangan dengan menempel stiker kepada sejumlah hotel yang belum melunasi tunggakan pajak mereka. Dua hotel yang didatangi tim yustisi

dari BKD Buleleng bersama Satpol PP Buleleng. Yakni Hotel Sunari dan Hotel Melka Lovina. Teguran yang diberikan Tim yustisi kepada kedua hotel tersebut berupa pemasangan stiker pada bagian front office hotel tersebut.

Pemasangan stiker itu merupakan peringatan kedua yang diberikan bagi hotel Penunggak pajak. Hotel Sunari sebagai wajib pajak belum membayar sisa tunggakan pajak dari tahun 2012 sampai 2018 mencapai Rp 1,2 Miliar. Sementara Hotel Melka dari tahun 2012-2018 menunggak pajak mencapai Rp 500 juta lebih.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak I Gede Sasnita Ariawan mengatakan, hotel-hotel tersebut sebelumnya telah diberikan teguran dan BKD telah berupaya secara persua-

sif. Namun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut tidak sesuai harapan. Maka disusun dengan pemberian SP2, sesuai dengan Perbup nomor 18/2018 pasal 11 ayat (5), tentang perubahan atas Perbup Nomor 9/2017 tentang tata cara pemungutan pajak hotel. Dalam rentang waktu 7 hari, SP2 ini tidak digubris oleh wajib pajak. "Maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi penyitaan, pemberhentian operasional hotel hingga pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 8/2011 tentang pajak hotel," bebarnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Ni Made Susi Adnyani. Selama ini pihak BKD tetap melakukan penagihan secara humanis namun pembayaran

yang dilakukan oleh wajib pajak yang dalam hal ini Hotel Sunari dan Melka Lovina tidak maksimal.

"Melalui surat peringatan kedua yang dilayangkan BKD Buleleng ke hotel-hotel tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak. Pembayaran pajak dari para wajib pajak penting adanya untuk dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah serta membantu pembangunan daerah," ungkapnya.

Selain dua hotel yang disambangi BKD Buleleng bersama tim yustisi dari Pol PP Buleleng, juga terdapat hotel lain yang tercatat melakukan penunggakan pembayaran pajak. "Di antaranya hotel Aditya Lovina mencapai 800 juta rupiah lebih, Joe Bar Gerokgak sebesar Rp 53 juta rupiah lebih dan hotel lainnya," pungkasnya. (uli/gup)

Edisi : Sabtu, 22 Juni 2019

Hal : 10



# Agustus, Dana Purna Bakti Dewan Cair

## Lima Tahun, Rampungkan 52 Perda

NEGARA - Anggota dewan periode 2014-2019, akan mendapatkan dana purna bakti dewan diakhir masa jabatan. Baik yang tidak terpilih lagi maupun yang terpilih lagi. Jumlah uang yang diterima berbeda, tergantung dari jabatan dan masa kerja. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 250 juta yang akan diberikan pada bulan Agustus atau akhir masa bakti.

Sekretaris DPRD Jembrana I Mado Sudantra mengatakan, dana purna dewan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Anggota DPRD. Dalam aturan tersebut, sudah ditentukan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, termasuk anggota DPRD yang

### PERDA INISIATIF DEWAN JEMBRANA

- 1 Perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 2 Perda tentang perubahan atas perda tentang BPHTP
- 3 Perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 4 Perda tentang pelayanan publik

meninggal dunia dan mengakhiri masa baktinya. "Kami sudah siapkan anggarannya," jelasnya, Senin (17/6).

Berdasarkan aturan tersebut, besaran uang jasa pengabdian sesuai dengan masa baktinya. Khusus di DPRD Jembrana dari 35 anggota, hanya satu orang yang statusnya pergantian antar waktu (PAW). Bagi anggota PAW tetap mendapat uang jasa

- 5 Perda tentang perubahan perda no 3 tahun 2016 tentang pengangkutan dan pemeliharaan perangkat desa
- 6 Perda tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal
- 7 Perda tentang bank perkreditan desa
- 8 Perda tentang desa wisata
- 9 Perda tentang kabupaten layak anak

SURTA, JEMBRANA (RADAR BALI)

pengabdian, misalnya 2 tahun pengabdian mendapat uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi.

Sehingga berdasarkan jumlah anggota dewan yang ada di Jembrana, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 250 juta lebih untuk semua anggota dewan. Pembagiannya, ketua Rp 2.100.000, dikalikan masa bakti 5 tahun, dia wakil ketua Rp 1.600.000 dikali

masa bakti 5 tahun, begitu juga dengan anggota Rp 8. 400.000 dikalikan masa bakti.

Mengenai besaran jasa pengabdian ini, Sudantra mengakui sudah ada anggota dewan yang menanyakan. Bahkan, ada anggota dewan yang menilai jumlahnya terlalu kecil. "Tapi setelah dijelaskan bisa mengerti. Kami tidak akan mengeluarkan anggaran diluar ketentuan yang ada, pedoman tetap peraturan pemerintah," tegasnya.

Sementara itu, mengenai capaian selama masa bakti 2014-2019, terdapat 52 peraturan daerah dimana sembilan diantaranya adalah perda inisiatif DPRD Jembrana. Hingga masa bakti nanti berakhir, Sudantra menyebut tidak ada tunggakan Perda yang belum ditetapkan. "Kalau perda yang penting, misal APBD Perubahan nantinya akan ditetapkan sebelum masa bakti berakhir, tapi tergantung kesiapan dari eksekutif juga," terangnya. (bus/gup)



## Radar Bali

# Gelar Rapat Rekomendasi

## Atas Temuan BPK

**SEMARAPURA** - Pemkab Klungkung raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tahun Anggaran 2018. Namun, bukan berarti LKPD ini bersih dari temuan BPK. Maka, atas temuan ini, DPRD Klungkung bersama Eksekutif Rapat Rekomendasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Klungkung 2018 di Kantor DPRD Klungkung, Senin (17/6).

Kata Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, laporan keuangan wajar dalam semua hal material. Posisi keuangan per 31 Desember 2018, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). Hanya, pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada perundangan banyak temuan perlu ditindaklanjuti. "Terlebih, pemahaman wajar dalam semua hal yang material mengandung makna bahwa, tidak dijamin tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum atau peryalahgunaan wewenang dan suap-menyuap yang merugikan



BAHAS TEMUAN BPK: DPRD Klungkung-Eksekutif rapat di Kantor Dewan, kemarin.

keuangan negara atau daerah," ujarnya. Temuan BPK terkait dengan Sistem Pengendalian Intern, pelaku pariwisata aktif beroperasi, belum didata dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak. Berdasar uji pesik, ada 13 pengusaha (2016), delapan pengusaha (2017), dan 25 pengusaha (2018). Ada denda pajak hotel belum ditetapkan terhadap 18 pengusaha hotel. Potensi hilang atau tertundanya pendapatan asli daerah (PAD) Rp 4 juta lebih.

Kemudian, kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dianggarkan dan direalisasikan untuk belanja honorarium PNS dan non-PNS, belanja

honorarium pengeluaran dana BOS, belanja barang dan jasa BLUB, belanja jasa tenaga kerja non-pegawai pada 21 OPD dari 42 OPD, Rp 81 miliar.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Klungkung Gede Putu Winastra menjelaskan, ada dua peraturan yang harus diikuti. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenkumham) tentang Hibah dan Bansos dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adanya dalam penganggaran hibah dan bansos itu pihaknya mengaku Pemkab Klungkung lebih mengacu pada Perbup. Sementara BPK lebih berpatokan SAP. (adv/ayu/djo)

Edisi : Selasa, 18 Juni 2019

Hal : 5



# Pelantikan Anggota Dewan Setwan Anggarkan Rp 1,8 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Pelantikan 45 anggota dewan periode 2019-2024 dianggarkan sebesar Rp 1,8 miliar. Anggaran tersebut bakal dipergunakan untuk pembelian sejumlah fasilitas pelantikan. Sekretaris DPRD Karangasem I Wayan Ardika, Minggu (23/6) kemarin mengungkapkan, jumlah anggaran itu nantinya bakal dipergunakan untuk pengadaan sejumlah fasilitas pelantikan, seperti pin emas, sejumlah stel pakain, dan yang lainnya. Kata dia, sampai saat ini proses pengadaan masih dalam proses tahap tender. "Anggaran itu nantinya bisa saja menyusut tergantung pemenang tendernya," ujarnya.

Ardika mengatakan, bagi anggota terpilih nantinya bakal mendapatkan pakain.

Di antaranya Pakain Sipil Sipil Resmi (PSR) dengan Herian (PSH) dengan pagu pagu senilai Rp 3.250.000, Pakain satu stel Pakain Dinas Laporan

gan (PDL) lengan panjang pagunya senilai Rp. 2.950.000, dan satu stel baju endak pagunya sebesar Rp 2 juta. Selain itu, mereka juga bakal memperoleh satu pin emas sebesar 10 gram. Dimana untuk pin pagunya Rp 9 juta per orang. "Jadi, total pagunya sekitar Rp 1,08 miliar. Dimana jumlah itu dikalikan 45 anggota dewan," katanya.

Disampaikan Lptera

ga pengadaan tersebut sudah ada pemenang tendernya. Dicontohkan untuk pengadaan pin emas, pemenang tendernya dari Yogyakarta. Termasuk untuk pengadaan pakain sudah ada pemenang tendernya. Dan saat ini masih dalam proses pengerjaan. Jadi, karena pengadaan melalui tender rekanan bisa menawi hingga bisa menyusut sampai 20 persen. (Gmb41)

Edisi : Senin, 24 Juni 2019

Hal : 11



# Karena Mangkrak, Dibidik Kejari

## Terkait Pembangunan Pasar Silakarang

**GIANYAR**—Proyek mangkrak tak hanya terjadi di gedung Industri Kecil Menengah (IKM) Celuk. Sebab, proyek pasar Silakarang di Jalan Singapadu, Kecamatan Sukawati pun mangkrak. Proyek pasar yang semestinya rampung dikerjakan pada akhir 2018 lalu, itu kini dilirik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gianyar Putu Gede Darmawan mengatakan, proyek pasar Silakarang mendapat pengaduan dari LSM Garda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Sebetulnya laporannya ke Polda. Kami hanya ditembuskan dari LSM Garda Tipikor," ujar Darmawan, Rabu (12/6).

Darmawan menambahkan posisi Kejari sekarang sedang menunggu hasil koordinasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). "APIP ini

di Inspektorat. Kami selaku APH (aparatus penegak hukum) menunggu APIP. Kami sudah bersurat ke APIP bagaimana balasannya, nanti kami telaah lagi," sambung dia.

Nah, jika APIP menyebut itu pidana. Kejari akan bergerak. "Kami ambil tindakan. Sekarang belum ada balasan, mungkin karena lama libur," ujarnya.

Sementara menanti hasil APIP lanjut dia, Kejari terus memantau perkembangan proyek pasar yang kini dibiarkan mangkrak.

"Kami dengar ada pengembalian terkait pasar. Namun kami belum tahu, pengembalian itu untuk apa?," jelasnya.

Analisa Kejari, lanjut Darmawan, perlu dilihat progress proyek itu. Seperti pembayaran bagaimana juga kontraknya. "Apakah uang yang dikeluarkan sesuai progres ya *gak* masalah," ucap Darmawan.

Menurut dia, apabila dalam pengerjaan proyek ada selisih maka terancam ke ranah pidana. "Kalau ada selisih baru kami masuk. Misalnya pengerjaan 50 persen tapi uangnya keluar 70 persen, itu



**INI. SURATNYA:** Ketua LSM Garda Tipikor Pande Mangku Rata menunjukkan surat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Bali yang juga ditembuskan ke Kejari, kemarin.

ada selisih," ungkapnya.

Pihaknya perlu mendalami lagi masalah tersebut. Apakah uang (anggaran) yang dikeluarkan sesuai progres atau tidak. Sedangkan kalau kontrak diputus berarti sudah selesai. Jika ada penambahan waktu kerja pun perlu dilihat temang denda. "Itu analisisnya," jelasnya.

Diakui, masalah pasar Silakarang sama dengan proyek gedung IKM Celuk. "Kasusnya juga sama dengan IKM celuk. Tapi kami belum ada surat perintah (penanganan) untuk itu. Baru sebatas info saja,"

nyalannya.

Sementara itu, Ketua Garda Tipikor Gianyar Pande Mangku Rata mengadakan kasus itu kepada Ditreskrimsus Polda Bali. Pengaduan dalam bentuk surat itu ditembuskan kepada beberapa institusi. Di antaranya Ketua Komisi III DPR RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kapolri, Kejari Bali, Kejari Gianyar, Kapolres Gianyar dan jajaran Garda Tipikor di daerah. "Garda tipikor melaporkan sesuai indikasi. Kami hanya melapor-

kan. Mengenai tindak lanjut adalah kewenangan aparat," ujar Mangku Rata kemarin. Dia juga telah mendengar jika kasus itu kini di meja Inspektorat Pemkab Gianyar. "Biasanya kalau ditangani Inspektorat kalau *nggak* ada pidana harus kembalikan data. Untuk mengembalikan itu kami harapkan," jelas sembari berharap adanya transparansi kepada publik. "Tujuan kami, pembangunan pasar itu segera dilanjutkan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Itu pasar *kan* renovasi, dan pedagang tidak lama menunggu," pintanya.

Dia meminta supaya hal semacam ini jangan lagi terulang. Untuk diketahui, dalam papan proyek pasar Silakarang terpampang dua nominal anggaran. Pertama anggaran sebesar Rp 3,2 miliar dari APBD Kabupaten Gianyar tahun 2018. Kedua, anggaran sebesar Rp 4,8 miliar dari Tugas Pembantuan (TP) APBD 2018. Proyek itu dimulai 7 Agustus 2018 dengan waktu pengerjaan 140 hari kalender. (dra/dot)



# Untuk Perbaiki Infrastruktur Nusa Penida

**SEMARAPURA** - Terhitung mulai Senin nanti (1/7), semua wisatawan ke Nusa Penida, Klungkung, akan dikenakan pungutan retribusi. Ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) 5/ 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) 3/ 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kabupaten Klungkung Nengah Sukasta menyatakan, terkait hal ini, telah sosialisasi dengan mengundang seluruh perbekel di Kecamatan Nusa Penida. Dari pertemuan tersebut, dan masukan-masukan perbekel, pada prinsipnya mendukung pelaksanaan Perda ini.

Besaran retribusi masing-masing Rp 25 ribu per orang dewasa dan Rp 15 per anak-anak. Karena keter-

batasan petugas dan prasarana, untuk sementara, pemungutan akan dilakukan di empat lokasi. Masing-masing di Pulau Nusa Penida di Pelabuhan Banjar Nyuh 1 dan Banjar Nyuh 2. Sedangkan di Pulau Lembungan, masing-masing di Pelabuhan Tanjung Sang Hyang dan di halaman Balai Desa Jungutharu.

"Mengingat waktu pemungutan sudah dekat dan terbatasnya petugas dan prasarana, untuk sementara kami hanya melakukan pemungutan di empat lokasi," ujar Sukasta saat rapat teknis di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Rabu (19/6).

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Klungkung I Gede Pim Winastra menyebutkan, pemungutan retribusi bagi wisatawan ini sudah dilakukan pemba-

hasan teknis hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait beberapa tempat di Nusa Penida sebagai *pilot project* pelaksanaan Perda tersebut. Pejabat asal Tabanan ini mengimbau, dan berharap semua komponen, baik pengusaha, masyarakat, dan pemerintah untuk bersama-sama berkomitmen dan bersinergi melaksanakan Perda ini.

Sehingga, nantinya semaksimal mungkin bisa digunakan untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida. "Mari Kita bersama-sama mempunyai komitmen yang sama, bersinergi guna melaksanakan Perda ini. Sehingga, nantinya semaksimal mungkin bisa Kita gunakan untuk terus meningkatkan pembangunan pariwisata di Nusa Penida," ujarnya.

Pendapatan pajak dan retri-

busi daerah dari sektor pariwisata di Kecamatan Nusa Penida 2016 sebesar Rp 17,2 miliar (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air bawah tanah, dan pendapatan retribusi tempat rekreasi. Kemudian meningkat menjadi Rp 21,003 miliar pada 2017. Sedang pada 2018 menjadi Rp 25,8 miliar.

Secara bertahap, anggaran yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan penunjang lainnya di Nusa Penida; pada 2016 (Rp 95,4 miliar), pada 2017 sebesar Rp 46,8 miliar, dan 2018 sebesar Rp 38,17 miliar. (advertorial/ayu/djo)

Edisi : Kamis, 20 Juni 2019

Hal : 3



## Pendaftar Lelang Masih Kosong

● Biaya Perbaikan Retakan Tebing Uluwatu Rp 29,5 M ✓

### MANGUPURA, TRIBUN

**BALI** - Pemerintah Kabupaten Badung mulai melakukan tender untuk perbaikan keretakan tebing Uluwatu, yang lokasinya Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung.

Lelang yang dibuka 17 Juni lalu dengan nama Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai, Bangunan Penguat Tebing, Penguatan Dinding Tebing Uluwatu hingga Kamis (27/6) belum ada yang mendaftar sebagai peserta. Padahal total Nilai Pagu yang dianggarkan Rp 29.500.000.000.

Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung AA Gede Agung Dalem tak menampik hal tersebut. Menurutnya,



Bahan yang digunakan adalah angkur baja antikorosi, net baja dan sling baja.

**AA Gede Agung**

**Dalem**

Kabid SDA Dinas PUPR Badung

minggu ini merupakan pengumuman lelang. Sehingga minggu depan sudah jadwal

pemasukan dokumen lelang. "Iya semoga ada pesertanya. Sehingga cepat bisa dilaksanakan," ujarnya.

Sebelum mengerjakan proyek penguatan dinding tebing Uluwatu itu, Dinas PUPR telah melakukan analisis manajemen konstruksi yang melibatkan Konsultan Konstruksi PT Inakko Internasional Konsulindo. Analisis ini untuk mengetahui bahan dan juga teknis pengerjaan tebing yang retak tersebut.

"Untuk hasil dari analisis tersebut inventarisasi bahan yang mungkin digunakan adalah angkur baja antikorosi, net baja dan sling baja," ucapnya.

Dalam pengerjaannya, pria yang akrab dipanggil Gung Dalem itu mengatakan, harus ada beberapa

pengeboran untuk pemasangan angkur, Pengikat baja, dan grouting celah batuan dengan semen perekat. Sehingga, menurutnya, retakan tersebut seperti dijari, dan dengan adanya lem dari semen.

"Iya, kita kan sudah rancang dari awal. Sehingga semua bahan yang digunakan dalam tindak lanjut retakan tersebut harus berbahan baja, agar kuat," tuturnya.

Kata dia, proses pengerjaan harus tuntas tahun 2019. Namun saat ini masih menunggu peserta lelang dan juga pemenang lelang. "Pengerjaannya hanya punya waktu empat bulan. Kami masih menunggu hasil lelang. Kalau gagal lelang, ya bisa tak jadi, karena waktu pengerjaan yang akan habis," katanya. (gus)

Edisi : Jum'at, 28 Juni 2019

Hal : 6



# Rp 11,5 Miliar Itu Kecil

## GIANYAR, TRIBUN BALI

Bupati Gianyar, Made Mahayastra meminta pada masyarakat supaya tidak berpikiran subjektif terkait pembuatan rumah jabatan bupati. Sebab pihaknya menilai anggaran Rp 11,5 miliar tersebut masih sedikit.

Menurutnya, rumah tersebut, selain akan dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti perpustakaan, garasi kendaraan, tetapi juga ruang rapat. Baik rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga dengan masyarakat.

Bupati Gianyar, Made Mahayastra, Kamis (27/6) mengatakan, rumah jabatan tersebut sangat dibutuhkan bagi dirinya, yang saat ini pulang pergi dari Gianyar, ke rumahnya di Kota Denpasar. Dengan cara ini, banyak waktu yang dihabiskannya di jalan. Sementara dokumen yang harus ditandatangani setiap harinya relatif 'menggantung'. Belum lagi, dirinya harus menghadiri sejumlah undangan, baik adat, swasta dan sebagainya, demi kepentingan pemerintahan Gianyar.

"Rumah jabatan itu sesuatu yang wajib, karena bupati itu tak mengenal jam

kerja. Jam *roras* (12 malam) bisa *didogdog* (digerogrog) (digerogrog) bupati, bupati harus siap. Jam 6 pagi masyarakat sudah menunggu di kantor bupati. Nah inilah kenapa mesti ada rumah jabatan," ujarnya.

Selain itu, Mahayastra juga tidak mau menandatangani pekerjaannya saat berada di dalam mobil, baik dalam perjalanan pulang ataupun saat berangkat ke Gianyar. "Setiap hari dokumen yang harus ditandatangani itu banyak. Harus dikerjakan di meja kerja, biar bisa membaca secara teliti," ujarnya.

Terkait anggaran Rp 11,5 miliar, yang menjadi sorotan masyarakat, Mahayastra menilai hal besar atau kecilnya

anggaran tersebut bersifat relatif. Namun, kata dia, jika masyarakat melihat dari sudut pandang subjektif atau membayangkan bangunan tersebut hanya berupa rumah, tentu Rp 11,5 miliar tersebut besar.

"Saya justru menilai Rp 11,5 miliar itu kecil. Rumah jabatan itu, mestinya ada ruang kerja, perpustakaan, ruang tamu, ruang makan bagi masyarakat, taman, ruang parkir. Kalau standar itu, nilai Rp 11 miliar itu tak cukup. Apalagi, harus ada tempat tidur untuk keluarga, beserta fasilitas. Kalau hanya melihat uang Rp 11 miliar itu hanya untuk bikin rumah, tentu kelihatannya besar," ujarnya. (weg)



## Bupati Serahkan 565 Bantuan Rumah Layak Huni ✓

### ● Diharapkan Pembangunan Dilakukan Dengan Gotong Royong

**BUPATI** Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) kepada 565 masyarakat Badung yang dilangsungkan di Wantilan desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (19/6) kemarin. Pada BRLH kali ini, masyarakat penerima masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp. 55 juta, dengan total nilai mencapai Rp. 31,57 Miliar. Dana BRLH pun telah ditransfer ke rekening penerima melalui Bank BPD Bali dan tidak dikenakan pajak.

Bupati Gin Prasta menekankan, kegiatan ini merupakan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung. Sehingga dalam poin pertama yaitu sandang, pangan dan papan, didalamnya terdapat program bedah rumah, rehab berat dan ringan. Bupati menegaskan yang mendapat dana BRLH, masyarakat berpenghasilan rendah. Dari BRLH akan berlanjut ke bantuan bedah wa-  
ng dan bedah WC.

"Untuk program bantuan bedah rumah sebanyak 3.000 bagi masyarakat kategori KK miskin sesuai data Dinas Sosial telah kami tunjukkan di tahun 2018. Sekarang berlanjut dengan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.

Pihaknya meminta, untuk pembangunan rumah diminta agar dibangun secara gotong-royong dan bentuknya juga seragam. Seperti halnya dilengkapi dua kamar tidur, satu ruang tamu, kamar mandi dan dapur. "Bantuan ini agar dimanfaatkan dengan baik, kedepan juga akan diberi bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan usaha dan ekonomi masyarakat," tambah Bupati.

Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Badung, A. A. Bayu Kumara mengatakan, dalam mewujudkan misi Bupati Badung yaitu meningkatkan daya saing daerah melalui peningkat-



**BUPATI BADUNG** I Nyoman Gin Prasta menyerahkan dana BRLH kepada 565 masyarakat badung di Wantilan Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Rabu (19/6).

an SDM dan infrastruktur daerah, maka dalam rencana kerja pemerintah daerah direncanakan BRLH setiap tahun. Program itu, mulai digulirkan sejak tahun 2016 dan tahun ini memasuki tahun ketiga. Jumlah permohonan bantuan sebanyak 6.846 KK atau 4,80 persen dari jumlah KK di Badung. Setelah verifikasi, yang layak mendapat bantuan sebanyak 2.180 KK atau 31,84 persen dari selu-

ruh permohonan. Sedangkan menurutnya yang sudah mendapat bantuan sebanyak 775 KK dengan jumlah dana Rp. 42,185 M.

"Untuk tahun ini dibantu 565 KK dengan nilai Rp. 31,75 M. Jadi BRLH hingga tahun 2019 sebanyak 1.332 KK atau 0,94 persen dari jumlah KK di Badung dengan jumlah anggaran Rp. 73,260 M, rincian Rp. 55 juta per rumah," jelasnya. (adv/gus)

Edisi : Kamis, 20 Juni 2019

Hal : 6



## DPRD Bangli Sarankan Pemda Nolkan Dana PHR Badung ✓

**DPRD** Kabupaten Bangli kembali menggelar rapat kerja bersama sejumlah OPD. Rapat yang digelar Rabu (26/6) ini mengagendakan tindak lanjut dari masing-masing OPD, atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata serta dihadiri sejumlah anggota DPRD, dan delapan pimpinan OPD maupun perwakilannya. Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles dalam rapat itu, mempertanyakan sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kabupaten Bangli yang dinilai masih lemah, sehingga terus menjadi temuan BPK.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli untuk mengubah sistem pemungutan pajak dari manual ke sistem online. "Kalau pihak BKPAD mau menerapkan sistem online ini, pasti soal anggaran kita kawat," tegas politisi asal Desa Batur ini.

Dalam rapat itu pihaknya juga sempat menyinggung terkait belum adanya kepastian nilai bantuan keuangan khusus (BKK)



TRIBUN BALI/M FREDDY MERCURY

PHR Kabupaten Badung untuk Bangli. Apa yang diungkapkan politisi Partai Demokrat ini mengacu pada realisasi tahun 2018 lalu, dimana PHR Kabupaten Badung hanya terealisasi sebanyak Rp 47 miliar. Sedangkan asumsi eksekutif saat penyusunan anggaran, mencantumkan Rp 80 miliar.

Pun demikian dengan tahun ini, Carles mengungkapkan Kabupaten Bangli dijanjikan bantuan serupa, dengan nominal Rp 50 miliar. Walau demikian, bantuan tersebut belum ada kepastian. Dengan kondisi itu, pihaknya menyarankan agar eksekutif tidak memasang anggaran yang bersumber dari PHR Badung, pada penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Baik dalam anggaran perubahan tahun 2019, maupun penyusunan KUA/PPAS anggaran induk tahun 2020.

"Tujuannya agar tidak ada masalah di kemudian hari, lantaran memasang anggaran terlalu tinggi. Karena jika sudah dipasang, andaikan dana tersebut tidak terealisasi, maka ada kegiatan yang tidak bisa berjalan. Kedua, jika kegiatan telanjur berjalan, otomatis menjadi beban daerah untuk membayar. Lebih baik dinolkan saja. Kita memakai pola minimal dulu. Kalau dari awal kita telah tahu posisi keuangan kita rendah, kita bisa mengaturnya," ucapnya. (adv/mer)



# Badung Gelontorkan Rp 19 M Permak Taman Puspem ✓

● **Tata Ulang Pintu Utama dan Bangun Kolam Renang**

**MANGUPURA, TRIBUN BALI** - Pemerintah Kabupaten Badung terus menata taman di lingkungan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung.

Taman di depan pintu utama Puspem Badung kini dibongkar untuk ditata ulang. Biaya yang digelontorkan untuk itu cukup fantastis yakni Rp 19 miliar.

Pantauan di lapangan, Sabtu (29/6), semua pohon di taman depan pintu utama dihilangkan. Terlihat alat



TRIBUN BALI/GUS ARYANTA

**MAKET** - Maket taman dan kolam renang di jalan masuk Puspem Badung.

**BERSAMBUNG ● HAL 7**

## Badung Gelontorkan Rp 19 M... ✓

Sambungan **Hal.1**

berat sedang mengeruk tanah dan meratakannya.

Rumput-rumput hijau di taman yang letaknya persis di sebelah kanan dan kiri candi bentar pintu utama pun dibersihkan. Terdapat truk yang lalu lalang membawa tanah urukan. Kabarnya pintu masuk akan dirombak total untuk aksesibilitas lebih luas dan nyaman.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung IB Surya Suamba tak menampik biaya proyek penataan taman itu sebesar Rp 19 miliar.

Namun, menurutnya anggaran sebesar itu tak hanya untuk penataan di depan pintu utama, melainkan taman di halaman Balai Budaya.

"Ini proyek sedang berjalan untuk penataan taman di pintu utama Puspem setelah itu baru di Balai Budaya," ujarnya saat dikonfirmasi Sabtu (29/6).

Surya Suamba menjelaskan, tak hanya taman yang akan dipermak. Pintu utama Puspem Badung juga akan ditata kembali. "Gate pintu masuk juga," ujarnya.

Suamba mengatakan akan ada kolam di pintu masuk untuk menambah nuansa berbeda saat memasuki kawasan Puspem. "Kalau seperti gambar, nanti ada kolam bagian kanan dan kiri. Di atas kolam nanti ada patung banteng yang terlihat berlari," jelasnya.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Badung, IGA Ngurah Arinda Trisna-

wati mengatakan, pintu masuk utama Puspem juga akan dihiasi taman bunga. Taman bunga akan berada di tengah jalan menuju pintu masuk.

"Sudah berproses tamannya. Nanti ada kolam dan taman bunga," ujarnya. Trisnawati juga mengakui kawasan Balai Budaya juga akan ditata.

"Akan dibangun taman di belakang Balai Budaya dan sekitarnya. Bahkan nanti dibangun akses jalan menuju Balai Budaya tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Badung I Putu Eka Merthawan membenarkan ada proyek di depan pintu gerbang utama Puspem Badung. **(gus)**

Edisi : Minggu, 30 Juni 2019

Hal : 1 & 15



# Dewan Ancam Sampaikan ke KPK

■ Pertanyakan Dermaga Gunaksa Hilang dari RPJMD

**SEMARAPURA, TRI-BUNBALI** - Eksekutif dan Legislatif menggelar rapat gabungan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Klungkung, Selasa (11/6). Dalam rapat gabungan tersebut, dewan menyoroiti berbagai hal tentang program Pemkab Klungkung.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, Anak Agung Sayang Supartha mengancam akan membawa persoalan Dermaga Gunaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini karena Dermaga Gunaksa menghilang dari RPMJD. Terlebih

yang dikeluarkan untuk proyek pelabuhan berstatus antar provinsi itu sangat besar dan hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya.

"Penyelesaian Pelabuhan Gunaksa ada pada program RPJMD tahun 2013-2018. Anehnya dalam RPJMD kali ini, Dermaga Gunaksa justru tidak muncul dan malah menghilang," ungkap Agung Sayang.

Rapat gabungan dihadiri Sekda Klungkung, Gede Putu Winastra dan jajarannya di OPD Pemkab. Di hadapan Sekda, Agung Sayang sempat menyinggung tentang Pelabuhan Gunaksa yang dibangun saat pemerin-

tahan Bupati I Wayan Candra. Namun entah mengapa Dermaga Gunaksa yang di-nanti-nantikan masyarakat ini tidak masuk dalam program prioritas RPJMD tahun 2018-2023.

Berdasarkan catatan *Tribun Bali*, Pelabuhan Gunaksa mulai direncanakan sejak tahun 2006 dan selesai dibangun sekitar tahun 2008. Namun hingga saat ini pelabuhan antar pulau tersebut tidak kunjung dapat dioperasikan. Pelabuhan Gunaksa dibangun menggunakan anggaran pusat, provinsi dan kabupaten. Tahun 2014 saja, Pelabuhan Gunaksa telah

melenakan anggaran hingga Rp 230 miliar.

Sementara di tahun 2015, Pemerintah Pusat kembali mengesahkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk mempercepat penyelesaian. Pelabuhan Gunaksa sudah tiga kali dilakukan uji coba sandar kapal.

Namun ketiganya gagal karena kondisi gelombang yang sangat tidak memungkinkan kapal berlabuh di dermaga. Saat ini kondisi Pelabuhan Gunaksa mangkrak. Sejumlah komponen pelabuhan seperti breakwater hancur dan beberapa bangunan penunjang juga telah roboh diterjang air bah. (mit)



# 5 Pejabat Pemkot Denpasar Diperiksa

■ Dugaan Korupsi  
APBDes Dauh Puri  
Kelod Rp 1 M Lebih ✓

## DENPASAR, TRIBUN BALI

Lima pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar diminta keterangan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidwas) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Selasa (18/6). Para pejabat itu diperiksa terkait perkara dugaan korupsi APBDes Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, yang nilainya lebih dari Rp 1 miliar.

Kasi Pidwas Kejari Denpasar, Nengah Astawa, membenarkan pemeriksaan lima pejabat Pemkot Denpasar itu dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi APBDes Dauh Puri Kelod.

"Judi perkara ini sudah naik status dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. Untuk penyidikan, lima saksi ini yang pertama kami periksa," tegasnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Lima pejabat Pemkot Denpasar yang diperiksa adalah Inspektoral, Ida Bagus Gde Setiharta, Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Ida Bagus Ahi Wiradana, Kepala BPSD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang juga mantan Camat Denpasar Barat, Ida Bagus Jemi Wiratama, serta

BERSAMBUNG © HAL 7

## Lima Pejabat Pemkot...

Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), dan mantan Camat Denpasar Barat yang nama tak disebutkan Kasi Pidwas Kejari Denpasar.

Namun Astawa enggan berkomentar lebih banyak terkait materi pemeriksaan kemarin. Ia hanya mengungkapkan selanjutnya pemeriksaan akan dilakukan terhadap staf dan pejabat Desa Dauh Puri Kelod.

Terkait pemeriksaan mantan Perbekel Dauh Puri Kelod, I Gusti Made WN, pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pemeriksaan.

"Yang bersangkutan (mantan Perbekel) sudah sempat diminta klarifikasi saat pengumpulan data. Tapi untuk penyidikan belum diperiksa," tutur mantan jeksa di Kejari Gianyar ini.

Astawa juga menyebutkan, dari kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar sudah ada pengembalian ke kas daerah sekitar Rp 300 juta lebih. Yaitu dari mantan Perbekel Dauh Puri Kelod yang kini terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Denpasar, I Gusti Made WN sebesar Rp 8,5 juta. Kaur Keuangan Rp 102 juta dan Bendahara Rp 144 juta. "Sisanya sekitar Rp 770 juta ini masih kami dalam lagi. Ke mana saja

aliran uang ini," ucapnya.

## Berdasarkan LHP Khusus

Awal mula perkara ini dilaporkan karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dari Inspektoral Kota Denpasar. Mengacu pada LHP Khusus Inspektoral Kota Denpasar ditemukan selisih Sisa Lebih Penerimaan Anggaran (Sisla) tahun 2017 di Desa Dauh Puri Kelod. Nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Diceritakan Mardika (pelapor) kala itu, pada bulan Mei 2017 dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Denpasar. Termasuk monitoring di Desa Dauh Puri Kelod untuk anggaran tahun 2012 sampai 2016. "Dari hasil monitoring DPMD laporan tahun 2017 ditemukan selisih Sispa tahun 2016 Rp 1,8 miliar. Dari Sispa Rp 1,8 miliar itu, tidak ada ususnya kisaran Rp 900 juta lebih," ungkapnya.

Selanjutnya desa membentuk tim penelusuran, mencari selisih. Dari audit internal, kata Mardika, setelah melalui proses SPJ yang ada, memang terindikasi adanya penyimpangan. Hanya saja, pada waktu itu, tim belum berani menyampaikan finalisasi hasil temuan.



## Dipimpin Wabup, Peserta Diklatpim Kabupaten Joneponto Kunjungi Jembrana

**SEBANYAK** 70 peserta Diklatpim Tingkat IV Kabupaten Joneponto Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan kunjungan study banding ke Kabupaten Jembrana, Selasa (18/6). Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kabupaten Joneponto, Paris Yasir diterima Wakil Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Di hadapan Wabup I Made Kembang Hartawan serta Asisten I Setda Kabupaten Jembrana I Nengah Ledang dan segenap pimpinan OPD Kabupaten Jembrana, Paris Yasir mengatakan, kegiatan benchmarking (study banding) ini sangat strategis bagi pemerintah daerah dalam mendorong akselerasi pembangunan, khususnya pengembangan pariwisata, sesuai dengan visi pemerintah Joneponto yakni Joneponto Smart 2023 (berdaya saing, maju, religius dan berkelanjutan).

"Karena Bali telah dikenal luas pariwisatanya, maka kami berharap bisa belajar, terutama langkah-langkah pengembangan pariwisata yang



ada di Kabupaten Jembrana. Nantinya hasil selama kunjungan," ujar Yasir.

Selain sektor pariwisata, beberapa OPD terkait juga ikut menjadi obyek kunjungan, OPD itu antara lain BKPSDM, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kantor Camat Jembrana, termasuk beberapa kantor kelurahan yang berada dekat Kantor Bupati Jembrana.

Wabup Jembrana I Made

Kembang Hartawan mengatakan, dilihat dari PAD, Kabupaten Jembrana bukan tergolong kabupaten kaya jika dibandingkan kabupaten lainnya di Bali. Tahun ini PAD Jembrana hanya di kisaran Rp 128 M dengan total APBD sebesar Rp 1,1 triliun. "Namun demikian kami tetap optimistis untuk meningkatkan dan menggerakkan sektor-sektor pembangunan, khususnya sektor pariwisata," ujarnya. (adv)

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 4



## Ashari Ajukan Dua Saksi Tambahan

● Dugaan Korupsi yang Jerat Perbekel Celukan Bawang ✓

**SINGARAJA. TRIBUN BALI** - Perbekel Celukan Bawang, Muhammad Ashari kembali diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng untuk kali kedua, Selasa (18/6). Meski telah menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi sejak Januari lalu, ia tak kunjung ditahan.

Ashari bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor kejaksaan sekira pukul 14.00 Wita. Pemeriksaan dilakukan selama sekitar dua jam di ruang Kast Pidana Khusus (Pidsus). Sekira pukul 16.00 Wita, Ashari pun bergegas meringgalkan kantor kejaksaan dan enggan memberikan keterangan kepada awak media.

Sementara kuasa hukumnya, I Putu Arta menjelaskan, selama proses pemeriksaan, kliennya itu dicecar delapan pertanyaan. Ashari pun sebut Arta, hanya memberikan keterangan-keterangan tambahan seputar pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang.

Selain itu, Ashari juga

mengajukan dua saksi tambahan, sebagai upaya untuk meringankan kasus dugaan korupsi yang menimpanya. "Dalam hal penganggaran pembangunan ada miss sedikit. Kami juga akan ajukan saksi untuk meringankan," ujarnya kemudian meninggalkan kantor kejaksaan.

Kasi Pidsus Kejari Buleleng, Wayan Genip mengatakan, Ashari dipanggil ke kantor kejaksaan untuk diminta keterangan tambahan oleh tim dari penyidik sebagai upaya untuk melengkapi berkas perkara.

"Keterangan akan dikaitkan dengan keterangan-keterangan sebelumnya, serta keterangan dari saksi-saksi sebelumnya. Yang bersangkutan juga rencananya akan mengajukan dua saksi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan itu memang haknya," jelas Genip.

Jumlah saksi yang diperiksa sejauh ini diakui genip sudah 11 orang di luar dari saksi yang akan diajukan oleh Ashari nanti. Sebanyak 11 saksi yang diperiksa itu untuk

mengungkapkan atau membuktikan Ashari telah melakukan tindakan korupsi atas pembangunan kantor Desa Celukan Bawang. Namun Genip enggan membeberkan terkait keterangan apa saja yang diberikan oleh para saksi kepada pihak penyidik.

"Materi pemeriksaan belum bisa dijelaskan. Intinya saksi-saksi itu untuk menjelaskan proses dari pencarian dana dari pemberi dana, pelaksanaan pembangunan sehingga pembayaran kepada pelaksana pembangunan. Keterangan yang tadi diminta juga seputaran pembangunan dan pembayaran karena menurut tim penyidik masih ada yang perlu dilengkapi," jelasnya.

Genip tidak memungkiri hasil audit sudah diterima. Tercatat kerugian negara atas dugaan korupsi pembangunan kantor Desa Celukan Bawang yang dilakukan oleh Ashari sebesar Rp 194 juta. Kendati demikian, upaya penahanan belum dapat dilakukan.

"Kami meminta keterangan tambahan saya rasa sudah cukup. Jadi kami saat ini

sedang mempersiapkan untuk pemberkasan, sehingga bisa diserahkan ke penuntut umum. Upaya penahanan memang belum dilakukan, nanti kami lihat perkembangannya. Kami akan segera menyelesaikan perkara ini secepatnya," tutup Genip.

Ashari disebut menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar dari PT General Energy Bali (GEB) PLTU Celukan Bawang pada 2014. Uang itu diberikan sebagai bentuk tukar guling lahan kantor Desa Celukan Bawang yang dulunya berlokasi di Banjar Dinas Pundukan. Lahan kantor desa itu terkena relokasi pembangunan PLTU Celukan Bawang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, dana itu masuk ke rekening pribadi Ashari, bukan ke rekening pemerintah desa. Selanjutnya, kantor desa berpindah tempat dan dibangun di Banjar Dinas Celukan Bawang dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh CV Hikmah Lagas tanpa melalui proses tender, alias ditunjuk secara pribadi oleh Ashari. (rtu)

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 17



## Menunggu PHR Badung

**BERDASARKAN** data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Klungkung, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan beberapa ruas jalan di Klungkung daratan dan Nusa Penida. Namun hal tersebut sangat tergantung dengan bantuan PHR dari Kabupaten Badung.

Pemkab tahun ini hanya mengalokasikan anggaran dari APBD Klungkung sebesar Rp 19 miliar untuk perbaikan jalan di wilayah Klungkung daratan. Anggaran sebesar ini digunakan untuk mendanai 11 paket proyek jalan di Klungkung daratan.

Sedangkan usulan bantuan keuangan PHR dari Kabupaten Badung senilai Rp 15,2 miliar, dialokasikan untuk lima paket proyek jalan di Nusa Penida plus 2 paket di Klungkung daratan. Paket jalan di Nusa Penida yang diusulkan dananya dari PHR seperti paket Batumadeg-Sebuluh, Ambengan-Pehlit, Bunga Mekar-Sompang, Semaya-Pejukutan dan satu paket di Klungkung daratan yakni Selisihan-Timuhun-Getakan-Bakas: **(mit)**

Edisi : Rabu, 19 Juni 2019

Hal : 17



# LKPP Beri Dinas Perkimta Lampu Hijau

- Diperbolehkan Penunjukan Langsung Rekanan
- Buntut Mangkraknya Pengerjaan Patung Bung Karno

## SINGARAJA, TRIBUN BALI

- Setelah sempat moror selama beberapa bulan lantaran pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno tahap III akhirnya mulai ada titik terang. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) memperbolehkan Dinas Perkimta Buleleng selaku *leading sector* melakukan penunjukan langsung (PL) rekanan pematung untuk melanjutkan pembuatan patung Bung Karno yang sempat mangkrak.

Kepala Bidang (Kabid) RTH Dinas Perkimta Buleleng, Putu Setyawati dikonfirmasi Jumat (7/6) mengatakan, kebijakan LKPP itu muncul setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak LKPP di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari hasil koordinasi yang dilakukan, pihak LKPP telah memberikan

petunjuk untuk melakukan PL terhadap rekanan untuk melanjutkan pembuatan patung Bung Karno hingga 100 persen tersebut.

"Dari hasil koordinasi, memang LKPP memberikan petunjuk kepada kami (Dinas Perkimta, red) untuk langsung melakukan PL (penunjukan langsung, red) terutama untuk pembuatan patung Bung Karno," kata Setyawati.

Kendati mendapat lampu hijau dari LKPP, namun pihak Perkimta sebut Setyawati, tidak mau gegabah untuk langsung menyikapi petunjuk tersebut. Pihaknya merasa masih perlu berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkup Pemkab Buleleng untuk menemukan rumus dan mencari payung hukumnya sebelum langsung dilakukan PL.

"Kami masih koordinasi dengan BLP dan Inspektorat, apakah PL untuk rekanan atau langsung ke pematung

karena spesifikasinya khusus. Banyak hal yang harus kami koordinasikan agar tidak terjadi persoalan hukum nantinya. Hasilnya nanti setelah kami lakukan koordinasi dengan instansi terkait," pungkas Setyawati.

Seperti diketahui, rekanan PT Chandra Dwipa berhasil memenangkan tender pengerjaan RTH Bung Karno tahap ke III dengan nilai kontrak Rp 5,49 miliar. Proyek

liputi pembangunan patung Bung Karno, pembangunan open stage Singa Ambara Raja, wantilan, termasuk beberapa landscape di sekitar taman tersebut, dikerjakan selama 120 hari kalender terhitung 24 Agustus hingga 21 Desember 2018 lalu.

Rupanya, dalam waktu 120 hari pihak mereka belum mampu menuntaskan pengerjaan proyek. Pihak Perkimta pun memberikan perpanjangan pengerjaan

kepada rekanan selama 50 hari, terhitung 22 Desember 2018 hingga 9 Februari 2019. Meski sudah diberikan waktu tambahan, namun pengerjaan tak kunjung usai.

Pasalnya, sentiman patung dari Yogyakarta ini baru mampu menyelesaikan bagian kaki, kepala, dan bagian badan bawah dari patung Bung Karno. Sedangkan, bagian badan atas dan tangannya belum tuntas. (rta)



## Anggarkan Rp 5 Miliar Bangun Gedung Akses Data Lintas Dinas

SINGARAJA, TRIBUN BALI - Pembangunan gedung Buleleng Command Centre (BCC) oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, ditargetkan mulai dilakukan bulan Agustus 2019 mendatang. Pemerintah sudah menetapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang bangunan itu nantinya di-

fungsiikan untuk menjadi tempat mengakses data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Buleleng.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Kominfo Sandi) Buleleng, Ketut Suweca mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan proses tender.

Untuk menentukan siapa pemenangnya, dibutuhkan waktu selama satu bulan. Sehingga diperkirakan pembangunan BCC dapat dilakukan pada Agustus 2019 mendatang.

Pagunya Rp 4,6 miliar. Kemudian ditambah biaya untuk membuat *Detail Engineering Design* (DED) dan

pengawasan sehingga totalnya Rp 5 miliar," katanya, Jumat (14/6).

Imbuh Suweca, pembangunan BCC ini akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama dimulai dengan pembangunan fisik. Sementara pembangunan tahap kedua, memasang interior dan melengkapi peralatan

elektronik sehingga berfungsi sebagai pusat komando para pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan. BCC sudah dapat digunakan pada 2020 mendatang. "Nanti itu jadi tempat sumber informasi yang sifatnya elektronik," ucapnya.

BCC dibangun di sebelah barat kantor bupati atau di-

bangunan bekas koperasi. Bangunannya akan dibuat berlantai dua dengan luas kurang lebih 4,5 are. Dari bangunan berlantai dua itu, sebagian akan digunakan sebagai BCC, sebagian lagi akan menjadi ruang rapat pimpinan, serta digunakan sebagai perkantoran Dinas Kominfo Sandi. (rtu)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 5



## Ketua Dewan Sebut Festival Kurang Efektif ✓

### ● Usulkan Anggaran Dialihkan ke Infrastruktur

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Pemkab Klungkung beberapa tahun terakhir, rutin melaksanakan festival. Hal ini ternyata disoroti oleh Ketua DPRD Klungkung, I Wayan Baru saat rapat kerja dengan eksekutif beberapa hari lalu. Politikus Partai Gerindra ini menilai, festival tidak efektif dan lebih baik anggarannya dialokasikan ke kegiatan skala prioritas.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Nengah Sukasta menjelaskan, selama ini terdapat beberapa festival yang rutin digelar di Klungkung setiap tahunnya. Seperti Festival Semarapura pada bulan April dan Festival Nusa Penida pada bulan Oktober. Festival ini baru rutin digelar dimasa pemerintahan Bupati I Nyoman Suwitra.

Dua festival ini menurutnya sangat efektif untuk promosi pariwisata, khususnya festival Nusa Penida yang selalu men-



TRIBUN BALI/ETA SUPUTRA

**GEMERLAP FESTIVAL** - Suasana helatan Semarapura Festival ke IV belum lama ini.

dapatkan animo positif dari wisatawan. "Festival cara promosi pariwisata yang efektif," ungkap Sulgasta, Jumat (14/6).

Kata dia, festival juga memberikan ruang UMKM untuk menjual dan memperkenalkan produknya. Memberikan panggung dalam pelestarian seni dan budaya, serta menjadi hiburan bagi masyarakat Klungkung.

Saat ini juga ada festival

layang-layang dan festival surfing. Total keempat festival tersebut menghabiskan anggaran Rp 5 miliar setiap tahunnya. "Festival harus tetap dilaksanakan," jelasnya.

Sebelumnya, Wayan Baru mengungkapkan, kritikan festival merupakan aspirasi masyarakat yang harus disampaikan. Masalah infrastruktur menurutnya jauh lebih penting daripada festival. (mit)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 4



## Karangasem Tunggu Kucuran PHR Badung

### ● Akan Dipakai untuk Mempercantik Pantai Yeh Malet

#### AMLAPURA, TRIBUN BALI

Penataan Pantai Yeh Malet, Desa Antiga, Kecamatan Manggis rencana dilanjutkan akhir 2019. Anggarannya dari dana Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung. Sejumlah perbaikan dilakukan pada area parkir, lapak pedagang, dan akan dibangun rumah petani garam.

Kepala Dinas Pariwisata Karangasem, Wayan Astika mengungkapkan, saat ini Pemkab Karangasem sedang me-

nunggu dana PHR Badung cair untuk bisa melanjutkan penataan. Harapannya, pedagang dan masyarakat yang istirahat merasa nyaman.

"Kalau dokumen pengerjaan dan tender sudah ada. Mau bulan sekarang ditenderkan, tapi kami tunda karena dana bantuan (PHR) dari Badung belum cair. Semoga anggaran segera dicairkan," kata Astika, Jumat (14/6).

Ditambahkan, dana PHR

Badung rencana digunakan untuk memperluas areal parkir, dan menambah lapak pedagang. Jumlah lapak pedagang yang ada enam unit dan rencana ditambah tujuh unit lagi. "Satu unit bisa tampung sekitar empat hingga enam pedagang," ungkapnya.

Penataan lanjutan Pantai Yeh Malet dilakukan mengingat banyak warga yang istirahat terutama peengendara tujuan Klungkung dan Denpasar, di Pantai yang berada

sekitar perbatasan Karangasem-Klungung.

Ketut Latra, warga asal Desa Antiga mengatakan, penataan Pantai Yeh Malet berdampak signifikan. Pantai yang dulunya kotor dan tidak terurus kini menjadi tempat berswafoto. Setiap sore hari, kata Latra, di area Yeh Malet ramai dijadikan tempat nongkrong.

Penataan Pantai Yeh Malet dilakukan Oktober 2018, dan kembali dilanjutkan akhir

2019. Penataan awal memakai APBD Induk 2018 sekitar Rp 2,2 miliar. Pengerjaan meliputi pembangunan gazebo, lapak, jalan setapak, dan parkir.

Pantai Yeh Malet ditata untuk mempercantik wisata di Karangasem. Apalagi pantai pasir hitam ini berada di perbatasan serta memiliki potensi berkembang. Awalnya Pantai Yeh Malet tak terurus. Sampah plastik dan dedaunan berserakan. Warung pun tak teratur dan kumuh. (ful)

Edisi : Sabtu, 15 Juni 2019

Hal : 4



# Dua Hotel Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar

## SINGARAJA, TRIBUN BALI

- Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng memberikan surat peringatan kedua (SP2) terhadap dua hotel penunggak pajak di kawasan Lovina. Hotel tersebut yakni Hotel Sunari dan Hotel Melka.

Tim Yustisi dari BKD Buleleng bersama Pol PP Buleleng pun mendatangi dua hotel tersebut, Jumat (21/6) kemarin. Petugas sejurusnya melakukan pemasangan stiker di front office hotel.

Pemasangan stiker itu merupakan peringatan yang diberikan bagi hotel penunggak pajak. Hotel Sunari sebagai wajib pajak belum membayar sisa tunggakan dari tahun 2012 sampai 2018 yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar. Sementara Hotel Melka dari tahun 2012 sampai 2018 dengan tunggakan pajak mencapai Rp 500 juta.

Kepala Bidang Pelayanan

tan administrasi, juga ada seorang tukang kebun dan penjaga malam.

"Pagi tadi (kemarin) saya dihubungi oleh akuntan publik yang ditunjuk manajemen

dan Penagihan Pajak. I Gede Sasnita Ariawan mengatakan, hotel-hotel tersebut sebelumnya telah diberikan teguran dan pihaknya telah berupaya secara persuasif.

"Namun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut tidak sesuai harapan," ujarnya.

Pihak BKD dengan terpaksa melayangkan SP2 sesuai dengan Perbup nomor 18/2018 pasal 11 ayat (5), tentang perubahan atas Perbup Nomor 9/2017 tentang tata cara pemungutan pajak hotel.

Bila dalam rentang waktu tujuh hari, SP2 tersebut tidak digubris oleh kedua hotel, maka akan dikenakan sanksi berupa penyitaan, pemberhentian operasional hotel hingga pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 8/2011 tentang pajak hotel.

Sekretaris BKD Buleleng, Ni Made Susi Adnyani mengatakan, selama ini pihak BKD

hotel. Saya diminta kalau ada yang perlu ditandatangani, tandatangani saja. Surat pernyataan dari tim BKD itu ya saya tandatangani saja," jelasnya. (rtu)

tetap melakukan penagihan secara humanis namun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang dalam hal ini Hotel Sunari dan Melka Lovina tidak maksimal.

Melalui surat peringatan kedua yang dilayangkan BKD Buleleng dengan melabeli hotel-hotel tersebut dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak. Pembayaran pajak dari para wajib pajak penting adanya untuk dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan daerah serta membantu pembangunan daerah.

Pegawai Hotel Sunari, Komang Sri Seniantari dalam pertemuan dengan pihak BKD Buleleng mengatakan hotel tersebut sudah resmi tidak beroperasi sejak Januari 2019. Namun ia tidak mengetahui persis alasan penghentian operasional hotel tersebut. Pun Seniantari mengaku pegawai yang bekerja saat ini selain dirinya sebagai man-

Edisi : Sabtu, 22 Juni 2019

Hal : A



# Siswa Dijatah Uang Jahit Rp 110 Ribu

■ Seragam SD-SMP Negeri Ditender  
Rp 5,9 Miliar

**MANGUPURA, TRIBUN BALI** – Tahun ajaran 2019/2020 siswa baru seluruh sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Badung dijatah seragam gratis. Seragam gratis ini rencananya akan dibagikan pada bulan September mendatang. Siswa akan diberikan dalam bentuk kain, sedangkan biaya jahitnya dianggarkan Rp 110 ribu per stel per siswa.

Setelah pakaian yang akan diberikan kepada para siswa yakni, setelan merah-putih (SD), biru-putih (SMP), setelan endek, pramuka dan pakaian olahraga. Beberapa seragam ini sudah masuk tahap tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. Proyek pengadaan seragam ini berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung.

Jenis seragam yang su-

dah masuk tahap tender yakni, pengadaan seragam siswa kelas I SMP Negeri di Badung khusus untuk bahan seragam endek sekolah dengan nilai Pagu Paket sebesar Rp 3.111.955.000, dan Harga Perkiraan Sendiri : Rp 3.031.124.191,70. Sedangkan untuk siswa SD Negeri seragam endek dianggarkan dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp 2.805.000.000,00 dan HPS Rp 2.664.750.000,00. Total pagu anggaran untuk seragam kedua jenjang sekolah tersebut adalah Rp 5,9 miliar. Semua seragam ini pun anggarannya bersumber dari APBD Badung Tahun Anggaran 2019.

Kepala Bidang Gedung dan Sarana Disdikpora Badung, Putu Roby Widya Harsana mengatakan, seragam sudah masuk tender untuk siswa baru tingkat SD dan SMP negeri di Badung. "Iya, ada pengadaan seragam gratis untuk siswa baru tingkat SD dan SMP

negeri," ujarnya, Jumat (28/6).

Seragam ini, kata dia, akan diberikan secara gratis khusus untuk siswa baru yang bersekolah di SD dan SMP Negeri. Adapun beberapa setelan seragam yang akan diberikan, seperti seragam pramuka, seragam endek, seragam olahraga dan seragam merah putih untuk SD dan seragam putih biru untuk SMP.

Dalam pembagiannya, para siswa baru akan diberikan dalam bentuk kain. Kemudian siswa yang akan menjahit sesuai dengan ukurannya. Namun, ongkos jahit akan tetap dibayar oleh pemerintah. "Ongkosnya ditanggung pemerintah. Jadi ongkos jahit akan diberikan sebesar Rp 110 ribu per stel," jelasnya.

Pihaknya mengaku, jika tender tidak ada halangan, seragam akan dibagikan pada bulan Maret mendatang. (gus)



## DPRD Klungkung Soroti Laporan Keuangan PDNKK

### ● Keluarkan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP BPK RI

**DPRD** Klungkung memberikan rekomendasi umum dan khusus, perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkab Klungkung tahun anggaran 2018. Rekomendasi ini disampaikan saat sidang paripurna yang dihadiri Wakil Bupati, Made Kasta, di Gedung DPRD Klungkung, Senin (17/6).

Dalam rekomendasi khususnya, Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru menyimpulkan perihal laporan keuangan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Klungkung yang kurang diyakini andal, karena tidak menyajikan informasi akurat dan belum pernah diaudit oleh kantor akuntan publik. Padahal tahun 2108, operasional PDNKK dihentikan karena direksi mengundurkan diri.

"Walaupun direksi mengundurkan diri, PDNKK masih diwajibkan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba per 31 Desember 2018 dengan posisi tidak balance," ujar Baru.

Ada pula beberapa hal yang menjadi penekanan DPRD Klungkung, terkait kondisi PDNKK yang operasionalnya dihentikan. Salah satunya pengakuan penambahan investasi permanen berupa penyertaan modal tanah 72.880 meter persegi di Desa Jumpai dengan nilai akun sebesar Rp 9,5 miliar dari Pemkab Klungkung.

"Hal ini perlu diperjelas statusnya, sebagai upaya penga-



manan aset daerah ketika operasional PDNKK dihentikan. Apalagi penyertaan modal tanah tersebut tidak didasari dengan peraturan daerah tersendiri," jelas Baru.

Politisi Partai Gerindra ini bahkan menyimpulkan janji Bupati Suwirta yang menyatakan PDNKK akan sehat dalam tenggang waktu secepatnya setelah dilantik atau jika terpilih sebagai bupati. Hal ini sesuai janji Suwirta pada saat debat publik Pilkada tahun 2013 di Balai Budaya Klungkung. "Namun kenyataannya saat ini justru PDNKK dihentikan operasionalnya karena bisnisnya tidak sehat," kritiknya.

Baru juga menyoroti penataan aset tetap Pemkab Klungkung yang belum memadai. Misalnya aset tetap yang berada dalam penguasaan pihak III berupa 18 unit sepeda dan 42 unit sepeda motor pada dua OPD yang tersebar di tingkat Desa Adat dan Desa Dinas, yang belum didukung dengan berita acara pinjam pakai.

Disamping itu ada aset te-

tap yang perolehannya dari bantuan pusat non APBD pada satu OPD belum ditambahkan. Meskipun sudah ada berita acara serah terima antara pusat dan Pemkab dengan total Rp 190,60 juta dan Rp 465,57 juta. Yang mengherankan lagi konstruksi fisik yang statusnya penyelesaiannya belum jelas sehingga dimasukkan dalam konstruksi dalam pengerjaan yakni pembangunan gedung SD 2 Semarapura Tengah Rp 937,26 juta. Padahal dibangun pada tahun anggaran 2015.

"Ini tentu berpotensi terhadap kehilangan aset tetap, karena tidak didukung dengan berita acara pinjam pakai. Termasuk terjadi ketidakpastian status kelanjutan KDP, kapan dapat dilakukan dalam aset tetap," jelasnya.

Terkait rekomendasi umum, DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati Klungkung beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. (adv/mit)



## Khawatir Pembiayaan Pilkel Picu Gugatan

**NEGARA, TRIBUN BALI** - Pemilihan Perbekel (Pilkel) di 35 desa di seluruh Jembrana dijadwalkan akan digelar September 2019 mendatang. Bulan lalu sudah masuk tahapan penjangkangan pencalonan. Bahkan sudah ada desa yang menetapkan calon perbekelnya. Hanya saja, pelaksanaan ini dinilai ada kecacatan hukum. Terutama soal skoring syarat seorang calon dan anggaran yang tidak memadai.

Anggota Komisi A DPRD Jembrana, Putu Dwita me-

ngatakan, pelaksanaan pemilihan perbekel Jembrana cacat hukum. Alasannya adalah tidak ada dasar hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Itu menyangkut beberapa pasal mengenai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dalam pilkel ini juga diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 65 tentang pemilihan kepala desa perubahan dari Permen Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Di mana persoalan

anggaran dan skoring menjadi sangat tidak relevan.

Yang dikhawatirkan adalah nantinya akan ada gugatan persoalan pembiayaan pilkel. Sebab pembiayaan pilkel itu APBD bukan kemudian dibebankan dari APBDes," ucapnya, Senin (17/6).

Pembiayaan pilkel kali ini mengalami penurunan dari kebutuhan pilkel awal. Mula nya pembiayaan Rp 2,8 miliar kemudian disetujui Rp 1,8 miliar. Kemudian sisa dari kekurangan itu diambil dari APBDes untuk mencukupinya.

Assisten 1 Pemkab Jembrana, Nengah Ledang menjelaskan, Pemkab Jembrana itu sudah meminta pendapat dari Kemendagri, apakah dengan anggaran desa diperbolehkan. "Apa rekomendasi itu, baru kami akan bersikap. Soal anggaran dana memang APBD yang digunakan. Tapi karena yang bisa turun hanya Rp 1,8 miliar maka kami meminta fatwa dari Kemendagri. Arahannya memang diperbolehkan," tegasnya sembari menunjukkan rekomendasi surat Kemendagri. (ang)



## Dewan Pertanyakan Langkah Eksekutif Terkait Temuan BPK

SEJUMLAH fraksi dalam DPRD Bangli mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK RI. Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bangli tahun anggaran 2018, Senin (24/6).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata tersebut dihadiri Bupati Bangli, I Made Gianyar, serta anggota DPRD Bangli dari seluruh fraksi. Dalam agendanya, digelar penyampaian rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang LPTJ anggaran tahun 2018, serta pandangan umum fraksi-fraksi terhadap seluruh ranperda itu.

Melalui pembicaraannya I Wyan Wedana, Fraksi PKPI Bangli mempertanyakan alasan pendapatan daerah tidak mampu tercapai sesuai target. Selain itu, Fraksi PKPI juga mempertanyakan langkah-langkah pemerintah untuk menindaklanjuti temuan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Bali.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fraksi Gotikar,



TRIBUN BALI/M FREDEY MERCURY

mengapa target pendapatan tersebut tidak terealisasi? Serta apa faktor-faktor penyebabnya? Selain itu, mohon dijelaskan pula apa yang dimaksud pengelolaan pendapatan daerah oleh BKPAD Bangli tidak sesuai ketentuan, sesuai dengan temuan BPK," ungkapnya.

Fraksi Demokrat melalui pembicaraannya I Made Krisnawa, memberikan apresiasi terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap laporan keuangan Bangli tahun 2018. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah bisa memaksimalkan potensi daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, Demokrat juga me-

raih maupun BKPAD.

Langkah yang bisa diambil diantaranya melakukan pendataan kepada penyelenggara usaha, yang belum terdata sebagai wajib pajak. Disamping itu juga memperketat pengawasan, serta monitoring secara berkelanjutan terhadap WP. Pihaknya juga meminta BKPAD untuk memerintahkan 27 wajib pajak yang memanfaatkan air bawah tanah agar memasang meteran serta mengurus izinnya.

"BKPAD perlu koordinasi dengan instansi lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian tahun depan penerimaan pajak bisa lebih ditingkatkan," ungkapnya. (adv/mer)

Edisi : Selasa, 25 Juni 2019

Hal : 4



## Dorong Pertumbuhan Ekonomi, PLN UID Bali Berhasil Tingkatkan Penjualan Sebesar 8,43 % di Kuartal I 2019 ✓

PLN Unit Induk Distribusi Bali berhasil meningkatkan penjualan sebesar 8,43 % pada Kuartal I 2019. Hal ini tidak lepas dari upaya PLN untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan listrik dan meningkatkan kinerja operasi.

Pada kuartal I tahun 2019 pertumbuhan meningkat sebesar 145,6 MWH dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PLN mampu mencapai realisasi kinerja yang lebih baik dibanding kuartal I tahun se-

belumnya.

General Manager PLN UID Bali Nyoman S Astawa menyampaikan pertumbuhan positif pada pemakaian tenaga listrik di Bali menjadi pertanda positif pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali. "Pertumbuhan tertinggi terjadi Maret 2019, kami harap akan terus bergerak positif hingga akhir tahun," ujar Astawa. Ia menambahkan bahwa peningkatan kebutuhan tenaga listrik Bali diprediksi mencapai 6,4 persen.

Menyikapi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik

yang fluktuatif di Bali, Astawa menyampaikan bahwa PLN telah siap meningkatkan pelayanan dan keandalan jaringan. "Rencana penguatan sistem sudah dibuat dalam RUPTL, semoga semua berjalan sesuai rencana," harapnya. PLN menargetkan pembangunan jaringan penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan dan jaringan transmisi untuk memperkuat sistem kelistrikan.

Saat ini Bali dipasok listrik dengan total kapasitas 1274 MW dan beban puncak 900,1 MW. (adv)

Edisi : Selasa, 29 Juni 2019

Hal : 5



## PO LPD di Badung Tembus Rp 735 Juta

**DENPASAR, TRIBUN BALI** - Ketua Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali, I Nyoman Cendekiawan, mengatakan dari 1.434 LPD, aset LPD di Bali mencapai Rp 22 triliun. Beberapa LPD bahkan berkembang pesat, khususnya yang berada di wilayah Badung.

Berdasarkan laporan laba rugi, konsolidasi periode Desember 2018 di seluruh Bali, tercatat bahwa pendapatan operasional (PO) di Badung mencapai Rp 735 juta lebih. Disusul Kabupaten Gianyar dengan pendapatan operasional mencapai Rp 555 juta lebih, kemu-

dan Buleleng Rp 276 juta lebih, Denpasar Rp 263 juta lebih, Tabanan Rp 215 juta lebih, Karangasem Rp 176 juta lebih, Bangli Rp 132 juta lebih, Klungkung Rp 113 juta lebih, Jembrana Rp 88 juta lebih.

"Totalnya seluruh Bali Rp 2 miliar lebih," sebutnya, kepada *Tribun Bali*, Senin (24/5).

Hal ini sejalan dengan biaya operasional yang dikeluarkan, terbesar di Kabupaten Badung mencapai Rp 577 juta, kemudian Gianyar Rp 436 juta, disusul kabupaten lain. "Sementara jumlah biaya operasional paling kecil adalah di

Kabupaten Jembrana Rp 66 juta lebih," katanya.

Begitu juga jumlah laba rugi tahun berjalan, paling besar disumbang Kabupaten Badung hingga Rp 158 juta lebih dan paling sedikit Jembrana Rp 21 juta lebih. Cendekiawan mengatakan, tingginya pendapatan operasional di Badung karena potensi daerahnya dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.

"Banyak LPD besar di Badung, seperti LPD Kuta, LPD Pecatu, LPD Kerobokan, LPD Bualu, dan LPD Kedonganan," sebutnya. (ask)

Edisi : Selasa, 25 Juni 2019

Hal : 3



# 1 Paket Harganya Rp 8,6 M ✓

## DLHK Denpasar Datangkan Alat Pengurai Sampah

**DENPASAR, TRIBUN BALI** - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar menganggarkan Rp 8,6 miliar untuk pengadaan alat pengurai sampah di Denpasar. Anggaran tersebut nantinya meliputi 1 paket peralatan pengurai sampah, yakni truk weloader, truk sampah, alat penyapu jalan, truk tangga hingga alat Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) underground.

Kepala DLHK Kota Denpasar, I Ketut Wisada mengatakan, penga-

daan alat ini dirasa penting mengingat pihaknya mulai kewalahan dalam proses mengurai sampah. Jumlahnya pun terus melonjak.

Data Tribun Bali, dalam sehari, Kota Denpasar hasilkan 3.500 kubik atau 1.200 ton sampah per hari.

Volume sampah ini sama dengan pengangkutan sebanyak 530 kali angkut ke TPA.

Hal ini ditambah dengan kondisi fasilitas alat yang belum mencukupi. Pengadaan alat tersebut, kata

dia, sebagai upaya mempercepat proses pengangkutan sampah agar tidak menumpuk.

"Dengan adanya penambahan alat tersebut, diharapkan petugas di lapangan bisa lebih cepat memproses pengangkutan sampah yang ada," jelasnya. Untuk sementara hingga saat ini kata dia untuk truk weloader senilai Rp 1,6 miliar. "Sekarang sudah datang berada di TPA, tinggal menunggu pengoperasian. Pengoperasian akan dilakukan setelah petugas DLHK mendapat arahan pemakaian

dari petugas pengadaan," kata dia.

Untuk alat lain masih dalam proses pengiriman seperti alat penyapu senilai Rp 1,6 miliar, truk tangga Rp 1,7 miliar, alat TPSS Underground Rp 3,5 miliar, dan truk pengangkut sampah *double cabin* senilai Rp 420 juta.

"Diharapkan dengan kelengkapan alat ini bisa mempercepat penguraian sampah. Nanti di TPSS Kereneg juga akan dibangun TPSS underground, jadi kasus sampah meluber tidak bisa terjadi lagi," katanya. (azm)



## Carles Minta PU Tegur Kontraktor ✓

### ● Minta Tagih Janji Perbaiki Jalur Culali

**KUALITAS** jalan hotmix di jalur Culali, Dusun Yeh Mampeh, Desa Batur Selatan, Kintamani telah mengalami kerusakan di sejumlah titik. Padahal dari segi usia, usia jalan itu masih berumur jagung pasca serah terima perbaikan Desember 2018 lalu.

Kerusakan jalan di jalur Culali sejatinya telah diketahui sejak bulan Januari lalu. Meski saat ini masih masuk dalam masa pemeliharaan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak rekanan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles, Minggu (16/6). Dikatakan, kerusakan jalan diantaranya berupa ambles pada pinggir jalan, rabat beton rusak dan mengelupas, serta badan jalan yang berlubang. Carles menambahkan, kerusakan ini terjadi di beberapa titik serta sudah terjadi sejak sebulan pasca serah terima.

Kerusakan jalur sepanjang 2,5 kilometer ini tidak dipungkiri mendatangkan banyak keluhan masyarakat. Pihaknya sudah sempat meminta rekanan untuk melakukan perbaikan. Walaupun disanggupi, namun rekanan meminta tenggang waktu pengerjaannya dimulai setelah musim hujan. Alasan tersebut dinilainya cukup logis. Sebab perbaikan jalan saat musim penghujan cenderung mubazir, lantaran jalan akan cepat mengalami kerusakan. "Untuk itu saya beri toleransi. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut berupa perbaikan. Padahal sudah masuk mu-



**KONDISI** kerusakan di jalur culali

sim kemarau," katanya.

Mengenai hal ini, Politisi asal Desa Batur tersebut meminta Dinas PUPRKim Bangli turut bertanggungjawab dengan memerintahkan pihak rekanan agar segera melakukan perbaikan. Upaya ini dilakukan, mengingat jalur tersebut masih dalam masa pemeliharaan dari pihak rekanan selama 180 hari. "Saya minta Dinas PU menegur rekanan agar segera melaksanakan janjinya, sebelum kerusakan kian parah. Terlebih saat ini masih dalam masa pemeliharaan. Jadi jangan sampai masa pemeliharaan habis, maka nanti pemborong lepas tangan," tandasnya. (adv)

Edisi : Senin, 17 Juni 2019

Hal : 5



## Penghasilan Pemkab dari Pura Besakih Turun Drastis

### ● Layangkan Surat Kajian Revisi Pergub Pengelolaan

**AMLAPURA, TRIBUN BALI** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem melayangkan surat kajian revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2016 terkait pengelolaan kawasan Pura Besakih ke Gubernur Bali.

Surat dilayangkan 25 Maret lalu. Ini karena pendapatan yang diperoleh Pemkab Karangasem lebih sedikit dibanding sebelum dibentuk badan pengelola. Sekarang Pemkab hanya mendapat Rp 525 juta. Sedangkan sebelum dibentuk badan pengelola pendapatan Pemkab mencapai Rp 1,3 hingga 1,5 miliar.

"Turun drastis. Pendapatan retribusi setelah dipotong biaya operasional dibagi tiga. Pemkab Karangasem dengan badan pengelola masing-masing dapat 25 persen. Sedangkan Desa Adat



TRIBUN BALI/SAPUL ROHM

#### I WAYAN ASTIKA

Besakih dapat 50 persen," kata Astika, Kamis (13/6).

Karena kondisi ini Pemkab mengajukan revisi terhadap badan pengelola kawasan Pura Agung Besakih yang dibentuk Pemprov Bali dengan dasar Pergub No 51 Tahun 2016. "Padahal Pemkab miliki wewenang memungut retribusi," kata dia.

Pemerintah Karangasem memberikan beberapa ma-

sukan terkait pengelolaan Pura Besakih dalam surat tersebut. Satu di antaranya meminta pemprov agar delegasikan pembentukan badan pengelola ke bupati sebagai kepala pemerintah daerah.

Unsur penasehat dan pengawas badan pengelola pangisian dari provinsi. Pengisian unsur badan pengelola diserahkan ke pemerintah kabupaten, selanjutnya Pemkab dimintakan persetujuan penasehat dan pengawas sebagai wakil pemerintah provinsi.

Selain itu, kata Astika, badan pengelola melaporkan seluruh kegiatan kerja ke Gubernur Bali melalui bupati dan bertanggungjawab ke gubernur. Setiap satu tahun sekali gubernur melakukan evaluasi dan saat evaluasi gubernur mempertimbangkan masukan bupati.

Penyusunan pedoman dan manual penyelenggaraan pengelolaan kawasan Pura Agung Besakih diserahkan ke manajemen operasional. Selanjutnya disahkan oleh badan pengelola setelah dapat persetujuan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Badan pengelola dapat diketuai bupati dengan menunjuk pelaksana harian, bidang-bidang di bawahnya terdiri atas organisasi pemerintah daerah kabupaten dan organisasi sosial. Pengisian manajemen operasional didasarkan atas asas profesionalisme.

Masukan terakhir yakni desa adat maupun pemerintah desa dapat bekerjasama membentuk unit usaha bersama untuk patner badan pengelola dengan pola persentase bagi hasil yang diatur," ujarnya. (ful)



# Tunjangan Rumah Dewan Capai 35 Juta

■ Pemkab Siapkan Fasilitas untuk 30 DPRD Terpilih

**SEMARAPURA, TRIBUN BALI** - Pelantikan 30 anggota dewan terpilih akan dilakukan bulan Agustus mendatang. Pemkab Klungkung telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai beragam fasilitas yang akan dinikmati para wakil rakyat ini.

Tak tanggung-tanggung, para dewan akan mendapatkan beragam fasilitas mulai dari pin emas hingga tunjangan perumahan yang nominalnya mencapai hingga Rp 35 juta setiap bulannya.

Kabag Umum Sekretariat Dewan Ketut Sukla membeberkan beberapa fasilitas yang akan diterima oleh 30 anggota dewan terpilih. Pemkab telah menyiapkan pin berbahan emas dengan berat 7-8 gram yang akan diberikan kepada setiap anggota dewan terpilih. Anggaran pin emas ini senilai Rp 240 juta.

"Setelah dilakukan survei lapangan, anggaran pin emas tidak sampai Rp 240 juta. Jika nanti di bawah Rp 200 juta, maka akan dilakukan penunjukan langsung," ujar Ketut Sukla, Kamis (13/6).

Sementara untuk seragam, setiap anggota dewan dialokasikan baju pelantikan (pakaian seragam lengkap), lengkap dengan peci minus sepatu Rp 5 juta per orang. Untuk pakaian seragam lengkap dialokasikan dua kali selama masa jabatan (lima tahun).



**WAKIL RAKYAT** - Anggota dewan saat rapat perspurna di Kantor DPRD Klungkung belum lama ini.

Selain itu, anggota dewan juga dialokasikan pakaian dinas harian seharga Rp 1,5 juta per orang, pakaian seragam harian seharga Rp 1,5 juta per orang. Para anggota dewan juga mendapatkan jatah pakaian seragam resmi seharga Rp 1,8 juta per orang dan pakaian ciri khas daerah Rp

1,5 juta per orang.

"Selain pakaian, anggota dewan juga menerima tunjangan lainnya. Seperti tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi," ungkap dia.

Tunjangan perumahan nominalnya berbeda antara unsur pimpinan dengan anggota. Untuk ketua DPRD

dijatah tunjangan perumahan Rp 35.294.118 setiap bulan. Sedangkan wakil ketua mendapat tunjangan perumahan Rp 29.411.765 setiap bulannya. Sementara anggota dewan menerima tunjangan perumahan Rp 25.882.353 setiap bulan.

Selain itu, setiap anggota dewan juga dimanjakan dengan tunjangan transportasi. Setiap anggota menerima jatah tunjangan transportasi Rp 4.182.941 setiap bulan. Sementara unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua), tidak lagi menerima tunjangan transportasi karena sudah mendapatkan fasilitas kendaraan mewah.

Tidak hanya itu. Setiap anggota dewan pun dijatah tunjangan belanja perumang komunikasi Rp 6.300.000 setiap bulannya. Saat menjalankan reses, wakil rakyat ini juga diberikan tunjangan reses Rp 6.300.000 per anggota, yang diberikan setiap kali reses. Dewan dijadwalkan menjalankan reses 3 kali dalam setahun. (mit)



# Tender Pasar Petang

## Rp 1,8 M ✓

### ■ Proyek Hanya Mengerjakan Bagian Belakang Pasar

#### MANGUPURA, TRIBUN BALI

-Tahun 2019 ini Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran untuk revitalisasi Pasar Petang di Kecamatan Petang, Badung. Pasar yang dikelola Perumda Pasar Mangu Giri Sedana ini pekan depan mulai ditender dengan nilai Rp 1,8 miliar.

Anggaran ini berasal dari bantuan revitalisasi pasar tradisional oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Selaku leading sektor langsung dibawah Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung.

"Ya tahun ini Pasar Petang yang mendapat bantuan revitalisasi. Sebelumnya adalah Pasar Adat Tegal, Darmasaba, Kecamatan Abiansemal (2017), dan Pasar Sembung, Kecamatan Mengwi (2015)," ungkap Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung I Ketut Karpata, Kamis (20/5).

Nilai bantuan revitalisasi Pasar Petang sudah ditentukan yakni sebesar Rp 1.808.675.550. Bahkan proses tender sampai 26 Juni 2019. "Targetnya dalam satu tahun anggaran (2019) revitalisasi pasar sudah selesai. Semoga tidak ada hambatan,"

harapnya.

Birokrat asal Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi ini menjelaskan bahwa revitalisasi pasar tradisional di seluruh Indonesia sedang digenjut oleh pemerintah pusat. Untuk itu, bantuan yang merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dimanfaatkan betul oleh pengelola pasar tradisional di Gumi Keris. "Dalam hal ini yang penting ajukan proposal dulu, kita akan bantu memfasilitasi," katanya.

Direktor Utama Perumda pasar I Made Sukantra mengaku bantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi Pasar Petang di bagian belakang pasar. "Dengan dana yang diterima akan di revitalisasi bagian di belakang saja dulu, termasuk untuk kios pedagang," ucap Sukantra.

Lanjut dia, pihaknya juga berencana mengajukan revitalisasi untuk pasar lainnya. Seperti pasar beringkit secara umum. "Pasar Hewan Beringkit juga perlu direvitalisasi. Sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Bupati. Pasar Hewan beringkit itu kan merupakan ikon satu-satunya pasar hewan di Bali," katanya. (gus)

Edisi : Jumat, 21 Juni 2019

Hal : 6